

AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL

**Rini Ridhawati
Sri Rahayu Syah
Victoria Kusumaningtyas Priyambodo
Diamond Limbong
Annisa Nabila Hasan
Resmi Afifah Fadilah
Neks Triani
Frida Fanani Rohma**



GET PRESS INDONESIA

AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Penulis : Rini Ridhawati
Sri Rahayu Syah
Victoria Kusumaningtyas Priyambodo
Diamond Limbong
Annisa Nabila Hasan
Resmi Afifah Fadilah
Neks Triani
Frida Fanani Rohma

ISBN :

Editor : Mila Sari, M.Si.
Penyunting: Yuliatrini Novita, M.Hum
Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd.

Penerbit: GET PRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:
Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat
website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku "Akuntansi Lingkungan dan Sosial". Buku ini disusun untuk memberikan gambaran tentang konsep dan praktik akuntansi sosial dan lingkungan, yang semakin penting di era modern ini. Dimulai dengan pengenalan dasar-dasar akuntansi sosial dan lingkungan, buku ini meliputi kebijakan, teori, dan praktik yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility (CSR), laporan keberlanjutan, serta akuntansi manajemen lingkungan. Selain itu, pembaca akan mendapatkan wawasan tentang etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi, dan akademisi dalam memahami dan menerapkan konsep akuntansi sosial dan lingkungan, terutama dalam konteks Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Semoga buku ini memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu akuntansi yang lebih berkelanjutan.

Padang, Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN DAN KONSEP DASAR	
AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN	1
1.1 Akuntansi Sosial	2
1.2 Akuntansi Lingkungan.....	5
1.3 Praktik Akuntansi Sosial dan Lingkungan	8
DAFTAR PUSTAKA	11
BAB 2 KEBIJAKAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN: PRINSIP	
DAN IMPLEMENTASI	13
2.1 Kebijakan Sosial dan Lingkungan di Indonesia	13
2.2 Sejarah CSR di Indonesia	15
2.3 Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>)	18
2.4 Perbedaan <i>Financial Statements, Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i>	19
2.5 Manfaat <i>Sustainability Report</i>	20
2.6 Kebijakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability</i> <i>Report</i>) di Indonesia.....	21
2.7 <i>Sustainability Report Assurance (SRA)</i> berubah menjadi <i>Asia Sustainability Reporting Rating</i> (<i>ASRR</i>)	25
2.8 Prinsip Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability</i> <i>Report</i>).....	26
DAFTAR PUSTAKA	28
BAB 3 AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL:	
TEORI DAN PRAKTIK	31
3.1 Pendahuluan.....	31
3.2 Landasan Etika Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial	33
3.3 Teori Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.....	39
3.4 Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial: Praktik.....	43

DAFTAR PUSTAKA	50
BAB 4 AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN	53
4.1 Pendahuluan	53
4.2 Definisi Akuntansi Manajemen Lingkungan.....	55
4.3 Peranan Akuntansi Manajemen Lingkungan terhadap Pengambilan Keputusan Internal	57
4.4 Teknik Akuntansi Manajemen Lingkungan dalam Pengambilan Keputusan Internal.....	58
4.5 Tujuan Akuntansi Manajemen Lingkungan	60
4.6 Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan.....	62
4.7 Biaya Lingkungan.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66
BAB 5 PELAPORAN BERKELANJUTAN: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS.....	67
5.1 Laporan Keberlanjutan	67
5.2 Standar GRI Bagi Pelaporan Keberlanjutan.....	69
5.3 SEOJK Nomor 16 Tahun 2021	77
DAFTAR PUSTAKA	80
BAB 6 LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA CSR DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	81
6.1 Pendahuluan	81
6.2 Ruang Lingkup CSR dalam Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	86
6.3 Prinsip-Prinsip CSR yang Berhubungan dengan Lingkungan Hidup.....	89
6.4 Peran CSR dalam Pembangunan Berkelanjutan	94
6.5 Integrasi CSR dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Praktik Akuntansi	97
6.6 Tantangan dan Peluang CSR dalam Pembangunan Berkelanjutan.....	103
6.7 Kebijakan dan Regulasi yang Mendorong CSR Lingkungan	108

6.8 Studi Kasus Implementasi CSR dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	113
6.9 Dampak Nyata dari Praktik CSR terhadap Lingkungan Hidup dan Masyarakat	114
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB 7 IMPLEMENTASI AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL PADA SEKTOR AGRIKULTUR: MODEL DAN PRAKTEK TERBAIK

7.1 Pendahuluan.....	121
7.2 Akuntansi Lingkungan dan Sosial Pada Sektor Agrikultur.....	123
7.3 Regulasi dan Kebijakan Terkait Akuntansi Lingkungan dan Sosial di Sektor Agrikultur	129
7.4 Model dan Praktik dalam Implementasi Akuntansi Lingkungan dan Sosial pada Sektor Agrikultur	130
7.4 Kesimpulan	132
DAFTAR PUSTAKA	135

BAB 8 ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KONTEKS LINGKUNGAN

8.1 Konsep Dasar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	137
8.2 Peraturan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	138
8.3 Dimensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	139
8.4 Faktor Pendorong Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	140
8.5 Pengelompokan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	141
8.6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Konteks Lingkungan	143
8.7 Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	145
8.8 Tahapan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	147

8.9 Urgensi Penerapan Tanggung Jawab Sosial	
Perusahaan	148
8.10 Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.....	150
8.11 Teknik Pengukuran Tanggung Jawab Sosial	
Perusahaan.....	151
8.12 Standarisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial	
Perusahaan di Indonesia.....	152
DAFTAR PUSTAKA	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1. Standar GRI 2021.....	70
Gambar 5. 2. Standar GRI 2021: Pengungkapan Umum	74
Gambar 5. 3. Standar GRI 2021: Pengungkapan Aspek Ekonomi.....	75
Gambar 5. 4. Standar GRI 2021: Pengungkapan Aspek Lingkungan.....	76
Gambar 5. 5. Standar GRI 2021: Pengungkapan Aspek Sosial	77
Gambar 5. 6. Isi Laporan Keberlanjutan.....	78
Gambar 5. 7. Isi Laporan Keberlanjutan.....	79
Gambar 7. 1. Penggunaan Teknologi Pertanian Tepat Guna dan Berkelanjutan	124
Gambar 7. 2. Akuntansi Sosial, Program CSR.....	126

BAB 1

PENDAHULUAN DAN KONSEP DASAR AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Oleh Rini Ridhawati

Akuntansi sosial dan lingkungan memang bukan hal yang baru, namun bukan juga merupakan hal cukup familiar di lingkungan awam akuntansi. Akuntansi seringkali memiliki *image* hanya terbatas pada laporan keuangan, atau lebih spesifik hanya terbatas pada angka saja. Seiring berjalannya waktu, *stakeholder* perusahaan tidak hanya terbatas pada pemegang saham dan kreditor saja. Beberapa berpendapat bahwa perusahaan juga perlu menjadikan masyarakat dan lingkungan sebagai salah satu *stakeholder* mereka, sebagai bagian dari *sustainability* perusahaan. Salah satunya, melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tetapi, CSR bukanlah akar dari akuntansi sosial dan lingkungan.

CSR dan SEA merupakan konsep yang berbeda dengan asal dan tujuan yang berbeda, dimana CSR berfokus pada perilaku etis perusahaan terhadap masyarakat, sedangkan akuntansi sosial dan lingkungan melibatkan akuntansi dampak sosial dan lingkungan.

Akuntansi sosial dan lingkungan muncul karena adanya kebutuhan akan perubahan substansial dalam praktik akuntansi saat ini, yang bertujuan untuk menantang wacana dominan dan memberikan ruang bagi beragam sudut pandang dalam praktik akuntansi.

Berbeda dengan akuntansi konvensional, akuntansi sosial dan lingkungan tidak mempunyai standar praktis seperti akuntansi konvensional. Hal ini dikarenakan berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan, penentu kebijakan, serikat terkait, serta penggiat lingkungan, memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda terkait bidang ini (Brown & Fraser, 2006). Brown dan Fraser (2006) juga menekankan faktor beragamnya sudut pandang dalam akuntansi sosial dan lingkungan inilah yang menjadi tantangan standarisasi dan menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif dalam praktik akuntansi sosial dan lingkungan.

1.1 Akuntansi Sosial

Retolaza & San-Jose (2021) mendefinisikan akuntansi sosial sebagai sistem akuntansi berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima yang menekankan akuntabilitas perusahaan. Menurut Retolaza dan San-Jose, akuntansi sosial melibatkan penggunaan unit moneter untuk menyatakan nilai bersamaan dengan prinsip-prinsip seperti kontinuitas sepanjang waktu, akrual, dan aset ekonomi, yang membedakannya dari proposal terkait lainnya. Retolaza dan San-Jose juga berpendapat akuntansi sosial harus seketat akuntansi keuangan. Hal ini berarti akuntansi sosial seharusnya diatur oleh prinsip-prinsip seperti keandalan, konservatisme, konsistensi, pengungkapan penuh, dan materialitas.

Brown dan Fraser (2006) sendiri berpendapat akuntansi sosial adalah praktik di mana kelompok subordinat dan gerakan sosial menantang kepentingan ekonomi dominan melalui pandangan dunia alternatif. Menurut Brown dan Fraser, akuntansi sosial melibatkan penggunaan laporan "bayangan" yang mengacu pada sumber informasi alternatif yang digunakan untuk mengungkap perbedaan antara aktivitas yang dilaporkan

dan kesenjangan informasi yang ada. Kesenjangan informasi ini dapat disebabkan oleh kesenjangan dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dimana perspektif “kasus bisnis” mendominasi, sehingga berpotensi menutupi permasalahan mendasar.

Contrafatto & Burns (2013) memaparkan akuntansi sosial mengacu pada praktik akuntansi untuk aspek sosial dan lingkungan selain aspek keuangan dalam organisasi. Akuntansi sosial juga mencakup intervensi seperti sistem pembukuan akuntansi sosial, pelaporan keberlanjutan, sistem manajemen lingkungan, dan teknologi akuntansi sosial tertentu seperti model penilaian keberlanjutan dan akuntansi biaya penuh.

Sedangkan Nicholls (2020) berpendapat bahwa akuntansi sosial melibatkan pengintegrasian hasil sosial dan lingkungan dengan laporan keuangan untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai dampak organisasi. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan ketegangan antara keuntungan ekonomi dan tujuan sosial/lingkungan dengan mempertimbangkan hasil-hasil ini dalam keputusan alokasi sumber daya. Prinsip-prinsip akuntansi sosial mencakup penilaian dan penerapan Pengembalian Investasi Sosial, yang digunakan di berbagai sektor.

Terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai alasan akuntansi sosial muncul. Brown & Fraser (2006) berpendapat bahwa akuntansi sosial muncul untuk menantang kepentingan ekonomi dominan. Selain itu, akuntansi sosial juga berfungsi sebagai wadah bagi entitas yang terpinggirkan atau kurang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan untuk menyuarakan pandangan alternatif. Sehingga akuntansi sosial bertujuan untuk mengungkap perbedaan antara aktivitas yang dilaporkan dan informasi yang disembunyikan melalui penggunaan laporan "bayangan". Akuntansi sosial memberikan kekuatan kontra-hegemonik dengan memberikan suara pada

gerakan sosial dan menantang status *quo*. Hal ini memungkinkan keterlibatan dengan praktik untuk mencapai perubahan dan mendorong refleksi terhadap pemahaman tanggung jawab sosial perusahaan. Brown & Faser juga berpendapat bahwa akuntansi sosial membantu dalam menabur benih perubahan struktural dengan menciptakan logika situasional yang berbeda dan meningkatkan tekanan eksternal untuk perubahan.

Contrafatto & Burns (2013) berpendapat bahwa akuntansi sosial muncul untuk memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan beserta aspek keuangan dalam organisasi, yang kemudian akan mendorong keberlanjutan. Para ahli menekankan pentingnya memahami dinamika organisasi dan peran akuntansi manajemen dalam membentuk praktik akuntansi sosial dan lingkungan. Dimana, ketika organisasi mengintegrasikan ukuran-ukuran sosial dan lingkungan ke dalam alat manajemen seperti *balance scorecard* secara berimbang maka hasilnya akan mengarahkan keputusan operasional dan strategis menuju *sustainability* atau keberlanjutan.

Nicholls (2020) berargumen bahwa akuntansi sosial muncul untuk mengintegrasikan hasil sosial dan lingkungan dengan laporan keuangan. Sehingga, akuntansi sosial diharapkan dapat menyelesaikan ketegangan antara keuntungan ekonomi dan tujuan sosial/lingkungan. Atau dengan kata lain, akuntansi sosial memastikan bahwa keputusan alokasi sumber daya mempertimbangkan hasil finansial dan sosial/lingkungan secara bersamaan. Nicholls juga berargumen, akuntansi sosial menjawab kebutuhan untuk mengurangi kesenjangan, yang merupakan aspek kunci dari tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Senada dengan Nicholls (2020), Retolaza & San-Jose (2021) berargumen bahwa akuntansi sosial menekankan akuntabilitas perusahaan dan penciptaan nilai sosial bagi pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada perusahaan mengenai dampak sosialnya, sehingga membantu organisasi menjadi lebih efisien. Melalui penerapan akuntansi sosial berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi, organisasi dapat memonetisasi nilai sosial yang dihasilkan dan mengevaluasi dampak sosio-emosional di luar ukuran ekonomi-keuangan.

1.2 Akuntansi Lingkungan

Tidak jauh berbeda dengan akuntansi sosial, akuntansi lingkungan juga menjadi topik yang hangat dari kalangan akademisi maupun praktisi (Nguyen & Tran, 2019). Nguyen dan Tran berpendapat bahwa saat ini negara-negara di dunia, khususnya di Eropa Barat dan Asia Timur, sedang melakukan investasi yang masif dalam strategi pertumbuhan yang ramah lingkungan. Negara-negara ini khususnya tertarik untuk memerangi dan menghilangkan akses ke pasar produk impor yang tidak sesuai dengan proses produksi dan tidak memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan.

Senada dengan Nguyen dan Tran, Scarpellini et al. (2020) juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran para manajer terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, pembuangan limbah, pemanfaatan lokasi TPA, polusi tanah dan air, konsumsi sumber daya, dan daur ulang material telah meningkat. Hal ini menyebabkan munculnya istilah ekonomi sirkular (*Circular Economy*-CE) yang digunakan oleh pemerintah, peneliti, dan praktisi untuk menggambarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.

Begitu juga dengan Maama & Appiah (2019) juga yang menekankan bahwa akuntansi dan pelaporan mengenai lingkungan hidup menjadi semakin penting bagi dunia usaha karena pengaruh kinerja sosial dan lingkungan suatu perusahaan terhadap kekuatan keuangannya semakin menjadi perhatian investor, pemerintah, kreditor, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, akuntansi lingkungan berupaya menilai dampak lingkungan dari kebijakan perusahaan. Akuntansi lingkungan atau *green accounting* kemudian dipandang sebagai alat yang krusial untuk memperoleh pemahaman tentang peran perusahaan dalam perekonomian terhadap keselamatan lingkungan. Menurut Maama dan Appiah, akuntansi lingkungan menyediakan data, menyoroti kontribusi perusahaan bisnis terhadap kesejahteraan ekonomi, biaya yang ditimbulkan dalam bentuk polusi atau degradasi sumber daya, dan kontribusi terhadap masyarakat.

Lebih lanjut, Maama dan Appiah memaparkan bahwa akuntansi lingkungan sangat krusial karena *stakeholder* menuntut perusahaan untuk melaporkan dampak lingkungan dan kinerja keuangannya. Akuntansi lingkungan membantu dalam memahami kinerja lingkungan dan sosial organisasi, yang semakin penting bagi investor, pemerintah, dan masyarakat sebagai *stakeholder*. Akuntansi lingkungan menyediakan data tentang kontribusi bisnis terhadap kesejahteraan ekonomi, biaya polusi, dan kontribusi masyarakat, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi perusahaan untuk mengakses sumber daya penting untuk kelangsungan hidup dengan mengintegrasikan informasi kelestarian lingkungan dalam sistem akuntansi mereka.

Senada dengan Maama dan Appiah (2019), Nicholls (2020) memaparkan bahwa akuntansi lingkungan membantu dunia usaha dan investor memahami dampak sebenarnya dari tindakan mereka terhadap planet ini, sehingga mendorong

pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan biaya dan manfaat lingkungan ke dalam laporan keuangan, perusahaan dapat mengambil keputusan lebih baik yang mencerminkan dampaknya terhadap dunia, yang kemudian mengarah pada praktik yang lebih berkelanjutan. Perusahaan ini mendukung gerakan global menuju keberlanjutan dengan menyelaraskan praktik bisnis dengan tujuan pembangunan keberlanjutan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan degradasi lingkungan. Akuntansi lingkungan juga dapat mengungkapkan implikasi keuangan dari dampak negatif terhadap lingkungan, yang berpotensi mengurangi nilai perusahaan jika hal ini tidak dikelola, sehingga memberikan insentif untuk perbaikan kinerja lingkungan.

Scarpellini et al. (2020) juga menekankan mengenai pentingnya praktik akuntansi lingkungan. Menurut Scarpellini et al., praktik akuntansi lingkungan sangat penting bagi perusahaan yang ingin mencapai ekonomi sirkular. Hal ini dikarenakan praktik akuntansi lingkungan membantu dalam mendefinisikan dan mengukur investasi dan aktivitas untuk menutup loop. Praktik-praktik akuntansi lingkungan relevan dalam perencanaan operasional dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan ekonomi sirkular seperti aliran material dan limbah. Sehingga, Scarpellini et al. berkesimpulan bahwa akuntansi lingkungan adalah alat untuk pengelolaan lingkungan perusahaan, membantu dalam studi hubungan timbal balik antara akuntan dan ekologi.

1.3 Praktik Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Lalu bagaimana praktik akuntansi sosial dan lingkungan? Hingga saat ini, belum ada peraturan yang mengatur akuntansi sosial dan lingkungan seperti peraturan yang mengatur mengenai akuntansi keuangan konvensional. Sehingga, terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan akuntansi sosial dan lingkungan. Misalnya, di bidang akuntansi sosial. Contrafatto & Burns (2013) berpendapat bahwa perusahaan menggunakan akuntansi sosial untuk menunjukkan komitmen mereka tidak hanya untuk menghasilkan uang tetapi juga kepedulian terhadap manusia dan planet ini, dengan mengukur hal-hal seperti jejak karbon atau keterlibatan komunitas. Praktik akuntansi sosial menjadi lebih umum karena dunia usaha menyadari pentingnya terlihat ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial, yang juga dapat membantu mereka menarik pelanggan dan investor yang menghargai keberlanjutan.

Retolaza & San-Jose (2021) memberi contoh lain bagaimana perusahaan menggunakan akuntansi sosial untuk menunjukkan bagaimana mereka membantu masyarakat. Misalnya dengan menciptakan lapangan kerja atau mendukung proyek masyarakat, dengan memberikan nilai uang pada tindakan tersebut untuk menunjukkan dampaknya lebih dari sekedar menghasilkan keuntungan. Akuntansi sosial melibatkan pengamatan aktivitas perusahaan dan mengukur dampak baik dan buruknya terhadap masyarakat dan lingkungan, menggunakan prinsip yang mirip dengan akuntansi biasa tetapi berfokus pada dampak sosial dan emosional. Praktik akuntansi sosial juga membantu perusahaan mengkomunikasikan nilai sosialnya kepada publik, yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpercayaan dan meningkatkan transparansi mengenai manfaat yang mereka berikan kepada masyarakat.

Sedangkan contoh praktik akuntansi lingkungan dipaparkan oleh Nicholls (2020). Nicholls memaparkan bahwa perusahaan seperti perusahaan kimia asal Jerman-BASF dan perusahaan yang bergerak di bidang barang mewah-Kering, telah mengembangkan laporan terperinci yang menunjukkan dampak lingkungan dari aktivitas mereka, sehingga membantu menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam operasional bisnis.

Contoh praktik akuntansi lingkungan lainnya dipaparkan oleh Chung & Cho (2018). Chung dan Cho memaparkan bahwa salah satu praktik akuntansi lingkungan di Amerika Serikat dengan menggunakan metrik akuntansi lingkungan. Metrik akuntansi lingkungan mencakup Inventarisasi Pelepasan Beracun (TRI) oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) yang akan mengukur kinerja lingkungan di tingkat perusahaan. Perusahaan melaporkan pelepasan racun ke EPA, yang dikumpulkan untuk menentukan kinerja tingkat perusahaan. Data lingkungan, seperti TRI, penting untuk mengkaji dimensi lingkungan dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Metrik seperti TRI mungkin tidak dapat menangkap kinerja lingkungan sebenarnya secara akurat karena adanya variasi dalam polutan dan ambang batas pelaporan. Akuntansi lingkungan mengintegrasikan unsur-unsur non-moneter dan kualitatif, yang dapat menimbulkan ambiguitas dibandingkan dengan pengukuran keuangan tradisional.

Praktik akuntansi lingkungan lainnya datang dari Nigeria. Iliemena (2020) memaparkan praktik akuntansi lingkungan di Nigeria berfokus pada perusahaan minyak dan gas yang terdaftar. Perusahaan-perusahaan Nigeria didorong untuk memasukkan kebijakan lingkungan ke dalam kebijakan perusahaan mereka untuk mengatur aktivitas dan memotivasi akuntansi lingkungan. Walaupun begitu, Iliemena berpendapat bahwa pemerintah dan badan penetapan standar di Nigeria harus memberikan mandat kepada perusahaan untuk

menerapkan akuntansi dan pelaporan lingkungan untuk meningkatkan keberlanjutan.

Contoh praktik akuntansi lingkungan juga datang dari Vietnam. Nguyen & Tran (2019) memaparkan contoh praktik akuntansi lingkungan di Vietnam. Pemerintah Vietnam mewajibkan perusahaan publik untuk mempublikasikan informasi lingkungan hidup guna mendorong transparansi dan pembangunan berkelanjutan, yang menunjukkan penerapan praktis akuntansi lingkungan hidup dalam kepatuhan terhadap peraturan. Praktik akuntansi lingkungan juga mencakup pengukuran implikasi finansial dari strategi lingkungan, seperti investasi pada teknologi ramah lingkungan atau proses yang mengurangi limbah dan polusi, sehingga berpotensi meningkatkan nilai pasar perusahaan dan mengurangi biaya.

Meskipun memiliki potensi, penerapan akuntansi sosial menghadapi tantangan seperti kompleksitas proses, kurangnya norma yang diterima, dan biaya yang terkait dengan penerapannya (Retolaza & San-Jose, 2021). Belum adanya peraturan yang baku dan mengikat bagi dunia usaha untuk mengaudit laporan hasil sosial dan lingkungan mereka, yang berarti masih banyak ruang untuk perbaikan agar praktik-praktik ini lebih dapat diandalkan dan tersebar luas (Nicholls, 2020). Sehingga, peran *stakeholder* begitu krusial dalam mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan, dengan tujuan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, J., & Fraser, M. (2006). Approaches and perspectives in social and environmental accounting: An overview of the conceptual landscape. In *Business Strategy and the Environment* (Vol. 15, Issue 2, pp. 103–117). <https://doi.org/10.1002/bse.452>
- Chung, J., & Cho, C. H. (2018). Current trends within social and environmental accounting research: A literature review. *Accounting Perspectives*, 17(2), 207–239. <https://doi.org/10.1111/1911-3838.12171>
- Contrafatto, M., & Burns, J. (2013). Social and environmental accounting, organisational change and management accounting: A processual view. *Management Accounting Research*, 24(4), 349–365. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2013.10.004>
- Iliemena, R. O. (2020). Environmental Accounting Practices and Corporate Performance: Study of Listed Oil and Gas Companies in Nigeria. *European Journal of Business and Management*, 12(22), 58–13. <https://doi.org/10.7176/ejbm/12-22-08>
- Maama, H., & Appiah, K. O. (2019). Green accounting practices: lesson from an emerging economy. *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(4), 456–478. <https://doi.org/10.1108/QRFM-02-2017-0013>
- Nguyen, L. S., & Tran, M. D. (2019). Disclosure levels of environmental accounting information and financial performance: The case of Vietnam. *Management Science Letters*, 9(4), 557–570. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.1.007>
- Nicholls, J. A. (2020). Integrating financial, social and environmental accounting. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(4), 745–769. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-01-2019-0030>

- Retolaza, J. L., & San-Jose, L. (2021). Understanding Social Accounting Based on Evidence. *SAGE Open*, 11(2). <https://doi.org/10.1177/21582440211003865>
- Scarpellini, S., Marín-Vinuesa, L. M., Aranda-Usón, A., & Portillo-Tarragona, P. (2020). Dynamic capabilities and environmental accounting for the circular economy in businesses. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(7), 1129–1158. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2019-0150>

BAB 2

KEBIJAKAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN: PRINSIP DAN IMPLEMENTASI

Oleh Sri Rahayu Syah

2.1 Kebijakan Sosial dan Lingkungan di Indonesia

Sesuai peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup (BLH) memiliki peran untuk menjalankan fungsi strategis demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perspektif kebijakan sosial dan lingkungan hidup dirancang untuk mensyaratkan agar fungsi dan kemampuan lingkungan dapat dilestarikan sebagai landasan bagi pembangunan berkelanjutan. Artinya setiap individu mempunyai peranan penting sebagai wujud kepedulian dan bentuk tanggung jawab agar kebutuhan generasi saat ini terpenuhi sekaligus tidak mengganggu kebutuhan kebutuhan manusia di masa depan. Dalam kenyataannya, kualitas lingkungan hidup terus memburuk atau menurun, hal ini disebabkan antara lain pencemaran udara yang bersumber dari asap kendaraan bermotor dan cerobong asap pabrik hasil dari kegiatan industri, pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah cair hasil dari kegiatan industry, rumah sakit, restoran dan usaha lainnya serta limbah padat yang bersumber dari rumah tangga dan usaha UMKM yang tidak dikelola dengan baik (Marsuyetno & Harahap, 2013).

Sistem perairan atau neraca air terganggu akibat perambahan hutan secara liar sehingga merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan bahaya banjir yang lebih serius saat musim hujan dan mengalami kekeringan atau krisis air saat musim kemarau. Tumbuhnya industri arang mangrove dan alih fungsi kawasan mangrove untuk penggunaan lain mengakibatkan rusaknya hutan mangrove. Selain itu, pertambangan juga menyebabkan penurunan permukaan tanah dan kerusakan pantai, serta penggunaan air bawah tanah secara berlebihan. Ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara, serta menurunnya keanekaragaman hayati di sana, semuanya terkena dampak negatif dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Menurut Rencana Strategis BLH (2010), hal di atas erat kaitannya dengan kegiatan pembangunan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup.

Analisis kebijakan lingkungan hidup sangatlah penting atau dengan kata lain, mempunyai banyak nilai strategis. Oleh karena kebijakan lingkungan hidup serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya merupakan informasi penting untuk diketahui, maka pengukuran kinerja petugas hendaknya dimaknai sebagai kegiatan evaluasi untuk melihat baik atau buruknya mereka dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Akibatnya, analisis kebijakan lingkungan merupakan studi tentang bagaimana keberhasilan dan kegagalan kinerja diinterpretasikan (Marsuyetno & Harahap, 2013).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan gagasan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban terhadap pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini termasuk menangani isu-isu yang berdampak

pada lingkungan hidup seperti penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air dan tanah, peningkatan emisi gas rumah kaca, rusaknya ekosistem pesisir serta laut, rusaknya habitat tertentu akibat perubahan fungsi lahan/ekosistem, tidak taat terhadap peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup, serta kurangnya kepedulian masyarakat dan sangat rendahnya pemahaman tentang lingkungan hidup.

2.2 Sejarah CSR di Indonesia

Karena banyaknya protes masyarakat akibat tindakan pelaku usaha yang tidak peduli terhadap masyarakat sekitar, maka tahun 1930 dapat dikatakan sebagai tahun lahirnya konsep CSR dalam dunia usaha. Selain fakta bahwa saat itu sedang terjadi resesi global yang sangat besar, yang menyebabkan pengangguran dan banyak bisnis gulung tikar, hanya perusahaanlah yang mengetahui segalanya. Dunia sedang mengalami kekurangan modal untuk input produksinya saat ini. Pengangguran tersebar luas, memaksa para pekerja untuk berhenti bekerja, sehingga merugikan pekerjaan mereka. Karena perusahaan hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa, muncullah ketidakpuasan atas sikap tidak bertanggung jawab yang ditunjukkannya terhadap karyawannya saat itu. Pada titik ini, masyarakat percaya bahwa bisnis tidak mempunyai kewajiban moral sama sekali. Menanggapi kemarahan masyarakat, sejumlah pengusaha menyampaikan permintaan maaf dan jaminan kepada pekerjanya yang dipecat. Fakta bahwa perusahaan telah melaksanakan CSR namun belum diketahui istilahnya merupakan aspek yang menarik dari fenomena ini. Padahal, upaya perusahaan dalam peduli terhadap masyarakat sekitar terlihat nyata. Namun upaya ini lebih sering disebut sebagai tanggung jawab moral. Johnson & Johnson, didirikan oleh Robert Wood Johnson pada tahun 1943, adalah perusahaan pertama yang memasukkan CSR ke dalam kebijakan

perusahaannya. Selain itu, The Hershey Company milik Milton Hershey memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar memulai bisnis. Hershey menciptakan komunitas yang tumbuh menjadi kota dengan berbagai fasilitas, pusat kebudayaan, dan pusat aktivitas warga yang berlanjut hingga saat ini.

Pada awalnya CSR lebih sering disebut dengan Social Responsibility (SR), namun seiring perkembangannya, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh campur tangan korporasi masa kini. Howard R. menyatakan bahwa "Tanggung Jawab Sosial Pengusaha" oleh Bowen dianggap sebagai titik balik dalam CSR kontemporer. Judul buku tersebut terkesan bias gender karena hanya menyebutkan pengusaha dan bukan perempuan. Namun, definisi Bowen tentang CSR mempunyai dampak yang signifikan terhadap literatur CSR berikutnya sejak publikasinya. kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan CSR, sehingga Bowen disebut sebagai "Bapak CSR".

Para ahli mulai memformalkan definisi CSR pada awal tahun 1960an. Keith Davis, pakar teori sifat, adalah salah satu akademisi CSR paling terkenal pada saat itu. Davis terkenal karena memberikan perspektif mendalam tentang hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan kekuatan bisnis. Menurut "Iron Law of Responsibility" Davis, tanggung jawab sosial pengusaha harus proporsional dengan kedudukan sosialnya (tanggung jawab sosial pengusaha harus proporsional).

Buku yang berjudul *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998) yang terbit pada tahun 1998 terinspirasi dari populernya istilah CSR karena awal tahun 1994 merupakan tahun emas CSR karena dunia sudah mengetahui apa itu CSR. John Elkington telah menulis buku tersebut. Pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial, yang semuanya diprakarsai oleh Komisi Dunia

untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED), merupakan tiga komponen kunci yang ia kembangkan dalam buku ini untuk pembangunan berkelanjutan. Elkington membagi CSR menjadi tiga fokus dalam Brundtland Report (1987), yang sengaja ia singkat menjadi 3P, yaitu profit, planet, dan people. Pada tahun 1980an, istilah “CSR” mulai digunakan di Indonesia sendiri. Namun, sejak tahun 1990-an, popularitasnya semakin meningkat. Mirip dengan sejarah istilah “CSR” di dunia yang muncul setelah kegiatan CSR sudah berlangsung. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sebenarnya sudah beberapa tahun mengikuti kegiatan CSR ini. Namun inisiatif CSR di Indonesia pada saat itu disebut dengan “kegiatan sosial perusahaan” atau CSA (Corporate Social Activity). Karena ide dan mentalitas yang digunakan hampir sama, maka kegiatan CSA ini bisa dibilang sebanding dengan CSR. CSA ini, seperti halnya CSR, mencoba menunjukkan “partisipasi” dan “kepedulian” perusahaan terhadap isu sosial dan lingkungan.

Dengan melaksanakan suatu program yang bermanfaat, maka CSR adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan suatu perusahaan kepada seluruh pihak yang ada di dalamnya. Perusahaan yang menjalankan CSR menyadari dampaknya terhadap semua aspek masyarakat—ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Awal tahun 2000an menandai dimulainya perkembangan CSR di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengatur kebijakan tentang CSR bagi perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap isu ekologi dan isu sosial. Beberapa peraturan menjadi landasan hukum khusus CSR sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

2.3 Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Saat ini semakin banyak perusahaan yang perlu membuat kegiatan bisnis sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Asumsi bahwa produktivitas jangka panjang perusahaan harus sesuai dengan isu ekologi dan isu sosial yang semakin penting. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membatasi dampak negatif dari isu sosial dan isu lingkungan alam sehingga kebutuhan zaman sekarang terpenuhi dan sekaligus tidak mengganggu kebutuhan manusia di masa depan.

Laporan keberlanjutan merupakan laporan presentasi yang disusun oleh suatu perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, dan mengawasi perubahan agar memungkinkan dilakukannya tindakan. Laporan keberlanjutan berlaku untuk semua perusahaan. Penyusunan laporan keberlanjutan dimaksudkan untuk mewujudkan perusahaan yang bertanggung jawab dan sebagai bentuk tahapan dalam melaksanakan administrasi perusahaan yang baik (GCG) (Erkens, Paugam, and Stolowy, 2015). Laporan keberlanjutan membantu perusahaan dalam menentukan tujuan, mengukur pelaksanaan, dan menangani pelaksanaan bisnis sejalan dengan SDGs.

Laporan keberlanjutan melaporkan informasi positif dan informasi negatif yang menjelaskan perspektif ramah lingkungan, alam, dan keuangan. Laporan keberlanjutan memberikan penjelasan dari kinerja yang disampaikan oleh perusahaan sebagai upaya untuk memahami dan menangani dampak peningkatan pengelolaan pada aktivitas perusahaan.

Ketika dunia terus berupaya untuk mengatasi berbagai masalah keberlanjutan, terdapat kekuatan untuk menciptakan dukungan yang stabil, serupa, dan dapat diandalkan yang mengungkapkan norma-norma secara universal karena meningkatnya seruan untuk memperluas keterusterangan

mengenai masalah pemeliharaan dari pendukung keuangan, pengawas, dan mitra lainnya.

Laporan keberlanjutan tidak hanya mengungkapkan pelaksanaan fungsional SDGs, namun juga merupakan alat evaluasi dan tahap korespondensi yang penting dengan pendukung keuangan dan mitra lainnya. Laporan keberlanjutan juga berfungsi sebagai pemeriksaan kesehatan tahunan yang mempertimbangkan kualitas dan kekurangan suatu perusahaan untuk lebih mengembangkan kemampuan pemeliharaan dalam memberikan hasil yang berharga bagi bisnis dan mitra perusahaan.

Laporan keberlanjutan tidak hanya membuat perusahaan melakukan transparansi untuk mematuhi sesuai dengan pedoman yang berlaku di Indonesia, namun juga akan meyakinkan pihak internal perusahaan untuk mencari prosedur bisnis terbaik. Bagi perusahaan yang telah memiliki reputasi yang baik, akan memiliki peluang potensial untuk memenangkan persaingan pasar. Laporan keberlanjutan berguna untuk pengelolaan secara natural serta pencapaian strategis (jangka panjang). Dalam aktivitasnya, perusahaan telah mengambil bagian dalam memprioritaskan lingkungan serta memprioritaskan perekonomian negara.

2.4 Perbedaan *Financial Statements*, *Annual Report* dan *Sustainability Report*

Perusahaan publik yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib membuat dan mempublikasikan laporan keuangan (*financial statements*), membuat laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Laporan keuangan merupakan laporan tentang informasi keuangan suatu perusahaan pada periode satu tahun. Laporan keuangan Perusahaan publik terdiri dari laporan laba

rugi, laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan tahunan adalah laporan yang berisi informasi tentang rangkuman *financial*, surat kepada pemegang saham, kegiatan operasi perusahaan, pertumbuhan perusahaan, pernyataan keuangan dan informasi tentang karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris serta analisis manajemen perusahaan dalam satu tahun. Laporan tahunan juga dirinci pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan berdasarkan peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keberlanjutan merupakan laporan yang diumumkan kepada masyarakat umum (publik) yang berisi data dan informasi tentang kinerja perusahaan mengenai perspektif ekonomi, keuangan, isu sosial dan isu lingkungan hidup dalam menjalankan bisnis pada periode tertentu. Laporan keberlanjutan ditujukan kepada masyarakat umum (publik) dan untuk investor sebagai bentuk kewajiban perusahaan yang disampaikan secara lugas. Laporan keberlanjutan diharapkan dapat menyampaikan kewajiban perusahaan untuk mempertahankan bisnis yang ekonomis. Laporan keberlanjutan memberikan deskripsi yang lengkap, luas dan menyeluruh serta laporannya dapat diakses oleh semua mitra, laporan keberlanjutan juga mendeskripsikan tentang upaya perbaikan yang dapat dikelola yang telah diselesaikan oleh perusahaan.

2.5 Manfaat *Sustainability Report*

Laporan keberlanjutan bermanfaat bagi para stakeholder internal dan para stakeholder eksternal dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan keberlanjutan memiliki manfaat bagi pihak internal yaitu:

- a. Mengatasi masalah dalam hal risiko dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan publik dengan meningkatkan pemahaman.
 - b. Mengembangkan strategi dan mengelola personel perusahaan publik dalam jangka Panjang.
 - c. Menentukan indikator keberhasilan dan penilaian kinerja keberlanjutan perusahaan publik sesuai dengan peraturan, hukum, kode etik dan standar yang berlaku.
2. Laporan keberlanjutan memiliki manfaat bagi pihak eksternal yaitu:
 - a. Mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan hidup, dan tata kelola yang buruk.
 - b. Meningkatkan popularitas dan reputasi merek perusahaan publik di mata pelanggan.
 - c. Membantu pemangku kepentingan dari luar untuk memahami perusahaan publik secara keseluruhan.

2.6 Kebijakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) di Indonesia

1. Sustainability Report berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI) Versi 2021*

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan organisasi independen secara global yang membantu berbagai perusahaan agar bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dengan membuat dan menyebarkan Aturan pelaporan berkelanjutan yang berlaku secara internasional.

National Center for Corporate Reporting (NCSR) adalah organisasi pertama di Indonesia yang

mengembangkan laporan keberlanjutan. Pada tahun 2015, NCSR didirikan oleh 4 Ketua Asosiasi berikut ini:

- a. Ali Dawrin dari Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
- b. Airlangga Hartato dari Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)
- c. Elmar Bouma dari Chairman of the Indonesia-Netherlands Association (INA).
- d. Mas Achmad Daniri dari Komite Nasional Kebijakan Governance/KNKG)
- e. Eddy Gunadi (Alm) dari Chairman of Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI).

Sebagai organisasi non-pemerintah yang mengembangkan dan mensosialisasikan Pedoman Pelaporan Keberlanjutan yang berlaku secara global dan sebagai Mitra Pelatihan Resmi GRI untuk Asia Tenggara, yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, NCSR ditunjuk oleh GRI (Global Reporting Initiative) pada tahun 2011 . Di Asia Tenggara, NCSR menyelenggarakan Sustainability Reporting Awards (SRA) tahunan selain memberikan pelatihan bagi Certified Sustainability Reporting Specialists (CSRS) dan Certified Sustainability Reporting Assurors (CSRA). Asia Sustainability Reporting Rating (ASRR) menggantikan Sustainability Reporting Awards (SRA) pada tahun 2018.

Standar GRI terbaru yaitu GRI 2021, wajib digunakan oleh organisasi yang ingin menggunakan GRI dalam pembuatan laporan keberlanjutan. Komponen Hak Asasi Manusia pada GRI 2021 harus dilaporkan, dan perubahan lain dari GRI 2016 harus disertakan.

Praktik terbaik global untuk melaporkan secara publik berbagai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mencakup standar GRI. Berdasarkan Standar GRI, pelaporan keberlanjutan mengungkapkan apakah suatu organisasi telah memberikan kontribusi positif atau negatif terhadap pembangunan berkelanjutan. Sistem modular standar GRI saling berhubungan. Proses pelaporan didukung oleh tiga rangkaian Standar: Standar Universal GRI, yang berlaku untuk semua organisasi; Standar Sektor GRI, yang berlaku untuk industri tertentu; dan Standar Topik GRI, yang masing-masing memberikan pengungkapan terkait topik tertentu. Organisasi dapat mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan standar ini untuk pemilihan topik material (relevan). Standar GRI *terupdate* tersedia untuk diunduh melalui web berikut ini <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-bahasa-indonesia-translations/>

2. Sustainability Report berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017

Peraturan tentang isu social dan isu lingkungan hidup mengacu pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 menerangkan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau CSR adalah kewajiban hukum bagi bisnis yang melakukan aktivitas bisnis terkait sumber daya alam.

Pemerintah mengalami kendala dalam mengamati dan mengukur tanggung jawab program CSR karena tidak adanya pengawasan terhadap laporan yang dibuat oleh Perseroan Terbatas (PT). Hal ini yang melatarbelakangi kewenangan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitmen, dan Perusahaan Publik. Tiga tahun

kemudian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan SEOJK Nomor 16/2021 mengenai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang semakin menekankan mengenai penyampaian Laporan Keberlanjutan.

Bagi Perseroan Terbatas (PT) yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, diwajibkan untuk membuat laporan keberlanjutan dengan tetap menyertakan laporan tahunan serta laporan keuangan. Dalam hal ini, Perseroan Terbatas (PT) membuat 3 laporan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang disusun secara terpisah.

Sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah mewajibkan Perseroan Terbatas (PT) yang tercatat sejak tahun 2020. Pelaksanaannya ditunda hingga tahun 2021 karena virus Corona. Sebanyak 88% Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia telah menyampaikan laporan keberlanjutan tahun 2022. Laporan keberlanjutan merupakan instrumen penting dalam pendekatan perincian pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), bagi Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia yang mencerminkan prosedur perusahaan dalam menjawab peluang lingkungan hidup, komitmen mitra, dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang lebih baik. Laporan tersebut dapat menggambarkan kewajiban pengelolaan oleh Direktur (Pimpinan Perusahaan), menunjukkan upaya untuk lebih mengembangkan kemampuan dukungan, dan meningkatkan kepercayaan pada masyarakat umum. Selain sebagai bentuk keterusterangan bagi masyarakat pada umumnya, laporan keberlanjutan juga sejalan dengan prinsip-prinsip global dan menunjukkan kewajiban

Perseroan Terbatas (PT) terhadap aspek *Planet, People, Prosperity, Peace* dan *Partnership*.

2.7 Sustainability Report Assurance (SRA) berubah menjadi Asia Sustainability Reporting Rating (ASRR).

Sustainability Report Assurance (SRA) merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi Perusahaan yang ingin mencari konfirmasi dari pihak luar mengenai informasi material atas laporan dukungan yang dihasilkannya. Untuk Perusahaan yang melakukan pengungkapan pemeliharaan berdasarkan pedoman GRI dalam pengumumannya, SRA sangat bagus. Intinya, Konfirmasi Laporan Dukungan dilakukan untuk menunjukkan kewajiban asosiasi kepada klien dan mitra bahwa semua data yang didistribusikan adalah tepat dan tepat sasaran.

SRA menjamin bahwa informasi yang dirinci adalah tepat, benar, dan material bagi mitra, sehingga mengurangi bahaya Perusahaan yang terkait dengan potensi pengungkapan data di luar dasar. Survei laporan pengelolaan Anda berdasarkan norma afirmasi dan mengkonfirmasi informasi sesuai pedoman, seperti Standar Afirmasi GRI dan AA1000 (AA1000AS v3). Dengan SRA, menjamin keterusterangan dan legitimasi data yang Perusahaan distribusikan serta menjamin laporan keberlanjutan di masa mendatang lebih baik. Ada dua macam administrasi SRA yaitu **Full Assurance Process** dan **GRI Standard in Accordance Check**. Setelah siklus SRA selesai, Surat Pernyataan (Statement Letter) yang dibuat oleh Assuror.

Peningkatan laporan keberlanjutan di Indonesia berawal dari diadakannya penganugerahan (pemberian penghargaan) yang diberikan kepada Perusahaan/Organisasi/Asosiasi/Instansi yang telah menyusun laporan keberlanjutan dengan baik yang disebut dengan

Sustainability Reporting Award (SRA) yang dimulai sekitar tahun 2005. Hibah ini rutin diselenggarakan secara konsisten. Sejak tahun 2018, SRA berubah menjadi *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRR). Hibah ini diselenggarakan oleh *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR). Perluasan distribusi laporan keberlanjutan ini merupakan reaksi dan kewajiban Perusahaan untuk melaporkan kinerja selain laporan keuangan kepada mitra yang terdiri dari pemberi pinjaman, klien, penyedia, investor dan pekerja (Toruan & Septiani, 2020).

2.8 Prinsip Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Prinsip laporan keberlanjutan ini dimaksudkan untuk digunakan bersama dalam menentukan isi laporan. Sebuah Perusahaan diharapkan menerapkan Standar Perincian dengan asumsi asosiasi ingin menjamin jika laporan dukungannya telah disusun sesuai dengan standar GRI.

1. Melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder inclusiveness*).

Mitra perusahaan adalah pihak-pihak yang terkena dampak atau berpotensi menjadi pihak yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan. Asumsi dan kepentingan mitra akan menjadi acuan dalam berbagai pilihan untuk merencanakan laporan pengelolaan, termasuk upaya perusahaan mencapai asumsi tersebut.

2. Konteks keberlanjutan (*sustainability context*).

Laporan keberlanjutan berupaya menampilkan kinerja Perusahaan dengan suasana yang lebih luas (kompleks) dan dapat dipelihara. Terkait cara Perusahaan menambah, meningkatkan atau mengurangi kondisi alam, serta perbaikan yang dilaksanakan, serta menjelaskan isu-

isu yang berfokus dengan masalah sosial dan lingkungan di tingkat lokal, tingkat nasional maupun tingkat global.

3. Materialitas (*materiality*).

Materialitas menggabungkan dua perspektif yang berbeda. Perspektif utamanya adalah prinsip laporan berkelanjutan wajib mendeskripsikan dampak penting terhadap ekologi, sosial dan moneter dari asosiasi tersebut. Sementara itu, sudut pandang selanjutnya adalah bahwa laporan tersebut harus berdampak signifikan terhadap evaluasi dan pilihan mitra. Materialitas memiliki dampak moneter saat ini atau jangka panjang yang kritis terhadap suatu organisasi.

4. Kelengkapan (*completeness*).

Pihak eksternal sebagai mitra Perusahaan dapat mengevaluasi kinerja Perusahaan dalam periode pengumuman dukungan. Kelengkapan memasukkan unsur perluasan, batasan dan waktu. Gagasan pemenuhan kelengkapan digunakan agar sesuai dengan praktik pemenuhan data dan mengungkapkan pengenalan informasi tersebut adil dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Erkens, Michael; Paugam, Luc; Stolowy, Hervé (2015-11-18). "Non-financial information: State of the art and research perspectives based on a bibliometric study". *Comptabilité Contrôle Audit*. Tome 21 (3): 15-92. doi:10.3917/cca.213.0015. ISSN 1262-2788
- Erkens, Michael; Paugam, Luc; Stolowy, Hervé (2015-11-18). "Non-financial information: State of the art and research perspectives based on a bibliometric study". *Comptabilité Contrôle Audit*. Tome 21 (3): 15-92. doi:10.3917/cca.213.0015. ISSN 1262-2788.
- Marsuyetno, M., & Harahap, R. H. (2013). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA UTARA (STUDI PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(2).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Toruan, A. K. L., & Septiani, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sustainability Report Assurance Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

About GRI. www.globalreporting.org.

Tentang NCSR. National Center for Sustainability Reporting.

BAB 3

AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL: TEORI DAN PRAKTIK

Oleh Victoria Kusumaningtyas Priyambodo

3.1 Pendahuluan

Setiap kemajuan ekonomi atau sosial dimenangkan oleh bisnis dan sistem ekonomi yang sangat sukses, namun ada konsekuensinya. Konsekuensi atau 'harga' itulah yang oleh para ekonom disebut sebagai eksternalitas, yaitu konsekuensi dari aktivitas ekonomi yang tidak tercermin dalam biaya yang ditanggung oleh individu atau organisasi yang menikmati manfaat dari aktivitas tersebut. Peran akuntansi dan potensi akuntansi sosial harus menjadi jelas untuk menunjukkan hubungan antara kinerja bisnis dan keberlanjutan yang sukses. Akuntabilitas penting bagi masyarakat di masa depan ketika mengeksplorasi tanggung jawab sosial perusahaan. Akuntansi sosial dapat mengungkap konflik, kesulitan, eksternalitas yang tidak dapat dipisahkan, dan solusi potensial yang harus dihadapi oleh kapitalisme keuangan internasional di abad ke-21 (Gray, Adams dan Owen, 2014).

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (*Social Responsibility Accounting*) atau Akuntansi Sosial (*Social Accounting*) merupakan salah satu cabang akuntansi yang berfokus pada pelaporan dan analisis dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan mengenai bagaimana organisasi memenuhi

tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Akuntansi sosial sekaligus merupakan tiga hal: (i) suatu manifestasi yang cukup jelas dari upaya perusahaan untuk melegitimasi, menjelaskan dan membenarkan aktivitas mereka; (ii) merupakan komponen yang diinginkan secara etis dalam demokrasi yang berfungsi dengan baik dan, (iii) mungkin merupakan salah satu dari sedikit mekanisme yang tersedia untuk mengatasi keberlanjutan yang tidak melibatkan fasisme dan/atau kepunahan spesies (Gray, Adams dan Owen, 2014).

Akuntabilitas, Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan membahas interaksi yang luas dan rumit antara kehidupan organisasi, masyarakat, pasar, kesenjangan dan degradasi lingkungan melalui lensa akuntansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keberlanjutan. Dengan menempatkan cara organisasi dikendalikan dan metrik yang digunakan untuk menjalankannya sebagai inti analisis, topik ini juga mengeksplorasi bagaimana sistem ini bertentangan dengan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi dasar masyarakat beradab.

Penyusunan dan pelaporan akun sosial menunjukkan interaksi dan aktivitas sosial, lingkungan, karyawan, komunitas, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu organisasi dan, jika memungkinkan, konsekuensi dari interaksi dan aktivitas tersebut. Akun sosial mungkin berisi informasi keuangan namun lebih cenderung merupakan kombinasi informasi non-keuangan yang terkuantifikasi dan informasi deskriptif yang tidak terkuantifikasi. Akun sosial dapat mempunyai beberapa tujuan, namun pelaksanaan akuntabilitas organisasi kepada para pemangku kepentingannya harus menjadi alasan yang paling dominan dan menjadi dasar penilaian akun sosial (Gray, 2000). Dengan mengadopsi praktik akuntansi tanggung jawab sosial, organisasi dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan dan

praktik etika, meningkatkan reputasi mereka, dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan.

3.2 Landasan Etika Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Berikut ini merupakan landasan etika yang mendasari implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial. Rerangka teoritis memberikan perspektif mengenai aktivitas organisasi, sosial, politik dan ekonomi yang akan memungkinkan kita untuk melihat melampaui penjelasan yang dangkal dan konvensional mengenai rasionalitas dan perilaku organisasi.

Teori etika normatif memberikan kerangka kerja untuk menentukan apa yang benar atau salah secara moral. Dalam konteks akuntansi tanggung jawab sosial, teori-teori ini menekankan bahwa organisasi mempunyai kewajiban etis untuk mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, lebih dari sekedar mengejar keuntungan.

Utilitarianisme (*Utilitarianism*)

Prinsip utilitarianisme menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan benar jika tindakan tersebut menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Implikasi pada akuntansi sosial yaitu akuntansi pertanggungjawaban sosial harus mengukur dan melaporkan keseluruhan manfaat dan kerugian sosial dan lingkungan dari aktivitas organisasi, yang bertujuan untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif.

Deontologi (*Deontology*)

Prinsip deontologi menyatakan bahwa tindakan dikatakan benar jika sesuai dengan seperangkat aturan atau kewajiban, apa pun konsekuensinya. Implikasi terhadap akuntansi sosial yaitu organisasi mempunyai kewajiban untuk bertindak secara etis, yang mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam melaporkan dampak sosial dan lingkungannya. Hal ini dapat mencakup kepatuhan terhadap standar dan prinsip yang ditetapkan dalam pelaporan tanggung jawab sosial.

Demokrasi Ekonomi Liberal (*Liberal economic democracy*)

Secara sederhana, konsepsi demokrasi ekonomi liberal membayangkan dunia dengan individu-individu yang setara, bebas bertindak (liberal) dan menyatakan pilihan melalui tindakan di pasar (ekonomi) dan tindakan di arena politik (demokratis) (Gray, Adams dan Owen, 2014). Intinya adalah bahwa kebebasan individu adalah hal yang terpenting, bahwa kita semua melakukan pertukaran ekonomi dengan kemampuan dan kebebasan yang sama untuk mengekspresikan pilihan ekonomi pribadi kita. Karena kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, diasumsikan terdistribusi secara merata, maka tidak ada individu atau kelompok yang secara sistematis dapat mendominasi, atau memaksakan preferensi mereka terhadap individu atau kelompok lain. Implikasinya adalah bahwa perusahaan diharapkan terbuka mengenai kinerja keuangan serta dampak sosial dan lingkungannya. Perusahaan lebih cenderung mengadopsi praktik akuntansi tanggung jawab sosial yang komprehensif yang mencakup pelaporan rinci mengenai dampak sosial dan lingkungan, karena para pemangku kepentingan menuntut transparansi. Perusahaan di negara demokrasi liberal dapat mengadopsi praktik akuntansi sosial sebagai cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, menarik konsumen yang

sadar sosial, dan memenuhi harapan investor yang beretika. Akuntansi tanggung jawab sosial menjadi alat untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik berkelanjutan dan meningkatkan reputasi perusahaan.

Kapitalisme

Kapitalisme sebagian besar didasarkan pada kebebasan untuk mengonsumsi, memproduksi, dan memaksimalkan keuntungan (Gray, Adams dan Owen, 2014). Prinsip utamanya adalah bahwa mereka yang memiliki modal harus bebas mencari keuntungan atas modal tersebut. Modal adalah fokus utama dari sistem ini, dan keuntungan pengembalian modal adalah ukuran utama keberhasilan.

Kapitalisme memprioritaskan maksimalisasi keuntungan sebagai tujuan utama bisnis. Fokus ini terkadang bertentangan dengan tujuan tanggung jawab sosial, yang mungkin memerlukan biaya yang tidak secara langsung berkontribusi terhadap profitabilitas jangka pendek. Perusahaan yang beroperasi dalam kerangka kapitalis mungkin menghadapi ketegangan antara memaksimalkan keuntungan pemegang saham dan berinvestasi dalam inisiatif tanggung jawab sosial. Meskipun beberapa perusahaan mengintegrasikan akuntansi sosial untuk meningkatkan merek dan profitabilitas jangka panjang mereka, perusahaan lain mungkin menganggapnya sebagai masalah sekunder kecuali jika hal tersebut berdampak langsung pada keuntungan mereka.

Kapitalisme, yang didorong oleh permintaan konsumen dan persaingan, dapat menyebabkan perusahaan mengadopsi praktik tanggung jawab sosial yang didorong oleh pasar. Perusahaan mungkin menggunakan akuntansi sosial sebagai strategi untuk menarik konsumen dan investor yang sadar sosial. Akuntansi tanggung jawab sosial menjadi alat bagi perusahaan untuk membedakan dirinya di pasar. Perusahaan dapat mengadopsi praktik akuntansi pertanggungjawaban sosial

untuk meningkatkan reputasi mereka, menarik pelanggan, dan mengakses modal dari investor yang beretika. Namun, cakupan dan kedalaman praktik akuntansi sosial dapat sangat bervariasi, bergantung pada manfaat pasar yang dirasakan.

Neo-Pluralisme

Kata 'plural' dalam 'pluralisme' mengacu pada gagasan bahwa ada banyak sumber kekuasaan dan pengaruh dalam suatu masyarakat (Gray, Adams dan Owen, 2014). Seperti ilmu ekonomi neo-klasik, dan juga sebagian besar ilmu bisnis, akuntansi dan keuangan, secara implisit berasumsi bahwa kekuasaan didistribusikan secara luas di antara semua individu yaitu bahwa semua individu adalah setara. Meskipun pada prinsipnya kita berharap hal ini terjadi, namun kenyataannya tidak demikian. 'Neo-pluralisme' mengakui hal ini dan berasumsi bahwa, meskipun kekuasaan tidak terletak pada satu individu atau kelompok, misalnya negara, modal, elite penguasa, atau siapa pun, kekuasaan juga tidak terdistribusi secara merata.

Neo-pluralisme mengakui pengaruh signifikan yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar terhadap pembuatan kebijakan dan wacana publik, seringkali membentuk narasi seputar tanggung jawab sosial dengan cara yang berpihak pada kepentingan mereka. Dampak akuntansi tanggung jawab sosial dalam konteks neo-pluralis mungkin mencerminkan prioritas perusahaan-perusahaan yang berkuasa. Misalnya, laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial mungkin menekankan pada filantropi perusahaan atau inisiatif lingkungan hidup yang terlihat jelas dan dapat diterima publik, namun mengabaikan isu-isu yang lebih kontroversial seperti hak-hak buruh atau kesenjangan pendapatan. Hal ini dapat menyebabkan gambaran dampak sosial dan lingkungan perusahaan yang tidak tepat.

Neo-pluralisme memberikan pemahaman yang berbeda tentang dinamika kekuasaan yang mempengaruhi akuntansi tanggung jawab sosial. Meskipun akuntansi sosial dapat menjadi

alat yang berharga untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, efektivitasnya sering kali ditentukan oleh kekuatan relatif dari berbagai pemangku kepentingan dan lembaga yang memediasi interaksi mereka. Dalam konteks neo-pluralis, praktik akuntansi sosial mungkin mencerminkan kepentingan pelaku korporasi yang dominan, namun ada juga potensi bagi kelompok advokasi, badan pengatur, dan pusat kekuasaan baru untuk mendorong akuntansi tanggung jawab sosial yang lebih bermakna dan komprehensif.

Demokrasi

Demokrasi mempunyai pengaruh besar terhadap akuntansi tanggung jawab sosial, sehingga mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, praktik etika, keterlibatan pemangku kepentingan, dan keadilan sosial. Dalam masyarakat demokratis, akuntansi pertanggungjawaban sosial bukan hanya alat pelaporan perusahaan namun merupakan cerminan komitmen perusahaan terhadap kebaikan masyarakat yang lebih luas. Perusahaan diharapkan untuk melampaui kinerja keuangan dan menunjukkan bagaimana mereka berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, beroperasi secara etis, dan terlibat dengan pemangku kepentingan dengan cara yang bermakna. Tantangan bagi dunia usaha adalah memastikan bahwa praktik akuntansi pertanggungjawaban sosial mereka asli, komprehensif, dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi di masyarakat tempat mereka beroperasi.

Masyarakat demokratis sering kali memprioritaskan perilaku etis dan perlindungan hak, serta mengharapkan lembaga-lembaga beroperasi dalam kerangka keadilan dan keadilan. Dalam negara demokrasi, akuntansi tanggung jawab sosial kemungkinan besar akan mencakup fokus yang kuat pada praktik etika, seperti standar ketenagakerjaan yang adil, hak asasi manusia, dan langkah-langkah anti korupsi. Perusahaan dapat melaporkan upaya mereka untuk memastikan upah yang

adil, kondisi kerja yang aman, dan praktik rantai pasokan yang etis. Akuntansi pertanggungjawaban sosial menjadi cara untuk menunjukkan komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan beretika.

Virtue Ethics

Prinsip etika Kebajikan yaitu perbuatan dikatakan benar jika sejalan dengan karakter yang baik, seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Implikasi akuntansi dari prinsip ini yaitu Akuntansi pertanggungjawaban sosial harus mencerminkan komitmen organisasi terhadap perilaku etis dan integritas. Pelaporan harus jujur dan transparan, menumbuhkan kepercayaan dan menunjukkan komitmen organisasi terhadap nilai-nilai etika.

Etika kebajikan menekankan pengembangan karakter moral dan integritas baik pada individu maupun organisasi. Pemimpin dan manajer diharapkan mewujudkan kebajikan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Praktik akuntansi tanggung jawab sosial akan mencerminkan integritas moral organisasi. Perusahaan yang dipandu oleh etika kebajikan cenderung transparan dalam pelaporannya, dengan jujur mengungkapkan keberhasilan dan kekurangannya dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial menjadi ekspresi komitmen perusahaan terhadap kepemimpinan etis dan integritas, bukan sekedar alat kepatuhan atau pemasaran.

Etika kebajikan membawa perspektif unik terhadap akuntansi tanggung jawab sosial dengan berfokus pada karakter moral dan kebajikan individu dan organisasi. Praktik akuntansi pertanggungjawaban sosial yang dipengaruhi oleh etika kebajikan cenderung menekankan keaslian, integritas, keadilan, dan pendekatan holistik terhadap tanggung jawab perusahaan. Praktik-praktik ini bukan hanya tentang kepatuhan atau pengelolaan citra, namun tentang upaya yang sungguh-sungguh

untuk menjadi baik dalam semua aspek operasi bisnis. Dalam kerangka etika kebajikan, akuntansi tanggung jawab sosial menjadi cerminan komitmen mendalam perusahaan terhadap keunggulan etika, baik dalam organisasi maupun dalam interaksinya dengan masyarakat luas.

3.3 Teori Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Teori akuntansi pertanggungjawaban sosial memberikan kerangka kerja untuk memahami mengapa dan bagaimana organisasi harus memperhitungkan dampak sosial dan lingkungannya. Berikut beberapa teori kunci akuntansi pertanggungjawaban sosial.

1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*):

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Hal ini mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, dan lingkungan. Ide utama dari teori pemangku kepentingan adalah bahwa bisnis harus menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan (Dmytriiev, Freeman dan Hörisch, 2021). Kepentingan pemegang saham tidak boleh didahulukan dibandingkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Akibatnya, dalam teori pemangku kepentingan, salah satu tugas inti manajer adalah menghasilkan keuntungan bersama bagi berbagai pemangku kepentingan (Dmytriiev, Freeman dan Hörisch, 2021). Implikasi terhadap akuntansi tanggung jawab sosial yaitu organisasi harus memberikan informasi yang relevan bagi seluruh pemangku kepentingan, yang mencerminkan dampak organisasi terhadap setiap kelompok.

2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*):

Teori ini merujuk pada organisasi berusaha untuk beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat mereka. Jika aktivitas mereka dianggap sah, mereka memperoleh penerimaan dan dukungan masyarakat. Para pendukung teori legitimasi menyatakan bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, sebuah perusahaan (melalui manajemen) menyediakan informasi CSR sebagai bagian dari dialognya dengan masyarakat (Gray, Kouhy dan Lavers, 1995). Bahkan jika sebuah perusahaan mematuhi harapan masyarakat, legitimasinya dapat terancam jika gagal membuat pengungkapan yang secara meyakinkan menunjukkan kepatuhan. Oleh karena itu, manajer perlu menunjukkan bahwa mereka mematuhi kontrak sosial dengan mengungkapkan informasi sesuai dengan harapan masyarakat (Lanis dan Richardson, 2013). Implikasi terhadap akuntansi pertanggungjawaban sosial yaitu perusahaan menggunakan pelaporan sosial dan lingkungan untuk menunjukkan legitimasi dan keselarasan mereka dengan nilai-nilai dan harapan masyarakat.

3. Teori Institusional (*Institutional Theory*):

Teori organisasi mematuhi aturan dan norma lingkungan kelembagaan di mana mereka beroperasi. Hal ini mencakup persyaratan hukum, standar industri, dan ekspektasi budaya. Teori kelembagaan memberikan lensa yang kuat untuk memahami dan menjelaskan bagaimana dan mengapa akuntansi pertanggungjawaban sosial mempunyai bentuk yang berbeda di berbagai negara (Brammer, Jackson dan Matten, 2012). Akuntansi tanggung jawab sosial berkembang sebagai respons terhadap tekanan institusional, seperti persyaratan peraturan dan tolok ukur industri.

4. Teori Agensi (*Agency Theory*):

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik/pemegang saham) dan agen (manajer) suatu organisasi. Manajer mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemilik. Menurut teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1979), dewan mewakili mekanisme pengendalian yang berguna untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham baik dalam kaitannya dengan informasi keuangan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial yang transparan dapat membantu menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham dengan membuat manajer bertanggung jawab atas kinerja sosial dan lingkungan.

Manajer mungkin terlibat dalam aktivitas atau pelaporan tanggung jawab sosial bukan karena hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai pemegang saham, namun karena hal tersebut meningkatkan reputasi manajer atau mencapai keuntungan jangka pendek. Misalnya saja, para manajer mungkin terlalu menekankan aktivitas CSR yang mendapat perhatian positif dari media, namun tidak melaporkan area dimana perusahaan menghadapi tantangan sosial dan lingkungan.

Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme membangun kepercayaan antara manajemen dan pemegang saham. Praktik akuntansi pertanggungjawaban sosial yang transparan dan jujur dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan mengurangi kebutuhan akan pengawasan intensif, karena pemegang saham merasa lebih yakin bahwa manajemen bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dalam jangka panjang.

5. Teori Ketergantungan Sumber Daya (*Resource Dependence Theory*):

Teori ketergantungan sumber daya mencoba menjelaskan pengaruh kendala lingkungan terhadap organisasi (Chen dan Roberts, 2010). Organisasi bergantung pada sumber daya eksternal dan harus mengelola hubungan dengan pihak yang mengendalikan sumber daya tersebut. Karena organisasi tidak mandiri atau mandiri, organisasi bergantung pada lingkungannya untuk bertahan hidup, dan inti teori ini berfokus pada bagaimana organisasi memperoleh akses terhadap sumber daya penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan (Chen dan Roberts, 2010). Pelaporan tanggung jawab sosial dapat digunakan untuk mengelola dan meningkatkan hubungan dengan penyedia sumber daya utama, seperti investor, pelanggan, dan regulator. Organisasi mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menegosiasikan posisi mereka dalam batasan tersebut melalui berbagai taktik.

6. *Triple Bottom Line (TBL) Theory*:

Konsep *Triple Bottom Line* oleh Elkington (1997) terdiri dari tiga elemen untuk mendukung bisnis berkelanjutan: keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi. Keberhasilan organisasi harus diukur tidak hanya dari kinerja finansial, namun juga dari kinerja sosial dan lingkungan. Sistem akuntansi harus memasukkan metrik dampak sosial dan lingkungan, bersama dengan metrik keuangan tradisional. Teori *Triple Bottom Line* mengubah cara perusahaan melaporkan dan menilai kinerja mereka, memastikan bahwa ketiga dimensi tersebut diperhitungkan secara seimbang.

Perusahaan akan memberikan pengungkapan rinci mengenai kontribusi sosial mereka, seperti kesejahteraan karyawan, keterlibatan masyarakat, dan praktik hak asasi

manusia, serta praktik lingkungan mereka, termasuk penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, dan emisi karbon. Pelaporan komprehensif ini membantu pemangku kepentingan mengevaluasi dampak keseluruhan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta keberhasilan finansialnya.

7. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract Theory*):

Teori Kontrak Sosial berpendapat bahwa organisasi dan masyarakat memiliki perjanjian implisit di mana bisnis diberikan hak untuk beroperasi sebagai imbalan atas perilaku yang bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini menekankan bahwa dunia usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif dan meminimalkan kerugian terhadap tatanan sosial dan lingkungan masyarakat di mana mereka beroperasi. Akuntansi tanggung jawab sosial, dalam kerangka ini, menjadi alat bagi bisnis untuk menunjukkan bagaimana mereka memenuhi bagian mereka dalam kontrak sosial.

Dengan menerapkan teori-teori ini, organisasi dapat mengembangkan praktik akuntansi tanggung jawab sosial yang lebih komprehensif dan bermakna, sehingga menghasilkan transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan yang lebih besar.

3.4 Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial: Praktik

Praktik akuntansi tanggung jawab sosial melibatkan serangkaian aktivitas dan proses yang dirancang untuk mengukur, melaporkan, dan meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan organisasi. Praktik-praktik ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan komprehensif

kepada pemangku kepentingan mengenai dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah beberapa praktik utama akuntansi tanggung jawab sosial.

1. Laporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility (CSR) Reports*):

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah tentang memastikan bahwa suatu bisnis beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan melakukannya 'melampaui persyaratan sempit ekonomi, teknis, dan hukum perusahaan' (Davis, 1973) dalam mengejar 'beberapa kebaikan sosial, di luar kepentingan perusahaan'. Matten dan Moon (2008) menjelaskan bahwa CSR eksplisit mengacu pada aktivitas perusahaan sukarela yang biasanya dimotivasi oleh kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda dan bertujuan untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat luas. Jenis CSR ini paling umum terjadi di ekonomi pasar liberal. Dalam perekonomian pasar yang lebih terkoordinasi dimana aktivitas CSR tercermin dalam aktivitas wajib atau setidaknya terkodifikasi berdasarkan konsensus masyarakat bahwa perusahaan diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat luas, CSR implisitlah yang berlaku (Matten dan Moon, 2008).

Laporan CSR menyajikan informasi tentang kegiatan CSR organisasi dan hasilnya. Mencakup inisiatif terkait pengembangan masyarakat, filantropi, kesejahteraan karyawan, dan praktik berkelanjutan. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pelaporan untuk memastikan relevansi dan akurasi. Perusahaan dapat menggunakan laporan CSR untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kontrak sosial, menguraikan kontribusi mereka terhadap tujuan sosial dan lingkungan.

2. Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*):

Pelaporan Keberlanjutan merupakan praktik pengungkapan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi suatu organisasi. Standar dan Kerangka Kerja: Memanfaatkan kerangka kerja seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), dan *Integrated Reporting* (IR) untuk memandu pelaporan. Laporan biasanya mencakup informasi tentang emisi karbon, penggunaan energi, pengelolaan limbah, praktik ketenagakerjaan, keterlibatan masyarakat, dan kontribusi ekonomi. Penerapan dan pelaporan inisiatif keberlanjutan menunjukkan bagaimana dunia usaha memenuhi kewajiban sosial mereka, seperti mengurangi jejak karbon, mendorong praktik ketenagakerjaan yang adil, dan mendukung pengembangan masyarakat.

3. Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*):

Akuntansi lingkungan melacak dan melaporkan biaya dan manfaat lingkungan yang terkait dengan aktivitas organisasi. Sistem akuntansi lingkungan hidup yang baru perlu mengukur, mencatat dan mengungkapkan seluruh dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh perusahaan (Jones, 2010). Hal ini mencakup, antara lain, mengukur konsumsi sumber daya (misalnya air, energi), emisi (misalnya gas rumah kaca), dan produksi limbah. Alat yang dapat digunakan yaitu antara lain *Life cycle assessment* (LCA), akuntansi biaya lingkungan, dan analisis jejak karbon. Ada tiga pendekatan konseptual: basis biaya kerusakan, basis penghindaran, dan basis restoratif (Jones, 2010). Bagian pertama memperhitungkan kerusakan yang disebabkan oleh dampak; yang kedua, mempertimbangkan biaya untuk mengambil tindakan preventif untuk mencegah degradasi lingkungan; dan yang ketiga, biaya pemulihan lingkungan ke kondisi sebelum dampak perusahaan juga diperhitungkan.

4. Pelaporan Terintegrasi (*Integrated Reporting* (IR))

Pelaporan terintegrasi (IR) adalah pendekatan holistik terhadap pelaporan perusahaan yang mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan. Pelaporan terintegrasi mewakili batas akhir pelaporan perusahaan dan dihadapkan pada tujuan penting untuk meningkatkan efisiensi informasi yang diungkapkan, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik (Vitolla, Raimo dan Rubino, 2020). Dengan menunjukkan keterkaitan yang ada antara informasi non-keuangan dan keuangan, dan di antara enam modal berbeda yang dikandungnya, pelaporan terintegrasi menekankan orientasi ke masa depan, keringkasan, dan fokus strategis. Pelaporan terintegrasi dipandu oleh kerangka kerja *International Integrated Reporting Council* (IIRC). Manfaat pelaporan terintegrasi yaitu memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana organisasi menciptakan nilai dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan faktor keuangan, sosial, dan lingkungan.

5. Audit Sosial (*Social Audits*):

Audit sosial dapat didefinisikan secara luas sebagai cara menganalisis, mengukur, dan melaporkan kinerja sosial dan etika suatu organisasi dengan meneliti aktivitas non-keuangan yang, secara langsung atau tidak langsung, berdampak pada pemangku kepentingan (Rahim dan Vicario, 2015). Audit sosial dipandang sebagai sarana jaminan yang diandalkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa perusahaan mengumpulkan data sosial dan lingkungan dan mengungkapkannya dengan cara yang memuaskan. Audit sosial memfasilitasi mekanisme kontrol dan pemantauan yang transparan terhadap masing-masing perusahaan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan berdasarkan standar atau ekspektasi tertentu, yang pada akhirnya

mengambil peran sebagai instrumen akuntabilitas sosial bagi suatu organisasi seperti halnya audit keuangan (Rahim dan Vicario, 2015).

Audit sosial memberikan informasi dan wawasan berharga bagi perusahaan, dan pada gilirannya, mengarah pada penilaian diri yang lebih baik dan penetapan kekuatan dan kekurangan yang ada dalam strategi perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan sosial. Pengetahuan tersebut, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan perbaikan yang mengarah pada kinerja sosial yang lebih efisien, yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan citra perusahaan.

6. Akuntansi Karbon (Carbon Accounting):

Akuntansi karbon mengukur dan melaporkan emisi karbon organisasi, mencakup emisi langsung (Cakupan 1), emisi tidak langsung dari energi yang dibeli (Cakupan 2), dan emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3). Alat: *Greenhouse Gas* (GRK) *Protocol*, kalkulator jejak karbon, dan perangkat lunak pelacakan emisi. Ketika penghitungan karbon gagal memberikan informasi yang cukup sebanding mengenai emisi, dampak dan respons perusahaan sehingga memungkinkan investor mengambil keputusan yang tepat, gagal memberikan insentif kepada negara-negara tropis untuk mengurangi deforestasi, atau menghalangi investasi dalam penangkapan dan penyimpanan karbon biomassa karena gagal mengenali dan memberi ganjaran terhadap emisi negatif, maka masyarakat secara keseluruhan akan kehilangan nilai dan peluang yang berharga menghindari atau mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

7. *Triple Bottom Line (TBL) Reporting:*

Pelaporan *Triple Bottom Line* (TBL) merupakan pendekatan komprehensif untuk mencapai keberlanjutan karena mengintegrasikan pelaporan mengenai isu lingkungan, sosial dan keuangan (Assaf, Josiassen dan Cvelbar, 2012). Pergeseran ke arah pelaporan sosial, lingkungan, dan keuangan dengan demikian berkaitan dengan kebutuhan perusahaan untuk menghasilkan kesejahteraan ekonomi (*profit*), sekaligus peduli terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) (Assaf, Josiassen dan Cvelbar, 2012). Tujuan pelaporan ini yaitu memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dan dampak organisasi. Manfaat potensial yang dapat diperoleh perusahaan dari pelaporan TBL dapat diklasifikasikan ke dalam lima hal: pengendalian biaya dan penghematan operasional; branding dan kesadaran pasar yang lebih kuat, serta hubungan yang lebih dekat dengan pemangku kepentingan dan masyarakat (Dwyer, 2005). Implementasi pelaporan TBL yaitu mengintegrasikan metrik keuangan, sosial, dan lingkungan ke dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.

8. *Penilaian Dampak (Impact Assessment):*

Penilaian dampak adalah elemen penting dalam akuntansi tanggung jawab sosial, yang memungkinkan perusahaan mengevaluasi dan mengkomunikasikan secara sistematis dampak operasi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Penilaian dampak melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang signifikan yang diakibatkan oleh operasi perusahaan. Hal ini mencakup dampak positif dan negatif, dampak langsung dan tidak langsung, serta akibat jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa jenis penilaian dampak antara lain *Environmental Impact Assessments* (EIA), *Social Impact Assessments* (SIA), and *Health Impact*

Assessments (HIA). Penerapan penilaian dampak digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan hasil positif.

Dengan memasukkan evaluasi yang komprehensif, keterlibatan pemangku kepentingan, materialitas, dan transparansi ke dalam praktik akuntansi pertanggungjawaban sosial mereka, perusahaan dapat menyelaraskan strategi bisnis mereka dengan harapan masyarakat dan menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik yang beretika dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas perusahaan namun juga menumbuhkan kepercayaan dan mendukung kesuksesan jangka panjang dalam pasar yang sadar sosial dan lingkungan. Perusahaan menggunakan penilaian dampak untuk memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana aktivitas mereka mempengaruhi berbagai aspek masyarakat dan lingkungan. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur mungkin menilai dampak proses produksinya terhadap kualitas air setempat, polusi udara, dan kesehatan masyarakat, serta kontribusi ekonominya melalui penciptaan lapangan kerja dan pengadaan sumber daya lokal.

Dengan menerapkan praktik akuntansi tanggung jawab sosial ini, organisasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keberlanjutan mereka secara keseluruhan. Praktik-praktik ini membantu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi organisasi, dan berkontribusi terhadap kesuksesan dan ketahanan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Assaf, A.G., Josiassen, A. and Cvelbar, L.K. (2012) 'Does Triple Bottom Line reporting improve hotel performance?', *International Journal of Hospitality Management*, 31(2), pp. 596–600. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.08.005>.
- Brammer, S., Jackson, G. and Matten, D. (2012) 'Corporate social responsibility and institutional theory: New perspectives on private governance', *Socio-Economic Review*, 10(1), pp. 3–28. Available at: <https://doi.org/10.1093/ser/mwr030>.
- Chen, J.C. and Roberts, R.W. (2010) 'Toward a More Coherent Understanding of the Organization-Society Relationship: A Theoretical Consideration for Social and Environmental Accounting Research', *Journal of Business Ethics*, 97(4), pp. 651–665. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0531-0>.
- Davis, K. (1973) 'The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities', *The Academy of Management Journal*, 16(2), pp. 312–322.
- Dmytriiev, S.D., Freeman, R.E. and Hörisch, J. (2021) 'The Relationship between Stakeholder Theory and Corporate Social Responsibility: Differences, Similarities, and Implications for Social Issues in Management', *Journal of Management Studies*, 58(6), pp. 1441–1470. Available at: <https://doi.org/10.1111/joms.12684>.
- Dwyer, L. (2005) 'Relevance of Triple Bottom Line Reporting to Achievement of Sustainable Tourism: A Scoping Study', *Tourism Review International*, 9, pp. 79–93. Available at: www.cognizantcommunication.com.
- Elkington, J. (1997) *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.

- Gray, R. (2000) 'Current Developments and Trends in Social and Environmental Auditing, Reporting and Attestation: A Review and Comment', *International Journal of Auditing Int. J. Audit*, 4, pp. 247–268.
- Gray, R., Adams, C.A. and Owen, D. (2014) *Accountability, Social Responsibility and Sustainability: Accounting for Society and the Environment*. London: Pearson Education Limited.
- Gray, R., Kouhy, R. and Lavers, S. (1995) 'Corporate social and environmental reporting A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure', *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), pp. 47–77.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1979) 'Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure', *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp. 305–360.
- Jones, M.J. (2010) 'Accounting for the environment: Towards a theoretical perspective for environmental accounting and reporting', *Accounting Forum*, 34(2), pp. 123–138. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2010.03.001>.
- Lanis, R. and Richardson, G. (2013) 'Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory', *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), pp. 75–100. Available at: <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>.
- Matten, D. and Moon, J. (2008) "'Implicit" and "Explicit" CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility', *The Academy of Management Review*, 33(2), pp. 404–424.

- Rahim, M.M. and Vicario, V. (2015) 'Social Audit: A Mess or Means in CSR Assessment?', in *CSR, Sustainability, Ethics and Governance*. Springer Nature, pp. 1–13. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319-15838-9_1.
- Vitolla, F., Raimo, N. and Rubino, M. (2020) 'Board characteristics and integrated reporting quality: an agency theory perspective', *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(2), pp. 1152–1163. Available at: <https://doi.org/10.1002/csr.1879>.

BAB 4

AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN

Oleh Diamond Limbong

4.1 Pendahuluan

Perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki peluang untuk berinovasi guna memenuhi kebutuhan pelanggan seiring dengan berkembangnya operasional perusahaan. Tentu saja, perusahaan dapat meraih keuntungan yang signifikan jika mampu memenuhi keinginan serta ekspektasi pelanggan. Dalam industri ini, kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi permintaan sekaligus memberikan dampak negatif terhadap lingkungan tidak berkorelasi dengan kemampuannya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Limbah dari aktivitas perusahaan semakin hari kian berdampak pada kerusakan lingkungan, hal tersebut menimbulkan munculnya permasalahan kesehatan disebabkan oleh limbah sehingga dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar perusahaan. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan situasi ini dan memperkuat aturan terkait kelestarian lingkungan. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa dengan mudah melepaskan tanggung jawab sosialnya sebagai pelaku usaha. Artinya, selain mempertimbangkan kepentingan finansial, perusahaan juga perlu mengintegrasikan akuntansi manajemen yang berkaitan dengan pengawasan lingkungan.

Beberapa aspek lingkungan yang mendasari pentingnya perusahaan mengintegrasikan prosedur pertanggungjawaban sosial dan lingkungan melalui akuntansi manajemen lingkungan.

1. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang mana dewasa ini telah menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan mendesak. Ekosistem alami yang semakin rusak akibat aktivitas manusia seperti meningkatnya sampah plastik, deforestasi, serta polusi udara, air, dan tanah. Dalam hal ini, perusahaan sebagai salah satu kontributor utama penyebab kerusakan lingkungan harus lebih peduli terhadap dampak lingkungan hidup. Perusahaan dapat mengukur, mengevaluasi, serta mengelola dampak lingkungannya secara efisien dengan sistem akuntansi manajemen lingkungan yang membantu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
2. Regulasi peduli lingkungan yang semakin berkembang secara global membuat pemerintah serta lembaga-lembaga yang berwenang turut mengimplementasikan aturan terhadap perusahaan agar menyajikan laporan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan berperan membantu perusahaan mengelola sistem pelaporan yang diharapkan, menganalisis kepatuhan, serta menjamin aktivitas operasi berjalan sesuai standar atau batas-batas yang tepat berdasarkan aturan.
3. Tekanan dari pemangku kepentingan menuntut manajemen perusahaan agar lebih cenderung menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor dan masyarakat menuntut transparansi terkait penyajian laporan dampak lingkungan, sedangkan pelanggan lebih memilih produk ataupun jasa yang sifatnya sustainable. Dalam hal ini, diperlukan peran akuntansi manajemen lingkungan untuk membantu manajemen perusahaan membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan dan mengidentifikasi peluang bisnis baru yang sustainable.

4. Reputasi perusahaan dan integritas merek menjadi semakin bergantung pada tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Skandal yang melibatkan lingkungan, termasuk tumpahan minyak dan kontaminasi air dapat merusak reputasi perusahaan dan berdampak negatif bagi perusahaan. Prosedur akuntansi manajemen lingkungan yang baik akan membantu perusahaan menurunkan risiko reputasi dan meningkatkan hubungannya dengan pelanggan dan masyarakat. Kasus pencemaran sungai Citarum oleh limbah tekstil CV. Sandang Sari di Bandung diakibatkan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tidak optimal sehingga buangan air limbah melebihi standar baku mutu tentunya berdampak bagi reputasi negatif perusahaan.

4.2 Definisi Akuntansi Manajemen Lingkungan

(International Federation of Accountants (IFAC), 2005) mendefinisikan *Environment Management Accounting* (EMA):

"the management of environmental and economic performance through the development and implementation of appropriate environment-related accounting systems and practices. While this may include reporting and auditing in some companies, environmental management accounting typically involves life-cycle costing, full-cost accounting, benefits assessment, and strategic planning for environmental management".

Pada hakikatnya Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML) merupakan pengembangan dari akuntansi manajemen tradisional yang lebih menitikberatkan pada permasalahan lingkungan hidup serta memperhitungkan aliran data dan informasi secara fisik yang bersifat internal organisasi maupun yang berkaitan dengan integrasi masalah ekologis dan moneter. Proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengevaluasi informasi mengenai biaya dan kinerja lingkungan

untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi dikenal sebagai akuntansi manajemen lingkungan. Bentuk informasi dari akuntansi manajemen lingkungan antara lain:

1. Informasi fisik atau *Physical Environmental Management Accounting* (PEMA) merupakan pendekatan yang menekankan pada pengukuran serta pengelolaan karakteristik fisik lingkungan seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi, air, emisi gas rumah kaca, dan sebagainya yang berkaitan langsung terhadap dampak aktivitas perusahaan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang ciri-ciri fisik lingkungan dapat membantu perusahaan menemukan cara untuk mengurangi limbah, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan emisi berbahaya. Pengukuran dan pelaporan merupakan sebuah langkah penting untuk memantau kinerja lingkungan suatu perusahaan sehingga penerapan *environment management accounting* dapat terlaksana dengan baik. Hasilnya, manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih bijaksana karena memiliki akses terhadap data mengenai dampak lingkungan dari aktivitasnya.
2. Informasi moneter atau *Monetary Environmental Management Accounting* (MEMA) merupakan pendekatan yang menekankan pada informasi moneter yang berfokus pada pengukuran dan evaluasi dampak lingkungan menggunakan nilai moneter. Pendekatan ini mengukur manfaat dan biaya yang timbul untuk mencegah dampak lingkungan seperti investasi teknologi ramah lingkungan, inovasi produk daur ulang, serta biaya pengendalian lingkungan yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan, seperti biaya pengelolaan limbah, polusi udara, air, tanah dan sebagainya. Dengan pendekatan MEMA perusahaan dapat menilai secara lebih tepat implikasi finansial dari keputusan lingkungan hidup yang diambil dan keberhasilan inisiatif perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan menggunakan data moneter.

4.3 Peranan Akuntansi Manajemen Lingkungan terhadap Pengambilan Keputusan Internal

Akuntansi manajemen lingkungan tidak hanya memantau dampak operasional perusahaan bagi lingkungan, lebih daripada itu akuntansi manajemen lingkungan juga mengintegrasikan informasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan internal sehingga tercapai keseimbangan antara tujuan ekonomi dengan lingkungan organisasi. Pengambilan keputusan internal perusahaan dengan pertimbangan kegiatan manajemen lingkungan antara lain:

a. Efisiensi energi terhadap biaya operasional

Akuntansi manajemen lingkungan akan mengoptimalkan energi dan sumber daya alam dengan mempertimbangkan berbagai investasi teknologi hemat energi, mendesain ulang proses produk, pemilihan bahan baku yang lebih efisien, meningkatkan pemeliharaan dan pemantauan kinerja lingkungan, sehingga berdampak pada pengurangan biaya operasional dalam jangka panjang

b. Pengelolaan limbah

Akuntansi manajemen lingkungan akan mempertimbangkan pengelolaan limbah dengan cara mengadopsi metode proses produksi *low pollution* atau dapat mencari solusi dengan daur ulang atau memanfaatkan kembali limbahnya sebagai material yang lebih berguna. Hal tersebut bukan hanya mengurangi dampak negatif lingkungan, akan tetapi dapat menurunkan biaya untuk penanganan limbah perusahaan.

c. Citra dan merek

Aktivitas perusahaan yang bertanggungjawab terhadap lingkungannya mampu meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat branding di mata konsumen. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya dalam pengambilan keputusan internal harus mempertimbangkan persepsi

masyarakat terhadap merek melalui aksi kepedulian lingkungan seperti menggunakan produk ramah lingkungan, mendukung aktivitas peduli lingkungan, serta promosi kegiatan fokus kelestarian lingkungan

d. Risiko dan peluang usaha

Akuntansi manajemen lingkungan perlu mengidentifikasi risiko lingkungan akibat aktivitas perusahaan seperti dampak perubahan iklim, ketaatan terhadap regulasi dan tuntutan hukum. Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan internal diperlukan pertimbangan akan risiko-risiko tersebut serta mencari peluang usaha baru yang bersifat *sustainable*.

e. Penilaian biaya dan manfaat

Akuntansi manajemen lingkungan perlu mengukur biaya proyek investasi, biaya operasional tambahan serta manfaat diperoleh dari proyek melalui evaluasi indikator finansial seperti *net present value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR) dan *Payback Periods* (PBP) dan sebagainya, karena mengukur biaya dan manfaat lingkungan sangat penting untuk mengetahui tingkat profitabilitas dari proyek lingkungan tersebut.

4.4 Teknik Akuntansi Manajemen Lingkungan dalam Pengambilan Keputusan Internal

Teknik akuntansi manajemen lingkungan membahas indikator yang digunakan dalam pengambilan keputusan internal melalui pertimbangan aktivitas lingkungan perusahaan. pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi analisis biaya, investasi, dan kinerja, (Wahyuni, 2009).

a. Alat analisis biaya

Alat akuntansi manajemen lingkungan yang digunakan untuk menganalisis biaya yakni *Life Cycle Assessment (LCA)*, *Activity Based Costing (ABC)* dan *Flowcart Cost Accounting (FCA)*.

- *Life Cycle Assesment (LCA)*

Life Cycle Assesment (LCA) merupakan metode evaluasi dampak lingkungan dari suatu produk, proses, atau aktivitas sepanjang siklus hidupnya. Evaluasi dimulai sejak dari proses ekstraksi bahan baku hingga tahap pembuangan atau tahap daur ulang. Metode LCA juga mengukur besaran energi dan sumber daya yang digunakan, serta mengidentifikasi limbah yang dilepaskan dan dampak akibat pembuangan limbah tersebut. Output yang dihasilkan dalam *life cycle assesment* berupa data-data mengenai pelepasan limbah dan dampaknya sebagai acuan perusahaan dalam mencegah polusi.

- *Activity Based Costing (ABC)*

Activity Based Costing (ABC) sebagai metode penetapan pembebanan biaya berdasarkan aktivitas penggunaan sumber daya, dan mengalokasikannya pada produk/jasa sesuai aktivitas. Pada aktivitas lingkungan beberapa hal yang dipertimbangkan yakni volume limbah, kadar emisi, dampak lingkungan serta volume limbah yang diolah, serta biaya relatif perawatan berbagai jenis emisi. Informasi yang dihasilkan melalui *activity based costing* cenderung lebih akurat bukan hanya pada penetapan harga pokok produk namun termasuk biaya aktivitas pencegahan dampak lingkungan.

b. Alat analisis investasi

Akuntansi manajemen lingkungan mempertimbangkan *Total Cost Assessment (TCA)* sebagai alat untuk mengidentifikasi biaya modal serta penetapan hemat biaya melalui pencegahan polusi. Badan

perlindungan lingkungan di AS mendefinisikan bahwa *total cost assessment* merupakan alat analisis keuangan komprehensif perusahaan melalui analisis biaya dan penghematan investasi.

c. Alat analisis manajemen kinerja

Environment Balanced Scorecard (EBS) merupakan perangkat manajemen strategis yang digunakan organisasi mengukur kinerja lingkungan secara komprehensif yang berguna bagi para manajer puncak mencegah dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan serta mengimplementasikan strategi bisnis melalui *financial perspective*, *costumer perspective*, *internal business process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

4.5 Tujuan Akuntansi Manajemen Lingkungan

Kehadiran organisasi merupakan elemen penting dalam menentukan langkah strategi bisnis perusahaan. Perubahan lingkungan membutuhkan adaptasi dinamis dari individu dan organisasi agar dapat bertahan dan berinovasi dalam persaingan bisnis. Secara keseluruhan, teknik akuntansi manajemen konvensional sering kurang mempertimbangkan konsekuensi negatif perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan besar yang bersifat multinasional dan terintegrasi umumnya menggunakan Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML) untuk mengidentifikasi biaya dan proses terkait dengan bisnis, produksi, serta produk dan jasa mereka. Seringkali sistem akuntansi tradisional tidak cukup untuk mencatat biaya lingkungan dengan baik, hanya bisa mencatat biaya umum tidak langsung (Saputra, Martini and Pradnyanitasari, 2019).

Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML) dikembangkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dalam akuntansi manajemen konvensional. Beberapa alasan mengapa AML lebih unggul dibandingkan akuntansi manajemen konvensional adalah (Ikhsan, 2008):

1. Peningkatan kesadaran atas biaya lingkungan
Dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap masalah lingkungan, peraturan lingkungan menjadi lebih ketat, yang mendorong bisnis untuk lebih banyak berinvestasi dalam kepatuhan. Biaya untuk mengatur lingkungan yang dahulu kecil sekarang telah meningkat secara signifikan, mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan penanganan biaya lingkungan.
2. Keterbatasan komunikasi antar departemen:
Walaupun perusahaan memiliki visi dan misi yang sama tentang biaya-biaya, namun komunikasi diantara setiap departemen seringkali kurang efisien. Departemen keuangan juga mungkin ingin efisiensi dan biaya untuk kinerja lingkungan, namun perbedaan pandangan akan menghalangi komunikasi yang efektif.
3. Penggabungan biaya lingkungan dalam biaya overhead
Dalam akuntansi tradisional, seringkali semua biaya lingkungan seperti pengolahan limbah dan perizinan digabungkan dalam biaya overhead. Inilah yang membuat biaya overhead lebih tinggi dari yang seharusnya.
4. Ketidakpastian dalam alokasi biaya lingkungan
Karena biaya lingkungan sering tersembunyi dalam biaya umum, sulit untuk memisahkan biaya khusus dari suatu proses atau produk. Biaya limbah yang seharusnya dianggap sebagai biaya yang bisa berubah-ubah, sering kali dianggap sebagai biaya yang tetap.
5. Perhitungan biaya limbah tidak akurat
Akuntansi konvensional hanya menghitung biaya untuk mengelola limbah, sementara Akuntansi Manajemen Lingkungan menghitung total biaya limbah termasuk biaya bahan baku, sehingga total biaya limbah sebenarnya lebih tinggi dari yang dilaporkan.
6. Perhitungan biaya lingkungan tidak lengkap
Banyak biaya terkait pengelolaan lingkungan yang tidak dipertimbangkan dengan baik dalam akuntansi, seperti biaya material, energi, dan proses. Hal ini bisa mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah karena kurangnya informasi yang akurat.

4.6 Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan

Beberapa manfaat potensial dalam penerapan akuntansi manajemen lingkungan meliputi pengurangan biaya (*cost reduction*) peningkatan harga produk (*improved product pricing*) dan daya tarik sumber daya manusia (*attraction of human resources*) dan reputasi. Menurut (Umweltbundesamt, 2003) manfaat akuntansi manajemen lingkungan.

1. Kepatuhan

Akuntansi manajemen lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengenali dan mengurus biaya terkait dampak lingkungan dengan lebih efektif. Sistem ini tidak hanya memenuhi peraturan lingkungan pemerintah, tetapi juga membantu perusahaan menerapkan kebijakan keberlanjutan internal yang lebih ketat. Ini membantu perusahaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan sambil tetap mempertahankan kinerja finansial yang optimal.

2. Eco-efficiency

Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan memungkinkan perusahaan untuk secara teratur mengawasi dan memeriksa penggunaan sumber daya energi, air, dan material dengan lebih efektif. Contohnya, dengan memperbaiki proses produksi dan mengurangi pemborosan, perusahaan tidak hanya mengurangi biaya operasional tetapi juga jejak lingkungan. AML juga membantu dalam menentukan penggunaan sumber daya untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan.

3. AML bagi pemerintah

Menerapkan Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML) oleh perusahaan memberikan sejumlah manfaat penting bagi pemerintah. Awalnya, dengan industri yang lebih mendukung pelaksanaan program AML demi keuntungan finansial, pemerintah bisa mengurangi beban terkait kelestarian lingkungan dan tekanan politik. Kedua, AML meningkatkan efisiensi kebijakan dan peraturan pemerintah dengan memberikan informasi yang jelas tentang biaya dan

manfaat lingkungan dari kebijakannya. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan data AML untuk mengevaluasi kinerja lingkungan dan keuangan industri. Data AML juga memberikan dukungan kepada keputusan pemerintah terkait anggaran, pembelian, dan manajemen lingkungan di daerah.

4. AML bagi masyarakat

Penggunaan akuntansi manajemen lingkungan membantu industri dalam memanfaatkan sumber daya alam seperti energi dan air dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Di samping itu, penerapan AML menurunkan biaya terkait emisi dan dampak lingkungan, serta mengurangi biaya polusi bagi masyarakat, termasuk biaya pemantauan, kontrol, perbaikan, dan kesehatan masyarakat. AML juga memberikan data penting untuk meningkatkan pembuatan keputusan publik dan mengevaluasi kinerja lingkungan serta situasi ekonomi dan geografis.

4.7 Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan merupakan keseluruhan biaya baik secara langsung maupun tidak langsung yang terjadi akibat operasi perusahaan guna mencegah kerusakan lingkungan atau pengendalian dan penanggulangan lingkungan akibat dari aktivitas tersebut. Biaya lingkungan dapat berupa pengorbanan finansial maupun non finansial yang dikeluarkan perusahaan demi menjaga kestabilan lingkungan. Tujuan penting diukur biaya lingkungan agar memudahkan manajemen mengendalikan biaya serta mengoptimalkan pendapatan dan kinerja lingkungannya. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat yakni (IAI, 2015):

1. Biaya Pencegahan

Biaya pencegahan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi potensi dampak negatif terhadap lingkungan sebelum terjadi. Ini termasuk investasi

dalam teknologi ramah lingkungan, pelatihan karyawan mengenai praktik lingkungan yang baik, dan penerapan sistem manajemen lingkungan. Contohnya adalah biaya untuk memperbaiki peralatan produksi agar lebih efisien dalam penggunaan energi atau biaya untuk mengembangkan proses yang mengurangi limbah

2. Biaya Deteksi

Biaya deteksi mencakup pengeluaran yang diperlukan untuk memantau dan mengidentifikasi masalah lingkungan yang mungkin timbul selama proses operasional. Ini termasuk biaya untuk pemantauan emisi, pengujian kualitas udara dan air, serta audit lingkungan. Biaya deteksi penting untuk memastikan bahwa potensi masalah lingkungan terdeteksi secara dini sebelum menjadi lebih serius atau memerlukan tindakan perbaikan yang lebih mahal.

3. Biaya Kegagalan Internal

Biaya kegagalan internal merujuk pada pengeluaran yang timbul akibat ketidakmampuan organisasi dalam mengelola dampak lingkungan di dalam operasi mereka sendiri. Ini termasuk biaya yang terkait dengan kerusakan peralatan akibat kegagalan dalam pemeliharaan lingkungan, pengelolaan limbah yang tidak memadai, atau biaya perbaikan atas kesalahan dalam proses produksi yang menyebabkan pencemaran. Contoh biaya ini adalah biaya perbaikan sistem pengendalian polusi yang rusak atau biaya untuk menangani insiden tumpahan limbah

4. Biaya Kegagalan Eksternal

Biaya kegagalan eksternal adalah pengeluaran yang terkait dengan dampak lingkungan yang mempengaruhi pihak luar atau masyarakat di luar organisasi. Ini mencakup biaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan, seperti biaya pembersihan tumpahan minyak atau biaya kompensasi kepada komunitas yang terkena dampak polusi. Biaya ini juga mencakup potensi denda atau sanksi dari regulasi lingkungan yang dilanggar, serta biaya terkait dengan pengelolaan reputasi perusahaan setelah terjadinya insiden lingkungan.

Strategi yang dapat digunakan untuk mengatur biaya lingkungan diklasifikasikan menjadi 3 strategi utama yakni (Saputra, Martini and Pradnyanitasari, 2019):

1. *End of Pipe Strategy* merupakan pendekatan yang mengatasi dampak lingkungan setelah masalah terjadi, yaitu pada ujung saluran dari proses produksi. Strategi ini melibatkan penerapan teknologi atau sistem untuk mengelola, mengurangi, atau menghilangkan polusi dan limbah yang dihasilkan dari proses produksi setelah mereka keluar dari sumbernya. Contoh dari strategi ini termasuk instalasi sistem pengolahan limbah, filter emisi, atau unit pemurnian air. Meskipun strategi ini dapat mengurangi dampak lingkungan, namun kurang efisien karena mengatasi masalah hanya setelah dampak terjadi, dan tidak mengurangi sumber masalah itu sendiri.
2. *Process Improvement Strategy* berfokus pada perbaikan dan optimalisasi proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan secara lebih efektif. Pendekatan ini melibatkan evaluasi dan modifikasi proses operasional untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan meminimalkan limbah serta emisi sejak awal. Contoh penggunaan teknologi yang lebih bersih, pengurangan konsumsi energi dan bahan baku, serta peningkatan sistem manajemen limbah. Dengan meningkatkan proses internal, perusahaan dapat mengurangi biaya lingkungan dan dampak negatif tanpa harus mengandalkan metode pengolahan setelah polusi terjadi.
3. *Prevention Strategy* merupakan pendekatan yang mencegah terjadinya dampak lingkungan sebelum masalah muncul yang melibatkan perubahan dalam desain produk, proses, atau sistem untuk menghindari penciptaan limbah dan polusi dari awal. Contohnya desain produk ramah lingkungan, penggunaan bahan baku yang lebih bersih, dan perancangan proses produksi minim limbah dan emisi. Dengan fokus pada pencegahan, perusahaan tidak hanya mengurangi biaya lingkungan tetapi juga meningkatkan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- IAI (2015) *Modul CA Akuntansi Manajemen Lanjutan*. Jakarta: IAI.
- Ikhsan (2008) *Akuntansi Manajemen Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- International Federation of Accountants (IFAC) (2005) *International Guidance Document: Environmental Management Accounting*. New York, USA.
- Saputra, K.A.K., Martini, N.P.R. and Pradnyanitasari, P.D. (2019) *Akuntansi Sosial dan Lingkungan*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Umweltbundesamt (2003) 'Guide to Corporate Environment Cost Management'.
- Wahyuni, D. (2009) 'Environmental Management Accounting: Techniques And Benefits', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 7(1).

BAB 5

PELAPORAN BERKELANJUTAN: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Oleh Annisa Nabila Hasan

5.1 Laporan Keberlanjutan

Aktivitas operasi dan hubungan bisnis sebuah perusahaan dengan entitas lainnya memberikan dampak terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Menurut Elkington (1994), dalam menjalankan aktivitas operasinya, perusahaan perlu berfokus kepada tiga aspek secara seimbang, yaitu *people* (masyarakat), *planet* (lingkungan), dan *profit* (ekonomi). Konsep tersebut dikenal sebagai *triple bottom lines*. Melalui aktivitas operasi dan hubungan bisnisnya, sebuah perusahaan juga berkontribusi terhadap *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif perlu dikelola agar memberikan manfaat yang luas sementara dampak negatif perlu dimitigasi. Menurut *the World Commission on Environment and Development* (1987), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan aspek keadilan dalam pemenuhan kebutuhan antar generasi serta mempertimbangkan kelestarian alam.

Untuk mengkomunikasikan dan memberikan transparansi akan dampak dari aktivitas operasi dan hubungan bisnisnya terhadap pembangunan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, Perusahaan menyusun *Sustainability Report* atau Laporan Keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan mengungkapkan kepada publik dampak entitas yang paling penting dan relevan terhadap lingkungan, sosial dan ham, serta ekonomi dan bagaimana entitas mengelola dampak tersebut. Melalui laporan keberlanjutan, perusahaan meningkatkan transparansinya terkait dampak serta meningkatkan akuntabilitas perusahaan (GRI Standard, 2021).

Di Indonesia, pelaporan keberlanjutan bersifat mandatori/wajib bagi lembaga keuangan sejak tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020 pelaporan keberlanjutan juga diwajibkan bagi seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Namun, akibat pandemi Covid-19, pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan publik ditunda 1 tahun sehingga implementasinya berlaku efektif per tahun 2021. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Pada tahun 2022, 88% perusahaan yang tercatat di bursa telah menyampaikan laporan keberlanjutan dan 80% perusahaan yang diteliti di Indonesia menggunakan Standar *Global Reporting Initiative* untuk Laporan Keberlanjutannya (PwC, 2023).

5.2 Standar GRI Bagi Pelaporan Keberlanjutan

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan organisasi internasional independen yang menyediakan panduan umum global bagi organisasi untuk mengkomunikasikan dampak aktivitas operasinya. Dalam menyusun pedoman laporan keberlanjutan, GRI bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, yaitu para pelaku bisnis, investor, pembuat kebijakan, masyarakat sipil, organisasi buruh, dan pakar lainnya. GRI didirikan pada tahun 1997 dan dalam perjalanannya telah mengeluarkan berbagai versi pedoman yang terus disempurnakan.

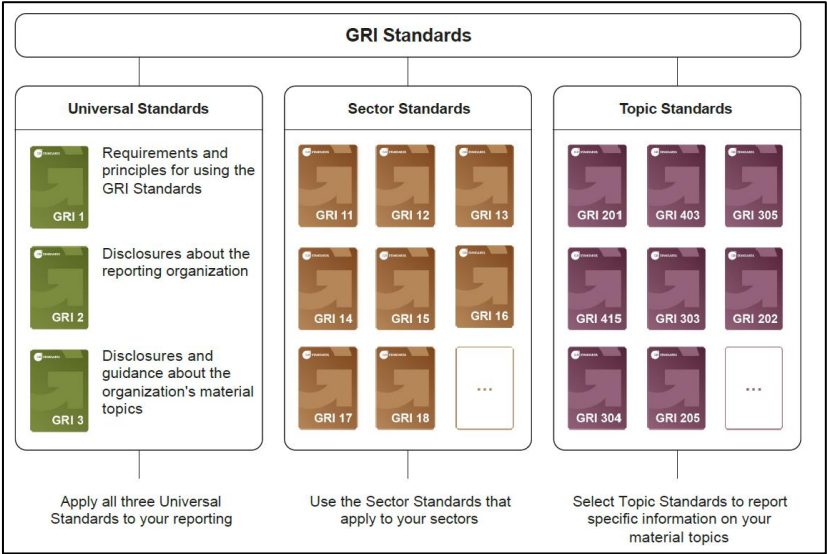
Pada tahun 2000, GRI mengeluarkan pedoman versi pertamanya. Di tahun 2002, GRI meluncurkan Pedoman GRI G2. Pada tahun 2006, GRI meluncurkan Pedoman GRI G3, disusul dengan peluncuran Pedoman GRI G4 pada tahun 2013. Per 2016, GRI untuk pertama kalinya meluncurkan Standar GRI yang kemudian direvisi pada Tahun 2021. Sehingga, untuk saat ini, versi terkini dari Standar GRI adalah Standar GRI 2021 yang efektif diberlakukan per 1 Januari 2023.

5.2.1 Standar GRI 2021

Standar GRI 2021 merupakan standar dengan sistem modular yang saling terkait yang terdiri dari tiga rangkaian standar yaitu: Standar Universal GRI, yang berlaku untuk seluruh organisasi tanpa kecuali; Standar Sektor GRI, yang berlaku untuk sektor industri tertentu; dan Standar Topik GRI, yang memberikan pengungkapan signifikan terkait topik tertentu, dimana organisasi dapat menentukan topik material atau yang paling relevan dengan aktivitas operasi dan dampaknya.

Standar Universal GRI terdiri dari *GRI 1: Foundation 2021* yang memperkenalkan tujuan dan sistem Standar GRI dan menjelaskan konsep utama untuk pelaporan keberlanjutan; *GRI*

2: *General Disclosures 2021* yang memberikan pengetahuan tentang profil entitas serta menyediakan konteks untuk memahami dampak entitas; serta *GRI 3: Material Topics 2021* yang memberikan panduan penentuan topik material. Sementara, Standar Sektor memberikan informasi bagi organisasi mengenai topik material yang relevan bagi sektornya masing-masing. Standar Sektor digunakan dalam menentukan topik materialnya dan saat menentukan informasi apa yang harus dilaporkan untuk topik material tersebut. Selanjutnya, Standar Topik memuat pengungkapan tentang dampak entitas terkait topik tertentu. Standar Topik mencakup berbagai topik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Entitas menggunakan Standar Topik sesuai dengan daftar topik material yang telah ditentukan sebelumnya.



Gambar 5. 1. Standar GRI 2021
(Sumber: Standar GRI 2021)

5.2.2 Prinsip Pelaporan

Untuk mencapai pelaporan keberlanjutan yang berkualitas tinggi, organisasi harus menerapkan prinsip pelaporan. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi memastikan penyajian informasi yang tepat dan berkualitas tinggi tentang dampak organisasi dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Informasi yang berkualitas dan relevan tentang dampak organisasi dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan akan membantu proses pengambilan keputusan bagi berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan Standar GRI 2021, secara umum terdapat 8 prinsip utama dalam pelaporan keberlanjutan yang dijelaskan sebagai berikut :

- *Accuracy/Ketepatan.* Untuk memungkinkan penilaian dampak organisasi, organisasi harus memberikan informasi yang benar dan cukup rinci. Keakuratan informasi kualitatif bergantung pada tingkat kerincian dan konsistensi dengan bukti yang tersedia, sedangkan informasi kuantitatif bergantung pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data.
- *Balance/Keseimbangan.* Organisasi harus melaporkan informasi secara netral dan memberikan gambaran yang adil tentang dampak positif dan negatif organisasi. Dalam hal ini, organisasi harus menyajikan informasi dengan cara yang memungkinkan pengguna melihat tren dampak positif dan negatif dari tahun ke tahun serta membedakan dengan jelas antara interpretasi organisasi dan fakta.
- *Clarity/Kejelasan.* Organisasi harus memastikan bahwa informasinya mudah diakses dan dipahami. Untuk melakukan ini, organisasi harus mempertimbangkan beberapa hal yang diperlukan oleh orang yang menggunakan informasi, seperti keterampilan, bahasa, dan teknologi.
- *Comparability/Keterbandingan.* Organisasi harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten

untuk memungkinkan analisis perubahan dampak organisasi dari waktu ke waktu. Informasi harus disajikan untuk periode pelaporan saat ini dan setidaknya dua periode pelaporan sebelumnya, disertai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar para pemangku kepentingan dapat membandingkan kinerja dengan target yang telah ditetapkan.

- *Completeness/Kelengkapan*. Selama periode pelaporan, organisasi diharapkan tidak menghilangkan informasi yang diperlukan untuk memahami dampak organisasi.
- *Sustainability Context/Konteks Keberlanjutan*. Organisasi harus menilai dan melaporkan informasi tentang dampaknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Tujuan pelaporan keberlanjutan dengan standar GRI adalah untuk memberikan transparansi tentang bagaimana suatu organisasi berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
- *Timeliness/Ketepatan Waktu*. Organisasi harus melaporkan informasi secara berkala dan tepat waktu agar penggunaannya dapat membuat keputusan. Kegunaan informasi terkait erat dengan ketersediaan informasi yang tepat waktu untuk membantu pengambilan keputusan.
- *Verifiability/Keterverifikasian*. Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, dan menganalisis informasi sehingga dapat diperiksa dan dipastikan kualitasnya untuk memastikan kebenarannya dan untuk menentukan sejauh mana prinsip pelaporan diterapkan.

5.2.3 Menentukan Topik Material

Menurut Standar GRI 2021, terdapat langkah-langkah dalam menentukan topik material sebagai berikut:

- Memahami konteks organisasi
- Mengidentifikasi potensi dan dampak aktual
- Menilai signifikansi dampak
- Memprioritaskan dampak yang paling signifikan untuk dilaporkan

Dalam memahami konteks organisasi, organisasi melakukan peninjauan akan aktivitas, hubungan bisnis, dan pemangku kepentingannya untuk mendapatkan konteks keberlanjutan dalam organisasi. Dalam hal ini, konteks keberlanjutan mencakup dampak ekonomi, lingkungan, serta sosial (termasuk hak asasi manusia). Selanjutnya, organisasi melakukan identifikasi dampak potensial dan aktual akan keempat aspek keberlanjutan tersebut. Identifikasi dapat dilakukan *menggunakan* berbagai sumber yang beragam, baik dari dalam organisasi maupun menggunakan jasa pihak ketiga. Setelah dampak-dampak tersebut diidentifikasi, organisasi menilai dan mengurutkan dampak tersebut berdasarkan prioritasnya. Signifikansi dampak negatif aktual ditentukan oleh tingkat keparahan dampaknya. Sementara, signifikansi dampak negatif potensial ditentukan oleh tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya dampak. Selanjutnya, organisasi memprioritaskan dampak untuk dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan berdasarkan tingkat signifikansinya.

5.2.4 Pengungkapan Umum

Menurut Standar GRI 2021, Pengungkapan Umum terdiri dari 5 bagian sebagai berikut :

- Bagian 1 terdiri dari lima pengungkapan, yang memberikan informasi tentang organisasi, praktik pelaporan keberlanjutannya, dan entitas yang termasuk dalam pelaporan keberlanjutannya.
- Bagian 2 terdiri dari tiga pengungkapan, yang memberikan informasi tentang aktivitas organisasi, karyawan, dan pekerja lainnya.
- Bagian 3 terdiri dari tiga belas pengungkapan, yang memberikan informasi tentang tata kelola.
- Bagian 4 terdiri dari tujuh pengungkapan, yang memberikan informasi tentang strategi pembangunan berkelanjutan dan praktek bisnis yang bertanggungjawab.

- Bagian 5 terdiri dari dua pengungkapan, yang memberikan informasi tentang praktik keterlibatan pemangku kepentingan dan perundingan bersama karyawan.

Pengungkapan umum sangat penting untuk memberikan konteks organisasi, khususnya dalam kaitan dengan aspek keberlanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan. Berikut disajikan daftar lengkap pengungkapan umum dalam Standar GRI.

Nomor	Judul
Pengungkapan Umum	
2-1	Rincian organisasi
2-2	Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi
2-3	Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan
2-4	Penyajian kembali informasi
2-5	Penjaminan eksternal
2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya
2-7	Tenaga kerja
2-8	Pekerja yang bukan pekerja langsung
2-9	Struktur dan komposisi tata kelola
2-10	Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi
2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi
2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak
2-13	Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak
2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan berkelanjutan
2-15	Konflik kepentingan
2-16	Komunikasi masalah penting
2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
2-19	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
2-20	Proses untuk menentukan remunerasi
2-21	Rasio kompensasi total tahunan
2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan
2-23	Komitmen kebijakan
2-24	Menanamkan komitmen kebijakan
2-25	Proses untuk memperbaiki dampak negatif
2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah
2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
2-28	Asosiasi keanggotaan
2-29	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan
2-30	Perjanjian perundingan kolektif

Gambar 5. 2. Standar GRI 2021: Pengungkapan Umum

(Sumber: Standar GRI 2021)

5.2.5 Pengungkapan Topik Khusus

Menurut Standar GRI 2021, Pengungkapan Topik Khusus terdiri dari 3 bagian *sebagai* berikut :

- Bagian 1 terdiri dari tujuh pengungkapan yang memberikan informasi tentang aspek ekonomi organisasi. Pengungkapan aspek ekonomi merupakan hal yang penting untuk menunjukkan transparansi perusahaan dalam mengelola sumber daya dan dampak ekonominya sehingga membantu membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Selain itu, melalui pengungkapan ekonomi, para pemangku kepentingan dapat menilai kinerja ekonomi, manajemen risiko, kontribusi terhadap ekonomi lokal dan global serta bagaimana entitas organisasi memastikan kelangsungan usahanya dengan cara yang berkelanjutan. Berikut disajikan daftar pengungkapan aspek ekonomi dalam Standar GRI.

Nomor	Judul
201	Kinerja Ekonomi 2016
202	Keberadaan pasar 2016
203	Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016
204	Praktik Pengadaan 2016
205	Antikorupsi 2016
206	Perilaku Antipersaingan 2016
207	Pajak 2019

Gambar 5. 3. Standar GRI 2021: Pengungkapan Aspek Ekonomi

(Sumber: Standar GRI 2021)

- Bagian 2 terdiri dari tujuh pengungkapan yang memberikan informasi tentang aspek lingkungan organisasi. Pengungkapan aspek lingkungan sangat penting untuk menunjukkan komitmen perusahaan

terhadap perlindungan lingkungan. Hal ini termasuk diantaranya upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengelola limbah, efisiensi material dan energi, menggunakan sumber daya alam secara efisien, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Berikut disajikan daftar pengungkapan aspek lingkungan dalam Standar GRI.

Nomor	Judul
301	Material 2016
302	Energi 2016
303	Air dan Efluen 2018
304	Keanekaragaman Hayati 2016
305	Emisi 2016
306	Limbah 2020
308	Penilaian Lingkungan Pemasok 2016

Gambar 5. 4. Standar GRI 2021: Pengungkapan Aspek Lingkungan

(Sumber: Standar GRI 2021)

- Bagian 3 terdiri dari tujuh belas pengungkapan yang memberikan informasi tentang aspek sosial dan HAM organisasi. Laporan keberlanjutan yang mencakup aspek sosial menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan sosial, seperti kesehatan dan keselamatan pekerja, keadilan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini juga menunjukkan bagaimana perusahaan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menunjukkan komitmen mereka untuk menghormati hak-hak dasar semua orang yang terlibat dalam rantai pasokan dan operasi mereka. Berikut disajikan daftar pengungkapan aspek sosial dalam Standar GRI.

Nomor	Judul
401	Kepegawaian 2016
402	Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016
403	Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018
404	Pelatihan dan Pendidikan 2016
405	Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016
406	Nondiskriminasi 2016
407	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016
408	Pekerja anak 2016
409	Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016
410	Praktik Keamanan 2016
411	Hak Masyarakat Adat 2016
413	Masyarakat Setempat 2016
414	Penilaian Sosial Pemasok 2016
415	Kebijakan Publik 2016
416	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016
417	Pemasaran dan Pelabelan 2016
418	Privasi Pelanggan 2016

Gambar 5. 5. Standar GRI 2021: Pengungkapan Aspek Sosial
(Sumber: Standar GRI 2021)

5.3 SEOJK Nomor 16 Tahun 2021

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik mengatur isi dari Laporan Keberlanjutan bagi perusahaan publik. Sehingga, seluruh poin yang disebutkan dalam SEOJK 16 tersebut wajib diungkapkan bagi perusahaan publik. Menurut SEOJK 16, Laporan Keberlanjutan terdiri dari 7 bagian yang terdiri dari Strategi Keberlanjutan, Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan, Profil Perusahaan, Penjelasan Direksi, Governansi

Berkelanjutan, Kinerja Keberlanjutan (Aspek Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial), serta Bagian Lain-Lain. Berikut SEOJK 16 dirangkum dalam gambar:

Nomor	ISI LAPORAN KEBERLANJUTAN
A	Strategi Keberlanjutan
B	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan
C	Profil Perusahaan
D	Penjelasan Direksi
E	Governansi Berkelanjutan
F	Kinerja Keberlanjutan
1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan
a)	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan
2	Kinerja Ekonomi
a)	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi
b)	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan

Gambar 5. 6. Isi Laporan Keberlanjutan
(Sumber: SEOJK Nomor 16 Tahun 2021)

Nom or	ISI LAPORAN KEBERLANJUTAN
3	Kinerja Lingkungan Hidup
a)	Aspek Umum
a1)	Biaya Lingkungan Hidup
b)	Aspek Material
b1)	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan
c)	Aspek Energi
c1)	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan
c2)	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan
d)	Aspek Air
d1)	Penggunaan air
e)	Aspek Keragaman Hayati
e1)	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Keanekaragaman Hayati
e2)	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati
f)	Aspek Emisi
f1)	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya
f2)	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan
g)	Aspek Limbah Dan Efluen
g1)	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis
g2)	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen
g3)	Tumpahan yang Terjadi (jika ada)
h)	Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup
h1)	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan.
4	Kinerja Sosial
a)	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen
b)	Aspek Ketenagakerjaan
b1)	Kesetaraan Kesempatan Bekerja
b2)	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa
b3)	Upah Minimum Regional
b4)	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman
b5)	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai
c)	Aspek Masyarakat
c1)	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar
c2)	Pengaduan Masyarakat
c3)	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)
d)	Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan
d1)	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan
d2)	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan
d3)	Dampak Produk/Jasa
d4)	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali
e)	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
G	Lain-lain
1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen
2	Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada
3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelum
4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Gambar 5. 7. Isi Laporan Keberlanjutan
(Sumber: SEOJK Nomor 16 Tahun 2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Elkington, J. (1997) *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone, Oxford.
- Global Reporting Initiatives. 2021. *GRI Standard 2021*. Amsterdam: Global Reporting Initiatives.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

BAB 6

LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA CSR DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh Resmi Afifah Fadilah

6.1 Pendahuluan

Indonesia memiliki lingkungan hidup yang sangat kaya dan beragam, dengan hutan hujan tropis yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, dan sumber daya alam yang melimpah (Riswan and Yamada 2006). Lingkungan hidup di Indonesia adalah aset yang sangat berharga, namun juga sangat rentan. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup demi keberlanjutan di masa depan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah konsep pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lingkungan hidup memainkan peran kunci dalam pembangunan berkelanjutan karena merupakan fondasi yang menopang aspek ekonomi dan sosial dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Lingkungan sebagai basis sumber daya alam yang menyediakan sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan manusia dan ekonomi, seperti air, udara, tanah, hutan, mineral, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya ini

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, energi, dan tempat tinggal, serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, industri, dan pariwisata.

2. Pembangunan berkelanjutan menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Jika sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan kapasitas regenerasinya, hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya mengancam kesejahteraan manusia dan ekonomi.

Pembangunan berkelanjutan mengakui bahwa ekonomi, sosial, dan lingkungan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan (Moldan, Janoušková & Hák 2012). Misalnya, kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan, seperti penambangan ilegal atau penggunaan pestisida berlebihan dalam pertanian, mungkin memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi merusak lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, kebijakan dan praktik harus dirancang untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan seperti ekonomi sirkular, di mana limbah diminimalkan dan sumber daya digunakan kembali, atau melalui investasi dalam energi terbarukan yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan juga menekankan pentingnya keadilan antar generasi (menjaga sumber daya bagi generasi mendatang) dan intra generasi (menciptakan kesejahteraan yang adil di antara populasi saat ini) (Bouman 2018). Kerusakan lingkungan saat ini, jika tidak ditangani, akan menurunkan kualitas hidup generasi mendatang. Upaya seperti pengurangan ketimpangan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan, semuanya adalah bagian dari visi pembangunan berkelanjutan

yang berusaha menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Lingkungan hidup terintegrasi ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015, yang terdiri dari 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk perlindungan lingkungan. Beberapa tujuan yang secara langsung terkait dengan lingkungan hidup antara lain: Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi, Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14: Ekosistem Lautan, Tujuan 15: Ekosistem Daratan. Pencapaian SDGs tidak mungkin terwujud tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup, karena lingkungan yang sehat adalah prasyarat untuk memenuhi banyak tujuan lainnya, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan yang baik, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Yang et al. 2020).

Tantangan dalam mencapai *pembangunan* berkelanjutan antara lain yang pertama, pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan yaitu eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, seperti deforestasi, penangkapan ikan yang berlebihan, dan polusi industri. Yang kedua, perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar, dengan dampak yang luas pada lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Penanganan perubahan iklim memerlukan aksi global dan kebijakan yang kuat. Yang ketiga, Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih dan energi, menjadi hambatan dalam mencapai kesejahteraan yang merata. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut, seperti menerapkan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, melindungi kawasan konservasi,

mengembangkan energi terbarukan serta menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau Tanggung Jawab Sosial perusahaan sebagai pelaku industry (Priyanta 2016).

Corporate Social Responsibility (CSR), atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, adalah konsep yang berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi bagian integral dari strategi perusahaan di berbagai sektor industri. Konsep CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan-perusahaan tertentu untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Implementasi CSR ini sering kali mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang lebih lanjut mengatur pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Indonesia.

CSR mengacu pada tanggung jawab yang diemban oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi, di luar tujuan utama mereka untuk menghasilkan keuntungan. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kepentingan pemegang saham; mereka juga harus mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, pelanggan, komunitas lokal, dan yang paling penting adalah lingkungan.

Relevansi CSR terhadap lingkungan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan polusi. Sebagai entitas yang beroperasi dalam ekosistem yang lebih besar, perusahaan tidak dapat mengabaikan dampak lingkungan dari kegiatan

operasional mereka. Konsep CSR menuntut perusahaan untuk mengambil tindakan proaktif dalam mengurangi dampak negatif lingkungan, serta berkontribusi pada pelestarian dan pemulihan lingkungan. Ini bukan hanya tentang meminimalkan kerugian, tetapi juga tentang menciptakan nilai positif bagi lingkungan.

Implementasi CSR yang efektif dapat membantu perusahaan dalam berbagai cara. Pertama, dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Pelanggan dan investor semakin memperhatikan kinerja lingkungan perusahaan dan cenderung mendukung perusahaan yang menunjukkan komitmen nyata terhadap pelestarian lingkungan. Kedua, melalui pengelolaan sumber daya yang *lebih* efisien dan pengurangan limbah, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Ketiga, CSR yang fokus pada lingkungan dapat membantu perusahaan dalam mematuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat di berbagai negara, menghindari sanksi, dan mengurangi risiko hukum.

Dalam konteks *lingkungan*, CSR tidak hanya terbatas pada inisiatif yang terkait langsung dengan pengelolaan lingkungan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca atau pengelolaan limbah. CSR juga mencakup aspek-aspek seperti penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta dukungan terhadap inisiatif lingkungan di tingkat komunitas dan global. Dengan demikian, CSR dalam konteks lingkungan mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan lingkungan global yang dihadapi saat ini.

6.2 Ruang Lingkup CSR dalam Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Ruang lingkup CSR dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sangat luas dan mencakup berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan. Salah satu area utama di mana CSR memainkan peran penting adalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam, seperti air, udara, tanah, dan energi, adalah elemen fundamental bagi keberlangsungan operasional perusahaan, tetapi pada saat yang sama, penggunaannya juga dapat menyebabkan kerusakan *lingkungan* yang signifikan. Melalui CSR, perusahaan didorong untuk mengadopsi praktik-praktik yang memastikan penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan (Ganesh & Venugopal 2023). Beberapa strategi CSR dalam menjaga kualitas lingkungan yaitu:

1. Perusahaan dapat mengimplementasikan inisiatif penghematan energi dan air, yang tidak hanya mengurangi biaya operasional tetapi juga membantu dalam konservasi sumber daya alam yang terbatas
2. Perusahaan dapat berinvestasi dalam teknologi bersih dan energi terbarukan, yang merupakan langkah penting dalam mengurangi jejak karbon dan memerangi perubahan iklim. Praktik-praktik seperti daur ulang dan pengelolaan limbah juga merupakan bagian integral dari CSR yang fokus pada lingkungan. Melalui pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang limbah, perusahaan dapat mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan mengurangi polusi.
3. CSR dalam konteks lingkungan melibatkan pelestarian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah dasar bagi ekosistem yang sehat dan berfungsi, yang pada gilirannya mendukung kelangsungan hidup manusia dan bisnis. Namun, aktivitas industri sering kali menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati, melalui perusakan habitat,

polusi, dan eksploitasi berlebihan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, baik melalui inisiatif internal, seperti pengelolaan lahan dan konservasi spesies, maupun melalui kemitraan dengan organisasi lingkungan dan komunitas lokal.

4. Ruang lingkup CSR dalam menjaga kualitas lingkungan juga mencakup upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Perusahaan, terutama yang beroperasi di sektor industri dan transportasi, merupakan kontributor utama emisi gas rumah kaca, yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Melalui CSR, perusahaan dapat menetapkan target pengurangan emisi, berinvestasi dalam teknologi rendah karbon, dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Pengurangan polusi udara juga merupakan area penting, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Inisiatif CSR yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengurangi emisi polutan, seperti sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NO_x), dan partikel-partikel berbahaya lainnya.
5. CSR juga mencakup partisipasi aktif perusahaan dalam proyek-proyek restorasi dan rehabilitasi lingkungan. Banyak perusahaan yang beroperasi di sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan kehutanan, terlibat dalam aktivitas yang merusak lingkungan. Melalui CSR, perusahaan-perusahaan ini dapat terlibat dalam upaya restorasi, seperti penghijauan kembali lahan yang telah dieksploitasi atau rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi. Keterlibatan ini tidak hanya membantu dalam memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan.
6. CSR dalam menjaga kualitas lingkungan juga berarti mendukung inisiatif lingkungan di tingkat komunitas dan global. Perusahaan dapat bermitra dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk mengembangkan program-program yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Misalnya, program pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya lingkungan dapat membantu

meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan dapat mendukung proyek-proyek lingkungan global, seperti upaya mitigasi perubahan iklim dan konservasi ekosistem global yang penting, melalui pendanaan, penelitian, dan partisipasi aktif.

Ruang lingkup CSR dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah tentang bagaimana perusahaan dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan bahwa operasi mereka tidak merugikan lingkungan, dan bahkan berkontribusi positif terhadap pelestarian dan pemulihan lingkungan. Ini adalah komitmen yang tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri, melalui peningkatan reputasi, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, CSR yang berfokus pada lingkungan tidak hanya mengenai tindakan yang dilakukan hari ini, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa sumber daya alam yang ada saat ini masih tersedia dan dapat digunakan oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, CSR bukanlah konsep yang statis, melainkan terus berkembang seiring dengan meningkatnya tantangan lingkungan global dan kebutuhan akan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip CSR dalam strategi bisnis mereka, perusahaan tidak hanya berperan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membantu mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. CSR dalam konteks lingkungan adalah tentang tanggung jawab bersama untuk menjaga bumi kita tetap layak huni, baik untuk kita sendiri maupun untuk generasi mendatang.

6.4 Prinsip-Prinsip CSR yang Berhubungan dengan Lingkungan Hidup

6.4.1 Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan merupakan salah satu fondasi utama dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Keberlanjutan dalam konteks CSR mengacu pada upaya perusahaan untuk menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang tidak merusak lingkungan atau mengurangi kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Prinsip ini berakar pada pemahaman bahwa sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan baik itu air, energi, atau bahan baku lainnya adalah terbatas, dan bahwa pemanfaatan sumber daya ini harus dilakukan secara *bijaksana* dan bertanggung jawab. Keberlanjutan menuntut perusahaan untuk berpikir jangka panjang dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan bisnis terhadap lingkungan. Sebagai contoh, dalam industri manufaktur, prinsip keberlanjutan mungkin diwujudkan melalui penggunaan bahan baku yang dapat diperbarui, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan limbah yang efektif. Dalam sektor energi, perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan berinvestasi dalam teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin, yang memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi fosil (Ganesh & Venugopal 2023).

Lebih lanjut, keberlanjutan juga mencakup aspek-aspek ekonomi dan sosial. Dalam konteks CSR, keberlanjutan ekonomi berarti bahwa perusahaan harus beroperasi dengan cara yang mendukung stabilitas jangka panjang dan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek (Lloret 2016). Misalnya, dengan mempraktikkan efisiensi energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang semakin menipis, perusahaan dapat menjaga kelangsungan bisnisnya dalam

jangka panjang. Keberlanjutan sosial, di sisi lain, mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasi mereka, termasuk dengan menciptakan lapangan kerja yang adil dan berkontribusi pada pembangunan komunitas.

Dalam implementasinya, prinsip keberlanjutan dalam CSR seringkali diukur melalui pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*), di mana perusahaan menyampaikan informasi mengenai kinerja lingkungan mereka kepada pemangku kepentingan. Pelaporan ini biasanya mencakup data tentang penggunaan sumber daya, emisi, limbah, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan keberlanjutan. Transparansi dalam pelaporan keberlanjutan ini adalah kunci untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan (van der Ploeg & Vanclay 2013).

6.4.2 Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam CSR berhubungan erat dengan kesadaran perusahaan akan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral dan etis untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga meminimalkan dampak negatif dari operasinya dan, sebisa mungkin, berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks lingkungan hidup, prinsip tanggung jawab menuntut perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini mencakup berbagai tindakan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah berbahaya, konservasi air, dan penggunaan sumber daya secara efisien. Perusahaan yang bertanggung jawab akan berusaha untuk mengidentifikasi dan memitigasi dampak lingkungan dari setiap tahap operasi mereka, mulai dari

perolehan bahan baku hingga distribusi produk akhir (Hertwich et al. 2019).

Tanggung jawab juga berarti bahwa perusahaan harus bersedia untuk mengambil langkah-langkah perbaikan jika terjadi kerusakan lingkungan akibat operasinya. Misalnya, jika suatu perusahaan menyebabkan pencemaran air atau tanah, mereka memiliki kewajiban untuk membersihkan pencemaran tersebut dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kembali insiden serupa. Selain itu, perusahaan yang bertanggung jawab juga akan berinvestasi dalam teknologi dan praktik yang dapat mengurangi jejak ekologis mereka dan mendukung pelestarian lingkungan. Prinsip tanggung jawab juga mencakup tanggung jawab sosial terhadap komunitas di mana perusahaan beroperasi. Ini bisa berarti mendukung inisiatif lokal untuk perlindungan lingkungan, menyediakan edukasi tentang praktik ramah lingkungan, atau berkontribusi pada proyek-proyek lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Melalui tindakan-tindakan ini, perusahaan tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan komunitas lokal dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik.

Dalam implementasinya, tanggung jawab dalam CSR seringkali diintegrasikan ke dalam kebijakan perusahaan dan kode *etik*, yang menjadi panduan bagi seluruh karyawan dalam menjalankan tugas mereka dengan memperhatikan dampak lingkungan. Ini juga dapat diwujudkan melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran di seluruh tingkat organisasi, sehingga setiap individu dalam perusahaan memiliki pemahaman yang jelas tentang pentingnya tanggung jawab lingkungan.

6.4.3 Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan CSR, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Transparansi mengacu pada keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai praktik, kebijakan, dan kinerja mereka kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum. Akuntabilitas, di sisi lain, berarti bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil, serta bersedia untuk menerima konsekuensi dari tindakan tersebut, baik positif maupun negatif. Transparansi dalam CSR lingkungan mencakup pelaporan yang jujur dan komprehensif tentang dampak lingkungan dari operasi perusahaan. Ini termasuk penyampaian informasi mengenai emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan langkah-langkah lain yang diambil untuk mengurangi dampak lingkungan. Dengan menyajikan data yang akurat dan dapat diverifikasi, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) adalah salah satu cara utama bagi perusahaan untuk menunjukkan transparansi. Laporan ini biasanya disusun berdasarkan standar internasional, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) atau ISO 26000, yang menetapkan kerangka kerja untuk pengungkapan informasi terkait kinerja lingkungan dan sosial. Melalui laporan keberlanjutan, perusahaan dapat menunjukkan kepada pemangku kepentingan bagaimana mereka mengelola dampak lingkungan dan kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan keberlanjutan (Asiaei et al. 2021).

Akuntabilitas dalam CSR mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya mengungkapkan informasi, tetapi juga mengambil tindakan nyata berdasarkan informasi tersebut. Ini berarti

bahwa jika laporan menunjukkan adanya kekurangan atau masalah dalam kinerja lingkungan, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Akuntabilitas juga berarti bahwa perusahaan harus bersedia menerima pengawasan dari pihak eksternal, seperti regulator, media, atau organisasi non-pemerintah, dan memberikan respons yang tepat terhadap kritik atau saran yang diberikan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga mencakup keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan yang transparan dan akuntabel akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi lingkungan mereka, serta mempertimbangkan masukan dari komunitas lokal, karyawan, dan pelanggan. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga sejalan dengan kepentingan lingkungan dan masyarakat luas.

Selain itu, akuntabilitas dalam CSR lingkungan juga berhubungan dengan tanggung jawab hukum. Perusahaan harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang lingkungan yang berlaku, serta bersedia untuk bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Hal ini penting tidak hanya untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga untuk mempertahankan reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dan berintegritas. Dalam prakteknya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas memerlukan komitmen dari seluruh tingkat organisasi. Manajemen puncak harus mendukung dan mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas, sementara karyawan di semua tingkat harus dilibatkan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga terwujud dalam tindakan sehari-hari yang diambil oleh perusahaan.

6.4 Peran CSR dalam Pembangunan Berkelanjutan

6.4.1 Kontribusi CSR terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi *komponen* penting dalam strategi perusahaan modern, terutama dalam konteks mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). SDGs, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, mencakup 17 tujuan global yang dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang pada tahun 2030. Peran CSR dalam pencapaian SDGs menjadi semakin signifikan, karena perusahaan memiliki sumber daya, kapasitas inovasi, dan jangkauan global yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara substansial terhadap tujuan-tujuan ini.

CSR dapat berkontribusi terhadap berbagai tujuan SDGs, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup (ElAlfy et al. 2020). Misalnya:

1. SDG 13 yang berfokus pada tindakan terhadap perubahan iklim, dapat didukung melalui inisiatif CSR yang menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, dan investasi dalam teknologi rendah karbon. Perusahaan yang mengintegrasikan upaya mitigasi perubahan iklim ke dalam strategi CSR mereka, tidak hanya membantu mengurangi dampak operasional terhadap lingkungan, tetapi juga mendorong inovasi dalam produk dan proses yang lebih ramah lingkungan.
2. SDG 12, yang bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, juga dapat dipromosikan melalui CSR. Perusahaan dapat mengadopsi praktik produksi yang efisien dan berkelanjutan, seperti penggunaan bahan baku yang dapat diperbarui, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan pengurangan penggunaan plastik. Selain itu, perusahaan

dapat mempromosikan konsumsi yang berkelanjutan di kalangan konsumen mereka melalui edukasi, pelabelan produk yang jelas, dan penyediaan pilihan produk yang ramah lingkungan.

3. SDG 15, yang bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Perusahaan dapat berkontribusi dengan mendukung konservasi hutan, rehabilitasi lahan yang terdegradasi, dan pelestarian spesies yang terancam punah. Melalui kemitraan dengan organisasi lingkungan dan komunitas lokal, perusahaan dapat memperkuat upaya pelestarian alam dan memastikan keberlanjutan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia.
4. Lebih luas lagi, CSR dapat mendukung hampir semua SDGs, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengadopsi pendekatan bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan dan praktik CSR mereka, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dan moral mereka, tetapi juga berkontribusi positif terhadap pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan.

6.4.2 Implementasi Strategi CSR dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Implementasi strategi CSR yang efektif adalah kunci bagi perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan secara nyata. Strategi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat selaras dengan tujuan bisnis perusahaan, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Ada beberapa langkah penting yang perlu

diperhatikan dalam implementasi strategi CSR yang mendukung pembangunan berkelanjutan:

1. Perusahaan perlu melakukan pemetaan dampak lingkungan dari operasinya. Analisis ini melibatkan identifikasi dan penilaian dampak potensial dan aktual dari aktivitas bisnis terhadap lingkungan, termasuk emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan dampak terhadap keanekaragaman hayati. Dengan memahami dampak tersebut, perusahaan dapat menetapkan prioritas dalam strategi CSR mereka, fokus pada area yang paling membutuhkan perhatian, dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai untuk mengelola dampak tersebut.
2. Perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dalam implementasi strategi CSR. Sasaran ini harus terukur, realistis, dan terikat waktu, sehingga kemajuan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan target pengurangan emisi karbon dalam jangka waktu tertentu, atau target peningkatan efisiensi energi di seluruh operasi mereka. Tujuan dan sasaran ini juga harus selaras dengan SDGs, sehingga upaya perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dapat diakui secara global.
3. Implementasi strategi CSR harus didukung oleh komitmen dari seluruh tingkatan organisasi. Ini berarti bahwa manajemen puncak harus memberikan dukungan penuh dan menempatkan CSR sebagai prioritas strategis, sementara karyawan di semua tingkatan harus dilibatkan dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif CSR. Pelatihan dan pendidikan karyawan tentang pentingnya CSR dan peran mereka dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah langkah penting dalam memastikan keberhasilan implementasi.
4. Perusahaan perlu membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta lainnya. Kolaborasi ini penting karena banyak tantangan

pembangunan berkelanjutan yang tidak dapat diatasi oleh satu entitas saja. Misalnya, perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi lingkungan dalam proyek konservasi, atau dengan komunitas lokal dalam inisiatif pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

5. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam implementasi strategi CSR. Perusahaan harus memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan dalam rangka CSR dilaporkan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pelaporan keberlanjutan yang jujur dan komprehensif, yang mencakup kemajuan, tantangan, dan hasil dari inisiatif CSR, membantu membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
6. Perusahaan harus siap untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam implementasi strategi CSR. Kondisi lingkungan dan sosial yang dinamis menuntut perusahaan untuk tetap fleksibel dan mencari cara-cara baru untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini bisa berarti berinvestasi dalam teknologi baru, mengadopsi praktik-praktik terbaik dari industri lain, atau mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih ramah lingkungan.

6.5 Integrasi CSR dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Praktik Akuntansi

6.5.1 Akuntansi Lingkungan sebagai Alat Pengukuran Efektivitas CSR

Akuntansi lingkungan telah berkembang menjadi salah satu elemen kunci dalam mengukur efektivitas inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berfokus pada keberlanjutan. Dalam konteks ini, akuntansi lingkungan merujuk pada proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi lingkungan yang relevan dengan aktivitas bisnis perusahaan. Ini

termasuk pengukuran dampak lingkungan dari operasi perusahaan, serta penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut.

Sebagai alat pengukuran efektivitas CSR, akuntansi lingkungan memungkinkan perusahaan untuk menilai sejauh mana inisiatif CSR yang mereka implementasikan berhasil dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Misalnya, melalui akuntansi lingkungan, perusahaan dapat menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas produksi, serta menilai efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam lainnya. Data ini kemudian dapat digunakan untuk menentukan apakah program pengurangan emisi yang diterapkan telah efektif dalam mengurangi jejak karbon perusahaan.

Selain itu, akuntansi lingkungan juga mencakup penilaian *biaya* dan manfaat dari inisiatif lingkungan. Dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk implementasi program lingkungan seperti investasi dalam teknologi hijau atau upaya konservasi air dan membandingkannya dengan manfaat jangka panjang yang dihasilkan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang alokasi sumber daya mereka. Analisis ini membantu perusahaan untuk tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial mereka, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya dalam jangka panjang.

Akuntansi lingkungan juga berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi transparansi dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Dengan mencatat dan melaporkan data lingkungan yang akurat dan komprehensif, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan masyarakat umum. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa perusahaan benar-benar

berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

6.5.2 Pelaporan CSR dan Indikator Keberlanjutan

Pelaporan CSR, yang juga dikenal sebagai laporan keberlanjutan, adalah alat utama yang digunakan perusahaan untuk mengomunikasikan upaya mereka dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Laporan ini mencakup informasi mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Indikator keberlanjutan merupakan bagian integral dari pelaporan CSR. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam berbagai aspek keberlanjutan, seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, efisiensi air, pengelolaan limbah, serta dampak sosial dan ekonomi dari operasi perusahaan. Indikator keberlanjutan yang digunakan oleh perusahaan harus sesuai dengan standar internasional, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), yang menyediakan kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan yang transparan dan konsisten (Ismail et al. 2021).

Penggunaan indikator keberlanjutan memungkinkan perusahaan untuk memantau kemajuan mereka dalam mencapai target keberlanjutan. Misalnya, jika sebuah perusahaan menetapkan target pengurangan emisi karbon sebesar 20% dalam lima tahun, indikator keberlanjutan dapat digunakan untuk melacak emisi tahunan dan menilai apakah perusahaan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target tersebut. Jika indikator menunjukkan bahwa target tidak tercapai, perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka untuk memastikan hasil yang lebih baik di masa depan.

Indikator keberlanjutan juga memainkan peran penting dalam memperkuat akuntabilitas perusahaan. Dengan melaporkan indikator ini secara terbuka, perusahaan menunjukkan kesediaan mereka untuk dipantau dan dievaluasi oleh pemangku kepentingan eksternal. Ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka.

Pelaporan CSR yang efektif harus mencakup narasi yang jelas tentang bagaimana perusahaan menggunakan indikator keberlanjutan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan mengelola risiko lingkungan dan sosial. Laporan ini harus menunjukkan hubungan antara kinerja keberlanjutan dan tujuan strategis perusahaan, serta menjelaskan bagaimana upaya CSR berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Dengan demikian, pelaporan CSR tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat manajemen yang mendukung integrasi CSR ke dalam strategi bisnis secara keseluruhan.

6.5.3 Metodologi Evaluasi Dampak Lingkungan dari Program CSR

Evaluasi dampak lingkungan dari program CSR merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa inisiatif yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang diinginkan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diantisipasi. Metodologi evaluasi dampak lingkungan mencakup serangkaian proses dan alat yang digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan menilai efek dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan.

Salah satu pendekatan umum dalam evaluasi dampak lingkungan adalah Analisis Siklus Hidup (*Life Cycle Analysis/LCA*). LCA adalah metodologi yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari semua tahap siklus hidup suatu produk, mulai dari perolehan bahan baku, produksi, distribusi, penggunaan, hingga pembuangan akhir. Dengan menggunakan

LCA, perusahaan dapat mengidentifikasi titik-titik kritis dalam siklus hidup produk yang memiliki dampak lingkungan terbesar dan mengarahkan upaya mereka untuk mengurangi dampak tersebut. LCA memberikan gambaran yang komprehensif tentang jejak lingkungan produk dan membantu perusahaan dalam merancang produk yang lebih ramah lingkungan (Jacquemin, Pontalier & Sablayrolles 2012).

Pendekatan lain yang sering digunakan dalam evaluasi dampak lingkungan adalah Analisis Risiko Lingkungan (*Environmental Risk Assessment/ERA*). ERA digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko lingkungan yang terkait dengan aktivitas perusahaan, seperti risiko pencemaran air, tanah, atau udara. ERA membantu perusahaan untuk memahami kemungkinan terjadinya dampak negatif, serta besarnya dampak tersebut, dan merancang strategi mitigasi yang sesuai. Dengan melakukan ERA secara rutin, perusahaan dapat proaktif dalam mengelola risiko lingkungan dan meminimalkan potensi kerugian (Rodier & Zeeman 2019).

Selain itu, evaluasi dampak lingkungan juga dapat dilakukan melalui audit lingkungan. Audit lingkungan adalah proses penilaian sistematis terhadap kinerja lingkungan perusahaan, yang mencakup pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, efektivitas sistem manajemen lingkungan, serta identifikasi peluang untuk perbaikan. Audit ini dapat dilakukan secara internal oleh perusahaan atau oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan objektivitas dan keakuratan hasil. Audit lingkungan membantu perusahaan untuk memastikan bahwa program CSR mereka tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan.

Metodologi evaluasi dampak lingkungan juga harus mencakup analisis terhadap manfaat sosial dan ekonomi dari program CSR. Misalnya, jika sebuah perusahaan meluncurkan

program konservasi air di daerah yang rawan kekeringan, evaluasi harus mencakup penilaian terhadap dampak program tersebut terhadap akses air bersih bagi komunitas lokal, serta bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi lokal. Dengan menggabungkan analisis dampak lingkungan dengan penilaian manfaat sosial dan ekonomi, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih holistik tentang efektivitas program CSR mereka.

Setelah evaluasi dampak lingkungan dilakukan, langkah selanjutnya adalah menggunakan temuan dari evaluasi tersebut untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Ini dapat melibatkan penyesuaian strategi CSR, pengembangan inisiatif baru, atau peningkatan sistem manajemen lingkungan. Dengan terus memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan dari program CSR, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka terus bergerak menuju tujuan keberlanjutan dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Secara keseluruhan, integrasi CSR dan pembangunan berkelanjutan dalam praktik akuntansi adalah proses yang melibatkan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi yang sistematis terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Melalui akuntansi lingkungan, pelaporan CSR yang transparan, dan metodologi evaluasi dampak lingkungan yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa upaya mereka dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tidak hanya simbolis, tetapi juga memberikan hasil yang nyata dan terukur. Integrasi ini juga memungkinkan perusahaan untuk berperan sebagai agen perubahan yang mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

6.6 Tantangan dan Peluang CSR dalam Pembangunan Berkelanjutan

6.6.1 Tantangan Global dalam Penerapan CSR untuk Lingkungan

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi komponen penting dalam strategi bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Namun, implementasi CSR yang efektif, terutama yang berfokus pada lingkungan, menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks dan dinamis. Tantangan-tantangan ini sering kali muncul dari faktor eksternal yang berada di luar kendali perusahaan, namun berdampak signifikan pada kemampuan mereka untuk menjalankan program CSR yang berhasil. Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan fenomena global yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk operasional bisnis. Perusahaan dihadapkan pada tekanan yang semakin besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak iklim yang tidak dapat dihindari, seperti cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan perubahan pola curah hujan. Tantangan ini diperparah oleh fakta bahwa perubahan iklim merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, yang memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif untuk diatasi. Bagi banyak perusahaan, menyeimbangkan kebutuhan untuk tetap kompetitif di pasar global dengan tanggung jawab untuk mengurangi dampak lingkungan mereka merupakan tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut muncul dari beberapa

1. Regulasi lingkungan yang terus berubah juga menjadi tantangan dalam penerapan CSR. Di berbagai negara, pemerintah telah memperkenalkan peraturan yang lebih ketat terkait dengan emisi, penggunaan sumber daya, dan pengelolaan limbah. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk melindungi lingkungan, mereka juga menambah beban

operasional bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan peraturan yang berbeda-beda. Selain itu, perusahaan harus menghadapi risiko ketidakpastian regulasi, di mana perubahan kebijakan yang tiba-tiba dapat mempengaruhi rencana bisnis jangka panjang mereka.

2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya CSR di kalangan pemangku kepentingan juga menjadi tantangan. Meskipun kesadaran global tentang isu-isu lingkungan telah meningkat, masih ada banyak pihak, termasuk di sektor swasta, yang belum sepenuhnya memahami atau menghargai nilai dari CSR yang kuat. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan untuk inisiatif CSR, baik dari dalam organisasi (seperti manajemen dan karyawan) maupun dari luar (seperti pelanggan, pemasok, dan komunitas lokal). Tanpa dukungan yang memadai, program CSR cenderung gagal mencapai dampak yang diinginkan.
3. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial, teknis, maupun manusia. Implementasi program CSR yang komprehensif memerlukan investasi yang tidak sedikit, baik dalam bentuk waktu, uang, maupun tenaga kerja. Perusahaan kecil dan menengah (UKM), khususnya, sering kali menghadapi kesulitan dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung inisiatif CSR mereka, meskipun mereka mungkin memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan. Keterbatasan ini sering kali memaksa perusahaan untuk membuat kompromi dalam pelaksanaan CSR, yang dapat mengurangi efektivitas dan dampak dari program yang dijalankan.
4. Terakhir, tantangan dalam mengukur dan melaporkan dampak dari program CSR juga menjadi isu yang krusial. Meskipun banyak perusahaan telah mulai menerapkan pelaporan keberlanjutan, sering kali sulit untuk mengukur dampak lingkungan dan sosial dari inisiatif CSR dengan cara yang objektif dan dapat diandalkan. Kekurangan standar internasional yang konsisten dalam pelaporan CSR

juga menambah kompleksitas ini, sehingga membatasi kemampuan perusahaan untuk menunjukkan kinerja mereka secara transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan.

6.6.2 Peluang Inovasi dalam Praktek CSR untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Meskipun tantangan-tantangan tersebut nyata dan signifikan, mereka juga menciptakan peluang bagi perusahaan untuk berinovasi dan mengembangkan praktik CSR yang lebih efektif dan berkelanjutan. Inovasi dalam CSR tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga untuk menciptakan nilai baru bagi bisnis, lingkungan, dan masyarakat.

1. Pengembangan teknologi hijau. Teknologi hijau mencakup berbagai inovasi yang dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas manusia, termasuk energi terbarukan, teknologi pengelolaan limbah, dan efisiensi energi. Perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau dapat mengurangi jejak karbon mereka, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin mengutamakan keberlanjutan. Misalnya, pengembangan teknologi energi surya dan angin telah memungkinkan perusahaan untuk beralih dari energi fosil yang berpolusi tinggi ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan (Nassani et al. 2023).
2. Peluang inovasi dalam pengembangan produk dan layanan yang berkelanjutan. Perusahaan dapat mengadopsi desain produk yang mengurangi konsumsi sumber daya dan limbah, serta mempromosikan daur ulang dan pemanfaatan kembali bahan-bahan. Inovasi dalam rantai pasokan juga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi, misalnya dengan menggunakan bahan baku yang

bersumber secara etis atau mengoptimalkan logistik untuk mengurangi emisi transportasi.

3. Perusahaan dapat mengembangkan layanan yang mendukung keberlanjutan, seperti solusi manajemen energi atau konsultasi lingkungan, yang tidak hanya memberikan nilai tambah bagi pelanggan, tetapi juga memperluas dampak positif dari inisiatif CSR mereka. Inovasi dalam model bisnis juga merupakan peluang penting dalam CSR. Banyak perusahaan telah mulai mengadopsi model bisnis yang berpusat pada keberlanjutan, seperti ekonomi sirkular, di mana produk dan bahan diupayakan untuk digunakan kembali dalam siklus yang berkelanjutan, daripada berakhir sebagai limbah. Ekonomi sirkular tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga dapat membuka peluang bisnis baru dengan menciptakan pasar untuk bahan daur ulang dan produk yang didesain untuk bertahan lama. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular ke dalam model bisnis mereka, perusahaan dapat menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan lebih tahan terhadap fluktuasi harga bahan baku.
4. Kolaborasi juga membuka peluang inovasi dalam CSR. Mengingat kompleksitas tantangan global yang dihadapi, perusahaan tidak dapat bertindak sendiri. Kemitraan dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan bahkan pesaing dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih besar. Misalnya, inisiatif kolaboratif untuk melestarikan hutan atau mengelola sumber daya air secara berkelanjutan sering kali memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk berhasil. Melalui kolaborasi, perusahaan dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan teknologi, serta memperkuat dampak dari inisiatif CSR mereka.
5. Digitalisasi dan data juga menawarkan peluang besar untuk inovasi dalam CSR. Perkembangan teknologi digital, termasuk big data, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of

Things (IoT), memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data lingkungan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi, memantau emisi secara real-time, dan mengidentifikasi peluang untuk peningkatan efisiensi. Selain itu, digitalisasi memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam pelaporan CSR, sehingga perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan komprehensif kepada pemangku kepentingan (Bibri 2018).

6. Peluang inovasi dalam CSR juga mencakup pendidikan dan kesadaran. Dengan semakin banyaknya konsumen dan investor yang peduli terhadap isu-isu lingkungan, perusahaan dapat mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pemasaran yang menyoroti manfaat produk atau layanan berkelanjutan, serta melalui program CSR yang berfokus pada peningkatan kesadaran lingkungan di komunitas lokal. Dengan meningkatkan kesadaran publik tentang keberlanjutan, perusahaan tidak hanya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan dan reputasi merek.

Meskipun tantangan dalam penerapan CSR untuk lingkungan sangatlah besar, mereka juga membuka peluang untuk inovasi yang dapat mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi hijau, mengembangkan produk dan model bisnis yang berkelanjutan, membangun kemitraan strategis, dan memanfaatkan data digital, perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dan memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Inovasi dalam CSR tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga dapat memberikan keuntungan bisnis yang signifikan, menjadikan

keberlanjutan sebagai pilar utama dalam strategi perusahaan di masa depan.

6.7 Kebijakan dan Regulasi yang Mendorong CSR Lingkungan

6.7.1 Analisis Kebijakan Nasional dan Internasional yang Mendukung CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya dipengaruhi oleh inisiatif perusahaan sendiri, tetapi juga oleh kerangka kebijakan nasional dan internasional yang mendorong praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kebijakan dan regulasi ini berperan penting dalam menciptakan standar dan pedoman bagi perusahaan untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam operasi mereka. Di tingkat internasional, beberapa kebijakan dan inisiatif telah diadopsi untuk mendorong CSR berbasis lingkungan. Salah satu inisiatif paling signifikan adalah *Agenda 2030 for Sustainable Development* yang mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). SDGs memberikan kerangka kerja global yang mengarahkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai aspek keberlanjutan, termasuk tindakan terhadap perubahan iklim (SDG 13), penggunaan sumber daya yang berkelanjutan (SDG 12), dan pelestarian ekosistem darat dan laut (SDG 14 dan 15). Perusahaan didorong untuk menyelaraskan strategi CSR mereka dengan SDGs untuk memastikan bahwa mereka berkontribusi pada agenda global ini.

Selain SDGs, ada juga *United Nations Global Compact*, sebuah inisiatif sukarela yang mengajak perusahaan untuk mengadopsi dan melaporkan praktik-praktik bisnis yang selaras

dengan sepuluh prinsip di bidang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi. Dalam hal lingkungan, UN *Global Compact* menekankan pentingnya mendukung pendekatan kehati-hatian terhadap tantangan lingkungan, mengambil inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar, dan mendorong pengembangan serta penyebaran teknologi ramah lingkungan. Perusahaan yang berpartisipasi dalam UN *Global Compact* diharapkan untuk melaporkan kemajuan mereka secara transparan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dalam praktik CSR mereka.

Di tingkat nasional, banyak negara telah mengadopsi kebijakan dan regulasi yang mendukung CSR berbasis lingkungan. Di Eropa, misalnya, *European Green Deal* adalah kebijakan strategis yang bertujuan untuk membuat Eropa menjadi benua netral karbon pertama pada tahun 2050. Kebijakan ini mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi emisi, meningkatkan efisiensi energi, dan mendorong ekonomi sirkular. Di bawah kerangka Green Deal, perusahaan diharapkan untuk mengurangi jejak karbon mereka, mengadopsi praktik produksi yang berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap pelestarian keanekaragaman hayati. Perusahaan yang beroperasi di Eropa harus mematuhi regulasi ini sebagai bagian dari tanggung jawab CSR mereka.

Di banyak negara berkembang, pemerintah telah mulai memperkenalkan kebijakan yang mendorong CSR sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Di India, misalnya, Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan tertentu. Perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian dari laba bersih mereka untuk kegiatan CSR, termasuk inisiatif yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kebijakan

nasional dapat memaksa perusahaan untuk berkontribusi secara aktif terhadap tujuan-tujuan sosial dan lingkungan.

Kebijakan nasional lainnya yang signifikan termasuk berbagai undang-undang dan peraturan yang berfokus pada perlindungan lingkungan, seperti undang-undang pengelolaan limbah, undang-undang pengendalian polusi, dan peraturan tentang konservasi sumber daya alam. Regulasi ini tidak hanya mengatur bagaimana perusahaan harus mengelola dampak lingkungan dari operasi mereka, tetapi juga sering kali menyediakan insentif bagi perusahaan yang melampaui kepatuhan minimum dan berinvestasi dalam teknologi hijau atau inisiatif keberlanjutan lainnya.

6.7.2 Peran Pemerintah dan Lembaga Regulasi dalam Mendorong CSR Berbasis Lingkungan

Pemerintah dan lembaga regulasi memainkan peran sentral dalam mendorong perusahaan untuk mengadopsi dan melaksanakan CSR berbasis lingkungan. Melalui pembuatan kebijakan, pengawasan, dan penegakan regulasi, mereka menciptakan lingkungan yang memungkinkan dan mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi. Salah satu peran utama pemerintah adalah menetapkan standar dan regulasi lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Standar ini mencakup berbagai aspek operasional, mulai dari pengelolaan limbah dan emisi hingga penggunaan sumber daya alam dan perlindungan keanekaragaman hayati. Dengan menetapkan standar yang jelas dan tegas, pemerintah memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi persyaratan minimum, tetapi juga berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Regulasi ini juga sering disertai dengan mekanisme penegakan yang kuat, termasuk sanksi bagi perusahaan yang melanggar peraturan dan insentif bagi perusahaan yang mematuhi atau melebihi standar tersebut.

Selain regulasi, pemerintah juga dapat berperan dalam mendorong CSR melalui insentif fiskal dan keuangan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan atau yang mengadopsi praktik produksi berkelanjutan. Subsidi dan hibah untuk penelitian dan pengembangan dalam bidang energi terbarukan atau teknologi hijau juga merupakan cara efektif untuk mendorong inovasi dalam CSR berbasis lingkungan. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi lingkungan, tetapi juga untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mendukung keberlanjutan.

Pemerintah juga dapat mempromosikan CSR melalui program kemitraan publik-swasta. Dalam kemitraan ini, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang spesifik, seperti pengelolaan air yang berkelanjutan, rehabilitasi lahan yang terdegradasi, atau pelestarian hutan. Kemitraan ini memungkinkan mobilisasi sumber daya yang lebih besar dan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan proyek-proyek keberlanjutan. Selain itu, kemitraan publik-swasta sering kali memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan reputasi mereka dan memperluas dampak sosial dari inisiatif CSR mereka.

Lembaga regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan CSR berbasis lingkungan. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi lingkungan yang ada dan bahwa mereka melaporkan kinerja lingkungan mereka dengan cara yang transparan dan dapat diverifikasi. Misalnya, lembaga-lembaga seperti Environmental Protection Agency (EPA) di Amerika Serikat atau European Environment Agency (EEA) di Eropa, memiliki wewenang untuk melakukan audit lingkungan,

meninjau laporan keberlanjutan perusahaan, dan mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Selain itu, lembaga regulasi juga dapat berfungsi sebagai pusat pengetahuan dan sumber daya bagi perusahaan yang ingin meningkatkan praktik CSR mereka. Melalui penerbitan pedoman, laporan penelitian, dan studi kasus, lembaga regulasi dapat membantu perusahaan memahami tren terbaru dalam keberlanjutan, teknologi ramah lingkungan, dan praktik terbaik dalam CSR. Mereka juga dapat memfasilitasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, untuk mengembangkan solusi inovatif bagi tantangan keberlanjutan.

Di tingkat internasional, organisasi seperti International Organization for Standardization (ISO) dan Global Reporting Initiative (GRI) menyediakan standar dan kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan dan manajemen lingkungan yang diakui secara global. Standar-standar ini memberikan panduan bagi perusahaan dalam mengembangkan kebijakan dan praktik CSR yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan internasional. Dengan mengikuti standar internasional ini, perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja lingkungan mereka, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan global.

Secara keseluruhan, peran pemerintah dan lembaga regulasi dalam mendorong CSR berbasis lingkungan sangatlah penting. Melalui regulasi, insentif, kemitraan, dan penyediaan sumber daya, mereka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan terus mengembangkan kebijakan yang inovatif dan adaptif, pemerintah dan lembaga regulasi dapat memastikan bahwa CSR berbasis lingkungan menjadi bagian integral dari strategi bisnis perusahaan di

seluruh dunia, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

6.8 Studi Kasus Implementasi CSR dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Contoh Konkret dari Sektor Industri, Salah satu contoh implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sukses dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari praktik yang dilakukan oleh perusahaan:

1. Unilever, sebuah perusahaan multinasional yang beroperasi di sektor barang konsumen. Unilever telah lama dikenal sebagai pelopor dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam model bisnisnya melalui *Unilever Sustainable Living Plan* (USLP). Diluncurkan pada tahun 2010, USLP bertujuan untuk memisahkan pertumbuhan bisnis perusahaan dari dampak lingkungan, serta untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
2. Toyota Motor Corporation, sebuah perusahaan otomotif global yang telah mengembangkan inisiatif CSR yang berfokus pada pengurangan emisi karbon melalui inovasi teknologi dan efisiensi energi. Sebagai salah satu produsen kendaraan terbesar di dunia, Toyota memiliki tanggung jawab besar dalam mengurangi dampak lingkungan dari operasinya, terutama mengingat tingginya tingkat emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Toyota telah berkomitmen untuk mengurangi emisi CO₂ dari kendaraan dan operasionalnya melalui inisiatif *Toyota Environmental Challenge 2050*. Salah satu inisiatif utama mereka adalah pengembangan dan produksi kendaraan hibrida dan listrik, termasuk model terkenal seperti Toyota Prius. Melalui inovasi ini, Toyota tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca dari kendaraan yang diproduksi, tetapi juga menetapkan standar baru untuk industri otomotif dalam hal keberlanjutan.

3. Di sektor energi, Royal Dutch Shell telah mengimplementasikan berbagai inisiatif CSR yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai perusahaan energi global, Shell menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk menyediakan energi yang terjangkau dan andal, dengan tanggung jawab untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksinya. Shell telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam energi terbarukan, seperti angin, surya, dan bahan bakar hayati, serta mengurangi emisi dari operasional minyak dan gas mereka. Selain itu, Shell juga terlibat dalam proyek-proyek komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap energi bersih di daerah-daerah terpencil di dunia.
4. Perusahaan Patagonia, sebuah perusahaan pakaian dan peralatan luar ruang. Patagonia terkenal karena komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan, yang terwujud dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari bahan baku yang digunakan hingga metode produksi dan distribusi. Patagonia menggunakan bahan daur ulang dalam produknya, mempromosikan ekonomi sirkular melalui program *Worn Wear*, dan secara aktif terlibat dalam advokasi lingkungan. Patagonia bahkan telah mengambil langkah lebih jauh dengan menyisihkan 1% dari penjualan mereka untuk mendanai proyek-proyek lingkungan global, sebuah inisiatif yang dikenal sebagai "1% for the Planet".

6.9 Dampak Nyata dari Praktik CSR terhadap Lingkungan Hidup dan Masyarakat

Implementasi CSR oleh perusahaan-perusahaan di berbagai sektor industri tidak hanya memberikan manfaat bagi bisnis mereka, tetapi juga menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

1. Dalam kasus Unilever, USLP telah menghasilkan dampak lingkungan yang substansial. Unilever berhasil mengurangi separuh jejak lingkungan dari produknya antara tahun 2010 hingga 2020. Perusahaan ini telah mengurangi emisi gas rumah kaca dari operasi globalnya, menghemat miliaran liter air dalam proses produksi, dan mencapai nol limbah ke tempat pembuangan akhir di semua pabriknya. Selain dampak lingkungan, USLP juga telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif, termasuk peningkatan akses ke air bersih, perbaikan sanitasi, dan peningkatan kesehatan serta nutrisi di berbagai komunitas di seluruh dunia.
2. Toyota, melalui inisiatif Environmental Challenge 2050, telah berkontribusi pada pengurangan emisi global dengan memperkenalkan kendaraan hibrida dan listrik yang lebih efisien. Dampak nyata dari inisiatif ini dapat dilihat dari penurunan emisi CO₂ yang signifikan dari kendaraan Toyota yang beredar di seluruh dunia. Selain itu, Toyota juga telah mengurangi jejak karbon dari operasional pabrik mereka dengan mengadopsi teknologi hemat energi dan memperkenalkan proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Dampak positif lainnya adalah peningkatan kesadaran konsumen tentang pentingnya memilih kendaraan yang lebih ramah lingkungan, yang pada gilirannya mendorong permintaan pasar untuk teknologi hijau.
3. Royal Dutch Shell, melalui investasinya dalam energi terbarukan, telah membantu mengurangi ketergantungan global pada bahan bakar fosil yang berpolusi tinggi. Proyek-proyek energi bersih Shell tidak hanya mengurangi emisi CO₂, tetapi juga menyediakan sumber energi yang lebih berkelanjutan bagi komunitas di berbagai belahan dunia. Inisiatif Shell untuk meningkatkan akses energi di daerah-daerah terpencil juga telah membawa perubahan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan kualitas hidup dan pembangunan ekonomi di komunitas yang sebelumnya tidak memiliki akses ke listrik.

4. Patagonia, dengan fokusnya pada keberlanjutan lingkungan, telah menciptakan model bisnis yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga mendukung komunitas global. Dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang dan mempromosikan program ekonomi sirkular seperti Worn Wear, Patagonia telah mengurangi limbah tekstil secara signifikan dan menginspirasi industri mode untuk mengikuti jejak mereka. Selain itu, kontribusi finansial Patagonia terhadap proyek-proyek lingkungan melalui 1% for the Planet telah mendukung upaya pelestarian alam di berbagai lokasi di seluruh dunia. Dampak dari inisiatif ini termasuk pelestarian habitat alami, perlindungan spesies yang terancam punah, dan pengurangan polusi.

Selain dampak langsung pada lingkungan, praktik CSR ini juga memberikan manfaat sosial yang luas. Seperti:

1. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan CSR berbasis lingkungan dapat meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan bisnis jangka Panjang.
2. CSR juga dapat meningkatkan moral dan keterlibatan karyawan, karena banyak karyawan yang merasa bangga bekerja untuk perusahaan yang menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan.
3. Selain itu, inisiatif CSR yang melibatkan komunitas lokal sering kali menghasilkan hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dan masyarakat, yang dapat mengurangi risiko konflik sosial dan meningkatkan dukungan bagi operasi perusahaan.

Namun, tantangan dalam implementasi CSR tetap ada, termasuk kebutuhan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan strategi dengan perubahan kondisi global dan lokal. Meskipun demikian, studi kasus dari sektor industri ini menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang

inovatif, perusahaan dapat membuat dampak yang signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Praktik CSR yang efektif tidak hanya memberikan kontribusi penting terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Dalam era di mana keberlanjutan semakin menjadi fokus utama dalam dunia bisnis, perusahaan yang berhasil mengintegrasikan CSR ke dalam strategi mereka memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, sekaligus memberikan dampak positif yang lebih luas bagi planet dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiaei, K, Bontis, N, Barani, OR & Jusoh, R 2021, 'Corporate social responsibility and sustainability performance measurement systems: implications for organizational performance', *Journal of Management Control*, vol. 32, pp. 85–126.
- Bibri, S 2018, 'The IoT for Smart Sustainable Cities of the Future: An Analytical Framework for Sensor-Based Big Data Applications for Environmental Sustainability', *Sustainable Cities and Society*, vol. 38.
- Bouman, R 2018, 'Back to the Future: The Potential of Intergenerational Justice for the Achievement of the Sustainable Development Goals', *Sustainability*, vol. 10, p. 427.
- ElAlfy, A, Palaschuk, N, El-Bassiouny, D, Wilson, J & Weber, O 2020, 'Scoping the Evolution of Corporate Social Responsibility (CSR) Research in the Sustainable Development Goals (SDGs) Era', *Sustainability*.
- Ganesh, MK & Venugopal, B 2023, 'Challenges, Practice and Impact of Corporate Social Responsibility on Sustainable Development of Environment and Society', *Journal of Law and Sustainable Development*.
- Hertwich, E, Ali, S, Ciacci, L, Fishman, T, Heeren, N, Masanet, E, Asghari, F, Olivetti, E, Pauliuk, S, Tu, Q & Wolfram, P 2019, 'Material efficiency strategies to reducing greenhouse gas emissions associated with buildings, vehicles, and electronics – A review', *Environmental Research Letters*, vol. 14.
- Ismail, H, Saleem, M, Zahra, S, Tufail, M & Akmal, R 2021, 'Application of Global Reporting Initiative (GRI) Principles for Measuring Quality of Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure: Evidence from Pakistan', *Sustainability*, vol. 13, p. 11409.

- Jacquemin, L, Pontalier, P-Y & Sablayrolles, C 2012, 'Life cycle assessment (LCA) applied to the process industry: a review', *The International Journal of Life Cycle Assessment*, vol. 17, pp. 1028–1041.
- Lloret, A 2016, 'Modeling corporate sustainability strategy', *Journal of Business Research*, vol. 69, no. 2, pp. 418–425.
- Moldan, B, Janoušková, S & Hák, T 2012, 'How to understand and measure environmental sustainability: Indicators and targets', *Ecological Indicators*, vol. 17, pp. 4–13.
- Nassani, AA, Hadi, H, Condrea, E, Grigorescu, A, Yousaf, Z & Haffar, M 2023, 'Zero Waste Management: Investigation of Green Technology, the Green Supply Chain, and the Moderating Role of CSR Intentions', *Sustainability*, vol. 15, p. 4169.
- van der Ploeg, L & Vanclay, F 2013, 'Credible claim or corporate Spin?: A checklist to evaluate corporate sustainability reports', *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, vol. 15.
- Priyanta, MSeIrD 2016, 'Corporate Social Responsibility (Csr) Perspective from Environmental Law Compliance and Enforcement for Sustainable Development'.
- RISWAN, S & YAMADA, I 2006, 'A note on the progress of biodiversity research in Indonesia', *Tropics*, vol. 15, no. 3, pp. 249–258.
- Rodier, DJ & Zeeman, MG 2019, 'Ecological Risk Assessment', *Environmental Risk Assessment*.
- Yang, S, Zhao, W, Liu, Y, Cherubini, F, Fu, B & Pereira, P 2020, 'Prioritizing sustainable development goals and linking them to ecosystem services: A global expert's knowledge evaluation', *Geography and Sustainability*, vol. 1, no. 4, pp. 321–330.

BAB 7

IMPLEMENTASI AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL PADA SEKTOR AGRIKULTUR: MODEL DAN PRAKTEK TERBAIK

Oleh Neks Triani

7.1 Pendahuluan

Kelestarian lingkungan sangat memegang peranan penting bagi kelangsungan ekosistem yang ada di dalamnya, hal ini tentu menjadi dambaan dan harapan tetap terjadinya keseimbangan penggunaan lingkungan dan berbagai sumber-sumber kekayaan yang ada di dalamnya, sehingga dampaknya pun tetap harus menjadi perhatian semua pihak. Seiring dengan perkembangan dan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan aktivitas ekonomi yang dikembangkan, baik perorangan maupun perusahaan, seiring itu pula mulai bergeser menurunnya kualitas lingkungan yang ada.

Saat ini kemunculan Isu lingkungan dengan berbagai masalah yang timbul semakin memperoleh perhatian dan merupakan salah satu isu yang penting. sebab banyak kasus-kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, yang tanpa kita sadari saat ini merupakan dampak dari kerusakan lingkungan. Banyak pihak yang terdorong untuk peduli terhadap pentingnya melestarikan lingkungan, selain itu, sosialisasi terkait manfaat dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan telah sering dilakukan, namun hal ini seakan tidak berpengaruh, justru kerusakan lingkungan semakin banyak terjadi. Kerusakan

lingkungan yang ada kaitannya dengan dampak operasi perusahaan, maka diperlukan adanya suatu alat kontrol dan sistem tata kelola yang baik, mengenai dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas operasi perusahaan. Oleh karenanya, akuntansi lingkungan dianggap sebagai solusi terbaik dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan.

Akuntansi lingkungan merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pengelolaan dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasi perusahaan. Namun, penerapan akuntansi lingkungan juga belum sepenuhnya sempurna, masih banyak yang perlu dibenahi dalam penerapannya. (Kusuma, Asmeri and Begawati, 2019). Akuntansi lingkungan dan sosial juga dianggap penting di sektor pertanian untuk menilai dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertanian. Hal ini menyangkut pencatatan dan pelaporan biaya yang terkait dengan konservasi lingkungan dan tanggung jawab sosial (Abbas *et al.*, 2021).

Sektor pertanian memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat karena kegiatan agrikultur sering kali melibatkan penggunaan sumber daya alam dalam jumlah besar, seperti air dan tanah, serta mempengaruhi ekosistem lokal. Oleh karenanya, penerapan akuntansi lingkungan dan sosial menjadi penting untuk mengelola dan meminimalisir dampak negatif dari lingkungan serta dapat meningkatkan kegiatan operasional perusahaan yang keberlanjutan pada sektor agrikultur.

Akuntansi lingkungan dan sosial juga merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan dan sosial ke dalam sistem akuntansi tradisional. Hal ini melibatkan pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi yang relevan dengan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis. Pada sektor agrikultur, praktik tersebut sangat penting mengingat

sektor agrikultur berhubungan dengan lingkungan alam dan masyarakat lokal.

Sebagai contoh, aktivitas agrikultur sering kali berdampak langsung pada kualitas tanah, air, dan biodiversitas. Selain itu, komunitas yang tinggal di sekitar area agrikultur sering kali bergantung pada aktivitas tersebut untuk mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, implementasi akuntansi lingkungan dan sosial dapat membantu perusahaan agrikultur untuk mengelola dampak-dampak ini dengan lebih baik, serta meningkatkan hubungan dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya.

7.2 Akuntansi Lingkungan dan Sosial Pada Sektor Agrikultur

Industri Agrikultur merupakan suatu bidang usaha yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan makanan, bahan baku industri, atau sumber energi, dan untuk memiliki tanggung jawab dalam mengelola dampak praktik lingkungan yang memungkinkan munculnya hasil dari proses produksi. Pertanian masa depan prospeknya akan memiliki potensi besar yang dapat menjadi sektor penggerak dalam industri pasar untuk meningkatkan ekonomi. Terlebih lagi, sektor pertanian dapat memberikan dampak peningkatan terhadap perekonomian jika industri agrikultur menjalankan bisnis operasionalnya dengan baik (Abbas *et al.*, 2021).

Studi menunjukkan bahwa kinerja lingkungan yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan keunggulan kompetitif (Flammer, 2021). Selain itu, CSR yang efektif dapat meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan dan berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan (Servaes and Tamayo, 2013), Selain itu Kinerja

lingkungan melalui insentif reputasi (PROPER) yang menyebabkan peningkatan profitabilitas baik laba atas aset maupun laba atas ekuitas (Abbas *et al.*, 2021).

7.2.1 Akuntansi Lingkungan Pada Sektor Agrikultur

Akuntansi lingkungan pada sektor agrikultur semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Sektor agrikultur mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan, terutama dalam hal penggunaan lahan, air, dan energi, serta emisi gas rumah kaca. Akuntansi lingkungan memiliki peran penting dalam membantu perusahaan agrikultur mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dari operasinya. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.



Gambar 7. 1. Penggunaan Teknologi Pertanian Tepat Guna dan Berkelanjutan
(Sumber: Image Google.com)

Akuntansi lingkungan adalah kerangka kerja untuk mengukur biaya dan manfaat dari inisiatif keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan agrikultur. Misalnya, penggunaan teknologi pertanian berkelanjutan yang dapat mengurangi

penggunaan pestisida dan pupuk buatan, yang tidak hanya memberikan dampak positif terhadap lingkungan, namun juga dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang.

Implementasi akuntansi lingkungan pada sektor agrikultur akan memberi dampak positif terhadap reputasi perusahaan. Ketika konsumen dan investor lebih memahami terhadap isu-isu keberlanjutan, transparansi dalam pelaporan kinerja lingkungan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan konsumen dan investor terhadap perusahaan. Perusahaan agrikultur yang sudah go publik dalam pelaporannya menyajikan dampak lingkungannya dan berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif dari aktifitas perusahaan terhadap lingkungannya tersebut, sering kali lebih mendapat perhatian pasar.

Akuntansi lingkungan dalam sektor agrikultur diperkirakan akan terus bertumbuh di masa depan, seiring dengan berkembangnya regulasi dan tuntutan pasar untuk keberlanjutan. Perusahaan agrikultur perlu terus memperbarui praktik akuntansi lingkungan mereka agar tetap sesuai dengan perkembangan standar internasional. Inovasi dalam teknologi, seperti analitik data dan pemantauan real-time, diharapkan dapat mendukung penerapan akuntansi lingkungan yang lebih efektif dan efisien. Sehingga, akuntansi lingkungan dapat menjadi elemen utama dalam strategi perusahaan agrikultur untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang dan menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab lingkungan.

7.2.2 Akuntansi Sosial Pada Sektor Agrikultur

Akuntansi sosial dalam sektor agrikultur telah menjadi area perhatian yang signifikan, terutama karena sektor ini memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Akuntansi sosial melibatkan pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan dampak sosial dari aktivitas bisnis, yang mencakup aspek-aspek seperti kondisi

kerja, hak asasi manusia, kesejahteraan komunitas lokal, serta kontribusi terhadap pembangunan sosial. Di sektor agrikultur, akuntansi sosial dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan menangani isu-isu sosial yang terkait dengan operasional kegiatan di sektor agrikultur, seperti kesejahteraan petani, hak pekerja, dan dampak sosial dari penggunaan lahan.

Akuntansi sosial juga penting dalam mengukur kontribusi sektor agrikultur terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Perusahaan agrikultur sering kali menjadi penyedia lapangan kerja utama di daerah pedesaan, dan oleh karena itu, pengelolaan dampak sosial yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan juga berdampak positif pada komunitas lokal. Dengan mengukur dampak sosial dari kegiatan agrikultur, seperti program pelatihan bagi petani atau inisiatif pemberdayaan komunitas, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 7. 2. Akuntansi Sosial, Program CSR
(Sumber: Image Google.com)

Selain itu, akuntansi sosial dalam sektor agrikultur dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam era di mana konsumen dan investor semakin peduli terhadap isu-isu sosial, perusahaan yang

transparan dalam melaporkan dampak sosial mereka akan memiliki keunggulan kompetitif. Transparansi dalam pelaporan sosial juga membantu perusahaan untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan menghindari potensi konflik yang dapat timbul dari dampak negatif yang tidak dikelola dengan baik. Misalnya, pelaporan yang jujur tentang kondisi kerja di perkebunan atau dampak sosial dari proyek perluasan lahan dapat mencegah kritik dari LSM dan media, serta meningkatkan citra perusahaan di mata publik.

Implementasi akuntansi sosial dalam sektor agrikultur juga dapat mendorong inovasi sosial dan peningkatan kinerja perusahaan. Dengan memahami dan mengelola dampak sosial mereka, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk inovasi yang tidak hanya meningkatkan kinerja sosial tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis. Misalnya, program pemberdayaan petani yang meningkatkan keterampilan dan produktivitas dapat menghasilkan keuntungan ganda berupa peningkatan pendapatan petani sekaligus memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas bagi perusahaan.

Perusahaan agrikultur perlu terus meningkatkan praktik akuntansi sosial nya dengan mengadopsi standar pelaporan yang lebih komprehensif dan menggunakan teknologi baru untuk mengukur dampak sosial secara lebih akurat. Dengan demikian, akuntansi sosial akan menjadi elemen kunci dalam strategi keberlanjutan sektor agrikultur, yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

7.2.3 Keterkaitan Antara Akuntansi Lingkungan dan Akuntansi Sosial pada Sektor Agrikultur

Akuntansi lingkungan dan akuntansi sosial memiliki hubungan yang erat dalam konteks sektor agrikultur, di mana keduanya berperan penting dalam mengelola dan melaporkan dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan dan

masyarakat. Dalam sektor agrikultur, aktivitas bisnis tidak hanya mempengaruhi lingkungan fisik melalui penggunaan lahan, air, dan energi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan, termasuk kesejahteraan pekerja, hak asasi manusia, dan kesejahteraan komunitas lokal. Oleh karenanya, pengintegrasian akuntansi lingkungan dan sosial menjadi penting dalam mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, di mana perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap masyarakat di sekitarnya.

Akuntansi lingkungan pada sektor agrikultur terfokus pada pengukuran dan pelaporan dampak dari aktivitas sektor agrikultur terhadap lingkungannya, seperti emisi karbon, penggunaan air, dan degradasi lahan. Sementara itu, akuntansi sosial lebih berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan dampak sosial dari kegiatan agrikultur, termasuk kondisi kerja, hak pekerja, dan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan komunitas lokal. Kedua jenis akuntansi ini dapat saling melengkapi, karena dampak lingkungan sering kali berkaitan erat dengan dampak sosial.

Salah satu aspek penting dari hubungan antara akuntansi lingkungan dan sosial adalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, perusahaan agrikultur dapat memberikan laporan yang lebih komprehensif kepada pemangku kepentingan mengenai dampak dari operasi perusahaannya. mencakup dampak terhadap lingkungan, serta bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap lingkungan sosial di masyarakat sekitar. Laporan yang transparan dan terintegrasi ini dapat meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan, investor, pemerintah, dan masyarakat umum.

Hubungan antara akuntansi lingkungan dan sosial juga akan terlihat melalui strategi keberlanjutan perusahaan. Keberlanjutan dalam sektor agrikultur tidak dapat dicapai jika

hanya fokus pada satu aspek saja, baik itu lingkungan atau sosial. Namun, diperlukan pendekatan yang menyeluruh di mana perusahaan mengelola dampak lingkungannya, serta memastikan bahwa kegiatan operasional juga dapat memberikan manfaat sosial. Misalnya, praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi penggunaan pestisida dan meningkatkan kesehatan tanah juga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan komunitas lokal yang tergantung pada sumber daya alam.

7.3 Regulasi dan Kebijakan Terkait Akuntansi Lingkungan dan Sosial di Sektor Agrikultur

Regulasi dan kebijakan terkait akuntansi lingkungan dan sosial di sektor agrikultur memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa perusahaan-perusahaan agrikultur bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas mereka. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu-isu keberlanjutan, pemerintah di berbagai negara telah mengembangkan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan dampak lingkungan dan sosial mereka secara transparan.

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan suatu praktik terbaik secara global dalam melaporkan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial secara publik. Standar GRI dapat digunakan untuk mengukur pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkaitan dengan akuntansi sosial.

Di Indonesia regulasi dan kebijakan terkait akuntansi lingkungan dapat di lihat melalui program penilaian kinerja lingkungan hidup yang dikenal dengan PROPER merupakan inisiatifnya dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan serta memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengikuti peraturan terkait lingkungan hidup yang diwajibkan (Abbas *et al.*, 2021). Selain itu

terdapat juga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur, yang merupakan salah satu standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur tentang, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan aset biologis dan produk pertanian di sektor agrikultur. PSAK 69 mengacu pada International Financial Reporting Standard (IFRS) 41 yang diadopsi untuk memberikan panduan bagi perusahaan agrikultur dalam menyusun laporan keuangannya.

7.4 Model dan Praktik dalam Implementasi Akuntansi Lingkungan dan Sosial pada Sektor Agrikultur

Dalam implementasi akuntansi lingkungan dan sosial pada sektor agrikultur, model dan praktik terbaik yang akan digunakan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Model yang digunakan mencakup berbagai komponen penting yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa perusahaan agrikultur dapat mengelola dampak lingkungan dan sosial mereka secara efektif. Berikut adalah model dan praktik terbaik dalam implementasi akuntansi lingkungan dan sosial pada sektor agrikultur:

1. Pengembangan Kebijakan Lingkungan dan Sosial, Kebijakan ini harus mencakup tujuan keberlanjutan yang spesifik, komitmen terhadap perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan ini biasanya meliputi aspek-aspek seperti pengelolaan sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, serta perlindungan hak-hak pekerja dan komunitas lokal.
2. Pengukuran dan Pelaporan Dampak Lingkungan dan Sosial, Perusahaan agrikultur harus mengembangkan

sistem pengukuran yang akurat untuk memantau dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan, seperti penggunaan air, emisi karbon, dan konsumsi energi. Selain itu, perusahaan harus melaporkan dampak sosial dari aktivitas operasinya, termasuk dampak terhadap kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar. Pelaporan ini harus dilakukan sesuai dengan standar pelaporan internasional, seperti Global Reporting Initiative (GRI) atau ISO 14001, untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan adalah konsisten dan dapat diandalkan.

3. Integrasi Akuntansi Lingkungan dan Sosial dalam Pengambilan Keputusan, informasi tentang dampak lingkungan dan sosial harus digunakan untuk menginformasikan keputusan investasi, perencanaan operasional, dan pengembangan produk. Misalnya, data tentang penggunaan air dan emisi karbon dapat digunakan untuk mengidentifikasi area di mana perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Integrasi ini tidak hanya membantu perusahaan dalam memenuhi regulasi lingkungan tetapi juga mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.
4. Keterlibatan dan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan, perusahaan harus berkomunikasi secara aktif dengan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, masyarakat lokal, dan lembaga pemerintah, mengenai kinerja lingkungan dan sosial mereka. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka, konsultasi, dan pelaporan berkala. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan umpan balik dari pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang dilakukan.

5. Audit dan Verifikasi Eksternal, Perusahaan harus melibatkan pihak ketiga independen untuk melakukan audit atas sistem pengukuran, pelaporan, dan kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan lingkungan dan sosial. Audit eksternal membantu mengidentifikasi kekurangan dalam pelaporan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Verifikasi ini juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan yang disediakan oleh perusahaan.
6. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan, Perusahaan harus secara berkala mengevaluasi efektivitas kebijakan dan praktik mereka dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial. Evaluasi ini dapat melibatkan analisis kinerja penilaian risiko, dan tinjauan kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan harus mengidentifikasi area untuk perbaikan dan mengadopsi praktik baru atau teknologi inovatif untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial.

7.4 Kesimpulan

Implementasi akuntansi sosial dan lingkungan pada sektor agrikultur berperan penting dalam keberlanjutan perusahaan dan tanggung jawab sosial pada industri agrikultur. Model yang efektif dalam implementasinya melalui pengembangan kebijakan lingkungan dan sosial yang komprehensif, yang melingkupi tujuan spesifik dan komitmen untuk perlindungan lingkungan serta kesejahteraan sosial. Dengan menetapkan kebijakan yang jelas, perusahaan agrikultur dapat mengarahkan upayanya secara efektif untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasionalnya dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan disusun

dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, komunitas lokal, dan pelanggan.

Pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan dan sosial merupakan langkah kunci dalam implementasi akuntansi sosial dan lingkungan. Perusahaan agrikultur harus mengembangkan sistem yang akurat untuk memantau dan melaporkan dampak operasionalnya, seperti penggunaan sumber daya alam, emisi polutan, dan dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Penggunaan standar internasional, seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan ISO 14001, membantu memastikan bahwa pelaporan dilakukan secara konsisten dan transparan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja perusahaan dalam hal keberlanjutannya dan memberikan umpan balik yang konstruktif, yang dapat mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan aktifitas perusahaan.

Integrasi data lingkungan dan sosial ke dalam pengambilan keputusan strategis merupakan aspek penting dari model implementasi tersebut. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sistem pengukuran dan pelaporan, perusahaan agrikultur dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai investasi, operasional, dan pengembangan produk. Ini tidak hanya membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan regulasi tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya jangka panjang. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menghadapi tantangan lingkungan dan sosial dengan lebih baik dan mengadaptasi strategi mereka untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.

Keterlibatan pemangku kepentingan dan audit eksternal berkontribusi pada efektivitas implementasi akuntansi sosial dan lingkungan. Komunikasi yang aktif dengan pemangku kepentingan, seperti komunitas lokal, investor, dan lembaga

pemerintah, membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang berlaku. Selain itu, audit eksternal yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen memastikan bahwa laporan lingkungan dan sosial akurat dan dapat dipercaya. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dan melakukan verifikasi eksternal, perusahaan dapat memperkuat akuntabilitas mereka dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan berkelanjutan dalam praktik akuntansi sosial dan lingkungan pada sektor agrikultur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. *et al.* (2021) 'Do Environmental Compliances Reduce Agricultural Profitability? An Inference from Indonesia', in *E3S Web of Conferences*. EDP Sciences. Available at: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131604006>.
- Flammer, C. (2021) 'Corporate green bonds', *Journal of Financial Economics*, 142(2), pp. 499–516. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.01.010>.
- Kusuma, A., Asmeri, R. and Begawati, N. (2019) 'Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan dalam Pengelolaan Lomah dan Tanggung Jawab Sosial pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi', *INA-Rxiv Papers*, (1), pp. 1–15.
- Servaes, H. and Tamayo, A. (2013) 'The impact of corporate social responsibility on firm value: The role of customer awareness', *Management Science*, 59(5), pp. 1045–1061. Available at: <https://doi.org/10.1287/mnsc.1120.1630>.

BAB 8

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KONTEKS LINGKUNGAN

Oleh Frida Fanani Rohma

8.1 Konsep Dasar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan sebagai manifestasi dari badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi secara konsisten, dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dicatat dalam laporan keuangan. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sosial, selain menghasilkan keuntungan finansial. Tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan, membuat keputusan, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat (Rohma, 2023).

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan berarti bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingannya, termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan, dalam segala aspek operasionalnya, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari kontribusi dunia usaha untuk pembangunan berkelanjutan, mengingat

dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan mereka.

8.2 Peraturan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Keputusan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2007 asal 1 ayat (7), Program Bina Lingkungan, atau Program BL, adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN dengan menggunakan dana dari bagian laba BUMN. Pada tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara resmi tanggung jawab sosial perusahaan baru, sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, berlaku untuk penanaman modal dalam negeri dan asing, merupakan peraturan lain yang mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab sosial. Pasal 15(b) menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. ISO 26000 berlaku untuk semua sektor, baik publik maupun swasta. Karena setiap organisasi memiliki kemampuan untuk memberikan dampak pada lingkungan alam maupun sosial, organisasi pemerintah, NGO, dan tentu saja sektor bisnis dapat melakukan tanggung jawab sosial. ISO 26000 membantu organisasi melaksanakan tanggung jawab sosial dengan memberikan pedoman praktis dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

8.3 Dimensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sehubungan dengan pembangunan berkelanjutan, konsep tanggung jawab sosial perusahaan membaginya menjadi dua kategori:

1. Dimensi internal yang mencakup manajemen sumber daya manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, adaptasi terhadap perubahan dan pengelolaan dampak lingkungan, serta sumber daya alam.

2. Dimensi eksternal yang mencakup pemberdayaan komunitas lokal, partner usaha yang mencakup para pemasok dan konsumen, hak asasi manusia, dan permasalahan lingkungan global). Organisasi ini mengajukan pendekatan secara holistik terhadap CSR, yang di dalamnya mencakup hal-hal berikut ini:

- i. Manajemen terpadu tanggung jawab sosial
- ii. Pelaporan dan audit tanggung jawab sosial
- iii. Kualitas dalam pekerjaan
- iv. Label sosial dan lingkungan
- v. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial

Pada sisi modern perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimana menciptakan laba yang maksimal, tetapi juga harus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, atau yang langsung mempengaruhi kondisi sosial ekonomis anggota masyarakat.

8.4 Faktor Pendorong Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan menerapkan tanggung jawab sosialnya, yaitu dari luar perusahaan dan dari dalam perusahaan.

1. Termasuk jenis pendorong eksternal, seperti peraturan, undang-undang, dan keharusan melakukan analisis dampak lingkungan (Amdal). Pemerintah,

melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), telah memberlakukan audit Proper.

2. Pendorong internal berasal dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan. Perilaku ini mencakup tingkat kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap pembangunan masyarakat sekitar (tanggung jawab pembangunan masyarakat).

Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan kelompok masyarakat yang mempengaruhinya, seperti pemegang saham, penanam modal, pekerja, konsumen, pelanggan, pemasok, lingkungan sekitar, pesaing, serikat pekerja, dan pemerintah.

8.5 Pengelompokkan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Promosi tujuan, pemasaran terkait tujuan, pemasaran kemasyarakatan, filantropi, kesukarelaan komunitas, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial adalah bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan. Pada program *Cause Promotions*, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. Pada program *Cause Related Marketing*, perusahaan berkomitmen untuk menyumbangkan bagian tertentu dari keuntungan mereka untuk suatu kegiatan sosial tertentu. Banyak kali, kegiatan ini didasarkan pada penjualan produk tertentu, untuk

jangka waktu tertentu, dan derma. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam program ini antara lain: untuk menarik pelanggan baru, menjangkau relung pasar, meningkatkan penjualan produk perusahaannya dan membangun identitas merek yang positif.

Pertama, *Corporate Social Marketing*, Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan promosi untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini lebih banyak berfokus pada perubahan perilaku terkait dengan masalah kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan dan kerugian, lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Perusahaan mendapatkan banyak keuntungan dari program ini, seperti meningkatkan posisi merek perusahaan, menumbuhkan preferensi merek, meningkatkan penjualan, dan menarik mitra yang dapat diandalkan. Perusahaan juga sangat tertarik untuk mengubah perilaku masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial.

Kedua, *Corporate Philanthropy*, dalam program ini, perusahaan memberikan donasi langsung kepada masyarakat tertentu. Sumbangan biasanya berbentuk uang secara tunai, paket bantuan, atau layanan yang diberikan secara gratis. Perusahaan mendapatkan banyak keuntungan dari program ini, seperti meningkatkan reputasi mereka, memperkuat masa depan mereka dengan menciptakan reputasi yang baik di mata masyarakat, memperoleh pemasok dengan produk berkualitas tinggi, dan memperoleh reputasi yang baik dari para pembuat

peraturan yang akan memengaruhi operasi masa depan mereka. Selain itu, untuk mempengaruhi proses penyelesaian masalah sosial di komunitas lokal.

Ketiga, *Community Volunteering*, perusahaan mendorong karyawan, pemegang franchise, dan rekan bisnis untuk menyisihkan waktu secara sukarela untuk membantu organisasi lokal dan masyarakat sasaran program. Perusahaan memanfaatkan program ini untuk membangun hubungan yang tulus dengan komunitas, memberikan kontribusi kepada program untuk mencapai tujuan perusahaan, dan meningkatkan kepuasan karyawan dan motivasi mereka.

Keempat, *Socially Responsible Business Practise*, Perusahaan dalam program ini tidak hanya melakukan hal-hal bisnis yang diharuskan oleh hukum, tetapi juga melakukan investasi yang mendukung kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan menjaga lingkungan. Program ini membantu perusahaan menghemat uang, menjadi lebih sadar lingkungan, meningkatkan kesadaran karyawan, membuat merek perusahaan lebih disukai masyarakat, dan meningkatkan kebanggaan karyawan.

8.6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Konteks Lingkungan

Tanggung jawab pribadi adalah dasar dari konsep dasar tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab berdasarkan hukum. Pasal ini

kemudian mengembangkan tanggung jawab tertentu menjadi tanggung jawab bersama. Setelah beberapa waktu, gagasan tersebut berubah menjadi tanggung jawab korporasi karena korporasi dapat melakukan sesuatu yang merugikan pihak ketiga.

Perusahaan melakukan kegiatan di masyarakat dengan dua efek, baik positif maupun negatif. Selama kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat, kegiatan tersebut dianggap positif, tetapi jika kegiatan tersebut membahayakan lingkungan, kegiatan tersebut dapat menjadi negatif. Timbulnya dampak negatif itulah yang perlu dan harus diatur agar tidak merugikan masyarakat dilingkungan dan para pemangku kepentingan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada dasarnya berasal dari rasa bertanggung jawab secara pribadi pada lingkungan bisnis, yang muncul dari orang-orang yang peka kepada sesama. Rasa ini muncul dan berkembang karena adanya perbedaan sosial ekonomi yang tajam antara pekerja dan pemilik dan pengurus perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan muncul sebagai hasil dari kewajiban moral. Ini berasal dari kewajiban moral yang berfokus pada kesejahteraan lingkungan tertentu, yang mengarah pada gagasan bahwa kesejahteraan bersama adalah yang harus dicapai. Ini baru berbicara tentang kesejahteraan bersama di perusahaan. Konsep kesejahteraan yang terbatas dan semakin meluas diikuti oleh tindakan yang sama, sehingga menjadi suatu konsep yang baik yang harus ditanggung oleh institusi. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab sosial perusahaan harus diterapkan, yang mencakup penerapan upah minimal

yang pantas untuk hidup layak, keselamatan kerja yang cukup untuk melindungi tenaga kerja, jaminan sosial yang pantas untuk masa depan tenaga kerja, dan kehidupan keluarga yang layak.

Konsep-konsep ini sangat manusiawi untuk karyawan dan masa depan perusahaan. Namun, kesadaran akan alam dan lingkungan telah berkembang. Konsep sebagaimana diuraikan di atas kemudian berkembang menjadi sesuatu yang berdasarkan kearifan manusia; itu tidak hanya menjadi kewajiban moral tetapi juga memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya, dan secara sadar mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Rohma, 2020; Rohma, 2023).

Karena sifatnya yang terbatas dan tidak terbarukan, daya dukung sumber daya alam yang dieksploitasi perusahaan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Konsep tanggung jawab lingkungan berkembang, dan hal ini mulai disadari. Orang-orang di seluruh dunia, baik dalam organisasi maupun negara, sadar bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dilindungi untuk kepentingan masa depan manusia dan kemanusiaan.

8.7 Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Manfaat yang dihasilkan dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan mencakup keuntungan bagi perusahaan sendiri, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Rohma (2021) menjelaskan keuntungan dari melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan melaksanakan tanggung jawabnya, perusahaan memperoleh empat keuntungan. Perusahaan dapat mencapai empat keuntungan berikut: ia dapat

memperoleh modal (capital) dengan lebih mudah dan mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas tinggi (Lutfia, et al., 2019). Ketiga, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan kritis dan mempermudah pengelolaan (Rohma, 2021).

Perusahaan yang menerapkan praktik tanggung jawab sosial yang positif bagi masyarakat akan meningkatkan nilai bisnis di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan dilindungi hak-haknya sebagai pekerja. Praktek tanggung jawab sosial perusahaan akan mengikuti tradisi dan budaya lokal jika ada masyarakat adat atau lokal.

Dalam hal lingkungan, perusahaan dapat mengambil bagian dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan untuk menghindari penggunaan sumber daya alam secara berlebihan; ini akan membantu menjaga kualitas lingkungan dengan mengurangi tingkat polusi, dan perusahaan sendiri akan memiliki dampak pada lingkungan. Untuk mencegah "corporate misconduct" atau malpraktik bisnis seperti penyuapan terhadap aparat negara atau hukum yang menyebabkan tingginya korupsi, negara harus menerapkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang baik. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

8.8 Tahapan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ada empat tahapan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengembangan masyarakat. Mereka adalah pengkajian, rencana pengobatan, tindakan pengobatan, dan pengawasan dan evaluasi. Assesment adalah proses menemukan masalah, yaitu kebutuhan yang dirasakan atau dirasakan, kebutuhan yang diekspresikan, dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan dalam proses ini agar mereka dapat merasakan bahwa masalah yang dibahas tidak sesuai dengan perspektif mereka.

Plant of Treatment adalah rencana tindakan untuk menangani masalah yang dirasakan masyarakat. Berkembangnya metodologi perencanaan dari bawah didorong oleh wacana tentang program program berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, tahap pelaksanaan adalah yang paling penting. Jika tidak ada kerja sama antara masyarakat, fasilitator, dan antar warga, sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat menyimpang saat dilaksanakan di lapangan. Monitoring, memantau kegiatan melalui kunjungan langsung atau survey Selain itu, evaluasi dan pelaporan rutin dilakukan untuk membentuk strategi dan pengembangan program selanjutnya.

8.9 Urgensi Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bisnis pasti memiliki alasan untuk melakukan tanggung jawab sosial. Karena motivasi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya terkait erat dengan tujuan perusahaan. Rohma (2023) menyatakan bahwa sulit untuk menentukan keuntungan perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosialnya dengan baik akan mendapat keuntungan. Dengan demikian, ada beberapa alasan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, mempertahankan dan meningkatkan reputasi perusahaan dan citra mereknya. Sebaliknya, tindakan yang merugikan akan merusak reputasi perusahaan, dan sebaliknya, tindakan yang bermanfaat akan meningkatkan reputasi perusahaan. Ini berfungsi sebagai modal non-keuangan utama bagi perusahaan dan investornya, memberikan nilai tambahan yang memungkinkan perusahaan untuk berkembang.

Kedua, layak mendapatkan *social licence to operate*. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sebagai imbalan yang diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan

persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.

Ketiga, mengurangi risiko yang dihadapi bisnis perusahaan. Perusahaan harus menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi harapan stakeholder dapat menyebabkan risiko yang tidak diharapkan. Jika itu terjadi, perusahaan tidak hanya harus menanggung kehilangan peluang, tetapi juga harus mengeluarkan biaya yang mungkin jauh lebih besar daripada biaya untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.

Keempat, mendistribusikan sumber daya. Bisnis yang memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan tanggung jawab sosial memiliki keunggulan bersaing karena dapat membantu mereka mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan.

Kelima, menyediakan akses pasar. Perusahaan dapat menemukan banyak peluang pasar jika mereka menginvestasikan dalam program tanggung jawab sosial mereka. Termasuk di dalamnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan membuka pangsa pasar baru.

Keenam, mengurangi biaya. Ada banyak contoh bagaimana bisnis dapat menguntungkan dari program tanggung jawab sosial, seperti mengurangi biaya melalui pengurangan limbah melalui proses daur ulang atau recycle.

Ketujuh, meningkatkan hubungan dengan pihak berwenang. Program tanggung jawab sosial perusahaan pasti akan membuat stakeholder berbicara dengan lebih sering. Nuansa seperti ini dapat membantu membangun kepercayaan dalam perusahaan.

Kedelapan, meningkatkan hubungan dengan otoritas. Perusahaan yang menerapkan program tanggung jawab sosial pada dasarnya berusaha untuk meringankan beban regulator karena pemerintahlah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah biasanya tidak dapat menanggung beban tersebut jika tidak ada bantuan dari perusahaan.

Kesembilan, karyawan merasa lebih semangat dan produktif. Ketika datang ke pelaku tanggung jawab sosial perusahaan, kesejahteraan mereka biasanya jauh melebihi standar normatif kewajiban yang diberikan kepada perusahaan. Oleh karena itu, menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah wajar.

Kesepuluh, ada kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Sangat mungkin bagi penggiat tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendapatkan penghargaan karena banyaknya insentif yang diberikan. Perusahaan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya, dan menjalin hubungan yang baik dengan regulator adalah bagian penting dari upaya tersebut. Perusahaan ini didirikan dengan izin pemerintah dan diharapkan dapat membantu pembangunan melalui pembayaran pajak dan biaya lainnya, serta secara sadar meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

8.10 Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Salah satu cabang akuntansi dalam ilmu sosial, akuntansi pertanggungjawaban sosial berfokus pada pengaturan, pengukuran, analisis, dan pengungkapan

bagaimana kegiatan ekonomi dan sosial berdampak pada tindakan perusahaan dan pemerintah dalam skala mikro dan makro. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan mengukur sumbangan sosial netto periodik suatu perusahaan, yang mencakup bukan hanya biaya dan keuntungan yang diterima perusahaan, tetapi juga manfaat yang diterima perusahaan.
2. Untuk menyediakan dengan cara yang optimal bagi semua kelompok sosial, informasi yang relevan mengenai tujuan, kebijakan, program, kinerja dan sumbangan perusahaan pada tujuan-tujuan sosial.

Proses akuntansi pertanggungjawaban sosial menghasilkan informasi yang akan membantu bisnis menilai kinerja sosialnya. Mereka juga akan membantu manajemen mencapai tujuan dengan memastikan bahwa telah ada kemajuan yang lebih besar yang diberikan kepada penghargaan publik dan kebutuhan bisnis secara keseluruhan. Selain itu, laporan sosial ini akan membantu manajemen mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan mereka.

8.11 Teknik Pengukuran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Teknik pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) yang dapat dipakai antara lain:

1. Penilaian Pengganti: jika nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, maka kita dapat mengestimasi dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kira-kira mempunyai kegunaan yang sama dengan yang diukur.
2. Teknik Survei: teknik ini mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi dari mereka yang dipengaruhi, yaitu kelompok masyarakat yang dirugikan atau yang menerima manfaat. Pengumpulan informasi yang paling mudah adalah dengan bertanya langsung kepada anggota kelompok masyarakat yang ada.
3. Biaya Perbaikan dan Pencegahan: untuk biaya-biaya sosial tertentu dapat dinilai dengan mengestimasi pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan.
4. Penilaian dari Penilai Independen. Penilai-penilai yang independen dapat berguna untuk menilai barang-barang tertentu. Hal ini analog dengan penilaian pengganti yang dilakukan oleh ahli dari luar perusahaan.
5. Putusan Pengadilan: putusan pengadilan, misalnya denda akibat dari suatu kegiatan.

8.12 Standarisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

ISO adalah lembaga internasional yang menangani standar tanggung jawab sosial bisnis. Standar Tanggungjawab Sosial atau Standar Tanggungjawab Sosial

ditetapkan oleh Dewan Manajemen ISO pada tahun 2001 (ISO, 2005). Pada dasarnya, CSR termasuk dalam kategori tanggung jawab sosial. Sejak Januari 2005, kelompok kerja ISO 26000 dibentuk untuk merumuskan draf Standar Tanggung Jawab Sosial, yang mencakup semua organisasi, termasuk pemerintah dan lembaga non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Menurut dokumen draf ISO 26000, tanggung jawab sosial adalah etika dan tindakan terkait tanggung jawab organisasi yang mempertimbangkan bagaimana aktivitas organisasi berdampak pada berbagai pihak dengan cara yang konsisten dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memperhatikan masyarakat dan lingkungan serta mematuhi peraturan yang berlaku dikenal sebagai tanggung jawab sosial. ISO 26000 memberikan prinsip-prinsip dasar, masalah umum, dan kerangka pikir yang dapat digunakan oleh semua organisasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial.

Tanggungjawab sosial perusahaan akan meningkatkan motivasi karyawan dan menciptakan lingkungan saling percaya di perusahaan. Perusahaan yang dinilai bertanggung jawab sosial telah terbukti meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya dengan mendukung konsumen, investor, pemasok, dan stakeholder lainnya. Jika dipandang sebagai investasi jangka panjang, praktek layanan pelanggan yang berkelanjutan akan bermanfaat karena perusahaan akan mendapatkan tempat di hati masyarakat dan izin operasional, dan bahkan dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan masyarakat adalah salah satu

bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang sering digunakan di Indonesia.

Di Indonesia, ada tiga kategori program tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, public relations, di mana perusahaan berusaha untuk membuat masyarakat melihat kegiatan perusahaan dengan cara yang positif. Kedua, strategi defensive, di mana perusahaan melakukan segala upaya untuk menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap kegiatan perusahaan, biasanya untuk menghindari serangan negatif dari masyarakat. Salah satu tujuan dari upaya CSR adalah untuk mengubah pemikiran negatif yang ada dengan pemikiran yang lebih baik. Ketiga, kegiatan berasal dari visi perusahaan; ini dapat berupa kegiatan luar perusahaan atau program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Global Reporting Initiative. 2006. *Sustainability Reporting G3 Guideliness*. Amsterdam-Netherlands: <http://www.globalreporting.org>
- Global Reporting Initiative. 2016. *Consolidated set of GRI sustainability reporting standards*. Amsterdam-Netherlands: <http://www.globalreporting.org>
- Lutfia, C., Hidayat, W., & Rohma, F. F. (2019). Determinan Nilai Perusahaan: Apakah Peran Pengungkapan Tanggungjawab Sosial?. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(2), 53-58.
- Rohma, F. F. (2021). Analisis Komparabilitas dan Fleksibilitas Triple Bottom Line Pada Aliran Kas Investor. *Kajian Akuntansi*, 22(1), 78-87.
- Rohma, F. F. (2019). Analisis biaya dan manfaat aliran kas investor: telaah literatur kewajaran dari nilai wajar. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 4(2), 49-65.
- Rohma, F. F. (2023). Does a green economy mentality exist? An experimental study in emerging country. *Asian Journal of Business Ethics*, 12(2), 285-304.
- Rohma, F. F. (2023). Pengantar Akuntansi Keberlanjutan. Purbalingga: Eureka Media Akasara.

BIODATA PENULIS



Rini Ridhawati, S.E., M.S.A., Ak.,
Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram.

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi.

BIODATA PENULIS



Sri Rahayu Syah, S.E., Ak., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi Keuangan Publik
Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi
Indonesia Makassar

Penulis lahir di Ujung Pandang, 01 April 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi lulus tahun 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) lulus tahun 2013 di Universitas Hasanuddin. Pendidikan S2 Akuntansi lulus tahun 2015 di Universitas Muslim Indonesia. Memperoleh sertifikat pendidik dan dinyatakan sebagai dosen profesional pada bidang ilmu akuntansi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada tahun 2020. Memperoleh sertifikat kompetensi bagian pembukuan pada bidang pekerjaan manajemen keuangan dari BNSP pada tahun 2020 dan sertifikat kompetensi pada bidang teknis akuntansi dengan kualifikasi/kompetensi teknis akuntansi madya dari BNSP pada tahun 2021.

BIODATA PENULIS



Victoria Kusumaningtyas Priyambodo, S.E., M.Sc.

Dosen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Yogyakarta tanggal 23 Agustus 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Sains Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Penulis menekuni bidang akuntansi manajemen, akuntansi biaya, dan akuntansi sektor publik.

BIODATA PENULIS



Annisa Nabila Hasan, S.E., M.E., MSc, CSRS

Dosen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran

Penulis lahir di Bandung tanggal 26 Januari 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran dan S2 pada Jurusan *Corporate Social Responsibility* University of Nottingham. Penulis menekuni bidang akuntansi dan keberlanjutan.

BIODATA PENULIS



Resmi Afifah Fadilah, S.E., M.E., M.S.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Garut

Penulis lahir di Kampar (Riau) tanggal 28 Desember 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Garut - Jawa Barat. Penulis menyelesaikan studi S2 Ekonomi Syariah di Universitas Islam Bandung dan S2 Ilmu Akuntansi di Universitas Indonesia.

BIODATA PENULIS



Neks Triani, SE.,M.Si

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi

Penulis lahir di Kendari tanggal 15 Februari 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas 45 Makassar dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.